



**BAPPEDALITBANG
KOTA LUBUK LINGGAU**



LINGGAU JUARA
MEMU BANGUN DAERAH YANG BERTAMBAH NILAI



**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN**

2025-2029

PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl.Garuda No. 10 Kelurahan Kayu Ara Lubuk Linggau Barat I Sumatera Selatan Telepon (0733)
325513 Fax. (0733) 325513 Koda Pos 31615



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 4. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

7. Perencanaan ...

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

14. Rencana ...

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

23. Kegiatan ...

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.
24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
27. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.

Pasal 2

- (1) RPJMD Kota dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.

(2) RPJMD ...

- (2) RPJMD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	: ROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V	: PENUTUP

BAB III ...

BAB III
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJMD Kota sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana RPJMD Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Kota.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD lingkup Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(4) Tata ...

- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD Kota tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat:

- a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. kebijakan umum APBD; atau

c. prioritas ...

c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 8

RPJMD Kota dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kota telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun 2026 dan perubahannya serta RKPD Tahun 2025 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Wali Kota berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 Agustus 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN ... 4 - 53 / 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis pembangunan Kota Lubuk Linggau selama lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

RPJMD ini memuat arah pembangunan daerah secara menyeluruh, yang mencakup kebijakan, strategi, prioritas pembangunan, program perangkat daerah, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan. Penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan perencanaan pembangunan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Lubuk Linggau, serta menjadi instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan RPJMD ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Kota Lubuk Linggau yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Lubuk Linggau, 2025

Wali Kota Lubuk Linggau

H. Rachmat Hidayat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-63
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-76
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-115
2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	II-115
2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	II-116
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis	II-125
2.4.1. Permasalahan	II-125
2.5. Isu Strategis	II-135
2.5.1. Isu Strategis Global	II-139
2.5.2. Isu Strategis Nasional	II-140
2.5.3. Isu Strategis Regional	II-142
2.5.4. Isu Strategis Daerah	II-142
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	III-1
3.1.1. Visi Dan Misi RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.....	III-1
3.1.2. Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Lubuk Linggau Thn 2025-2029.....	III-4
3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-8
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	III-8
3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Lubuk Linggau.....	III-16
3.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah	III-20
3.2.4. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.....	III-22
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	IV-48
4.2.1. Indikator Kinerja Utama.....	IV-48
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah.....	IV-50

BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pedoman Transisi	V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau	I-3
Gambar 1.2. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	I-7
Gambar 1.3. Tahapan Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045	I-8
Gambar 1.4. Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.....	I-9
Gambar 1.5. Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	I-9
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau	II-2
Gambar 2.2. Peta Daya Dukung Air di Kota Lubuk Linggau	II-11
Gambar 2.3. Komisi Listrik per kapita Kota Lubuk Linggau	II-12
Gambar 2.4 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-13
Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Pangan 2020-2024	II-15
Gambar 2.6. Perkembangan Pravelensi Ketidakcukupan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-16
Gambar 2.7. Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Persen) Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2.8. Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-22
Gambar 2.9. Piramida Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-26
Gambar 2.10. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-27
Gambar 2.11. Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-28
Gambar 2.12. Usia Harapan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-45
Gambar 2.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024 .	II-30
Gambar 2.14. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-37
Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-38
Gambar 2.16. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHK) Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-40
Gambar 2.17. Perkembangan TPT Kota Lubuk Linggau Tahun Tahun 2023-2024	II-42
Gambar 2.18. TPT Kota Lubuk Linggau Menurut Pendidikan Tahun 2024	II-43
Gambar 2.19. Perkembangan Gini Rasio Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023	II-44
Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-46
Gambar 2.21. Usia Harapan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2.22. Perkembangan angka Kesakitan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-49
Gambar 2.23. Pravalensi Balita <i>Stunting</i> di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024 ...	II-66

Gambar 2.24	Perkembangan Capaian Tuberkulosis Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-50
Gambar 2.25.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023	II-52
Gambar 2.26.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2.27.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-54
Gambar 2.28.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2.29.	Indeks Perlindungan Anak Kota Lubuk Linggau 2021-2024	II-57
Gambar 2.30	Perkembangan Capaian iBangga Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-58
Gambar 2.31.	Indeks Ketimpangan Gender Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-59
Gambar 2.32.	Indeks Pembangunan Gender Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-61
Gambar 2.33.	Angka Ketergantungan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.34.	TPAK Menurut Jenis Kelamin Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024 .	II-66
Gambar 2.35.	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan yang Telah di Tamatkan Kota Lubuk Linggau 2021-2024	II-67
Gambar 2.36	Skor Indeks Inovasi Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-68
Gambar 2.37.	Perkembangan Persentase Luas Tutupan Lahan Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023	II-70
Gambar 2.38. .	Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-76
Gambar 2.39.	Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.40.	Perkembangan Inflasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-81
Gambar 2.41.	Perkembangan SPI Kota Lubuk Linggau 2021-2024	II-82
Gambar 2.42	Nilai Indeks SPBE Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-83
Gambar 2.43.	Indeks Ketimpangan Gender Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-59
Gambar 3.1. .	Penahapan Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	III-11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuk Linggau per Kecamatan	II-2
Tabel 2.2. Standar Kebutuhan menurut Jumlah Penduduk (Yeates)	II-5
Tabel 2.3. Daya Dukung Demografis/Lahan di Kecamatan Kota Lubuk Linggau	II-6
Tabel 2.4. Daya Dukung Lahan tiap Kecamatan di Kota Lubuk Linggau	II-7
Tabel 2.5. Indikator Nilai Daya Dukung Daya Tampung Demografis	II-8
Tabel 2.6. Kondisi Daya Tampung Demografis Tiap Kecamatan Di Kota Lubuk Linggau	II-8
Tabel 2.7. Daya Dukung Permukiman tiap Kecamatan di Kota Lubuk Linggau.....	II-9
Tabel 2.8. Indikator Daya Dukung Permukiman.....	II-9
Tabel 2.9. Kondisi Daya Dukung Permukiman tiap Kecamatan Di Kota Lubuk Linggau	II-10
Tabel 2.10. Status Air Berdasarkan Analisis Spasial di Kecamatan Kota Lubuk Linggau	II-11
Tabel 2.11 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-17
Tabel 2.12. Perkembangan Kinerja Persampahan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-19
Tabel 2.13. Indeks Risiko Bencana Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-21
Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2.15. PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024.....	II-24
Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-22
Tabel 2.16 PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024.....	II-25
Tabel 2.17. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2.18 PDRB Per Kapita Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2.19. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, 2020-2024	II-41
Tabel 2.20. Pengangguran Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.21. Angka Melek Huruf Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2024.....	II-53
Tabel 2.22. IPLM dan Komponen Pembentuknya Kota Lubuk Linggau, 2020-2024....	II-55
Tabel 2.23. Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Pembentuknya Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023	II-60
Tabel 2.24. Indeks Pembangunan Gender dan Komponen Pembentuknya Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.25. Perkembangan IPP dan Komponen Pembentuknya di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023	II-62
Tabel 2.26. Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan,	

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Lainnya di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.27. Perkembangan IMDI Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.28. Perkembangan NET Ekspor Antar Daerah di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-72
Tabel 2.29. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.30. . PDRB Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.31. Indeks Layanan Infrastruktur Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-77
Tabel 2.32. Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.33. Hasil Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel 2.34. Perkembangan Nilai Peduli HAM Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2023	II-86
Tabel 2.35. Kondisi Keamanan dan Keterlibatan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.36. Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2.37. Indikator Kinerja Kunci Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel 2.38. Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2020-2024.....	II-116
Tabel 2.39. Realisasi APBD Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-117
Tabel 2.40 Neraca Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023	II-121
Tabel 2.41. Analisa Rasio Keuangan Daerah Kota Lubuk Linggau	II-124
Tabel 2.42. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030.....	II-137
Tabel 2.43 Teknik Menyimpulkan Isi Strategi Daerah.....	II-152
Tabel 3.1. Keselarasan Misi pada RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 dengan Misi pada RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045	III-2
Tabel 3.2. Keterkaitan antar Visi dan Misi RPJMD Kota Lubuk Linggau, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJM Nasional.....	III-3
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD	III-11
Tabel 3.5. Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Dengan Kota Lubuk Linggau	III-14
Tabel 3.6. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	III-21
Tabel 3.7. Kegiatan Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2029	III-23
Tabel 3.8. Program Prioritas RPJMD Kota Lubuk Linggau, 2025-2029.....	III-29

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama	IV-48
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah.....	IV-51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Dengan terpilihnya Wali Kota Lubuk Linggau dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau masa bakti periode 2025-2029 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah menetapkan RPJPD Kota Lubuk Linggau 2025-2045 di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2024. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan visi daerah, yaitu: **“Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang**

Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, merupakan Tahap I (kesatu) RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045 Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses

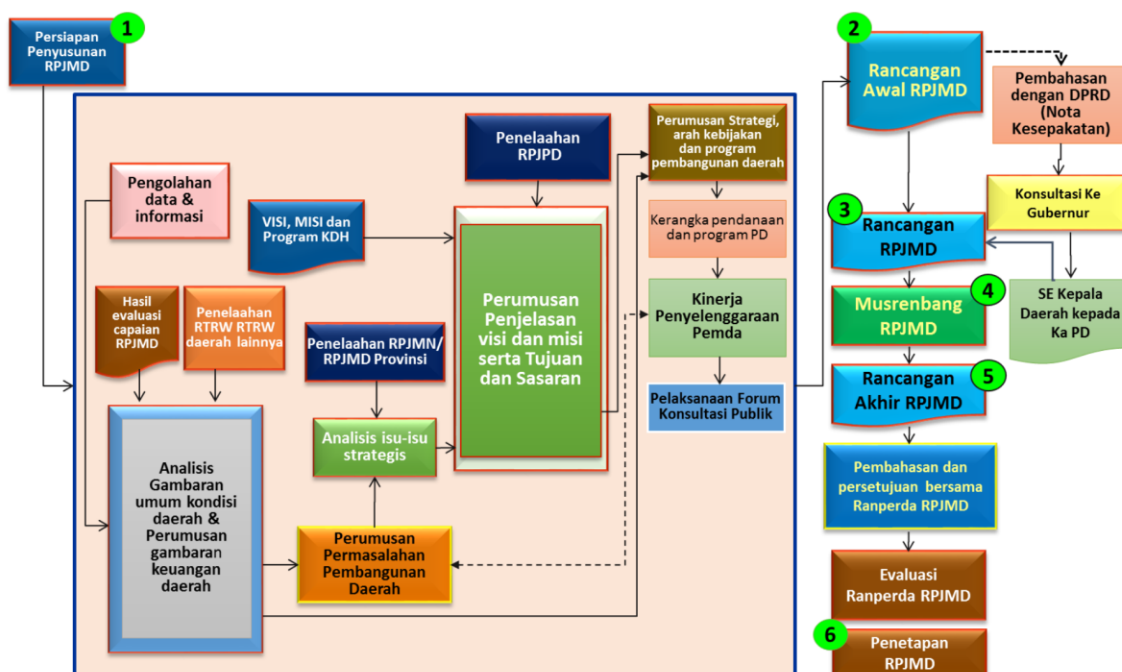
tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Lubuk Linggau, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau ini adalah pemahaman awal posisi Kota Lubuk Linggau yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1.

Proses Penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappedalitbang;
5. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;
7. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421)
2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
3. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Lubuk Linggau.

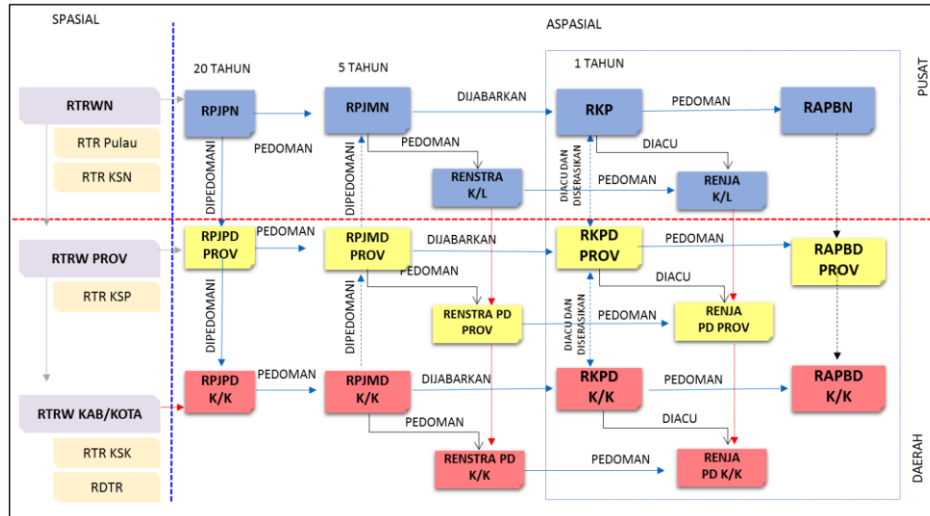
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJMD memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD memperhatikan juga RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kota Lubuk Linggau akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja PD.

Gambar 1.2.

Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) **RPJMD dan RPJM Nasional**

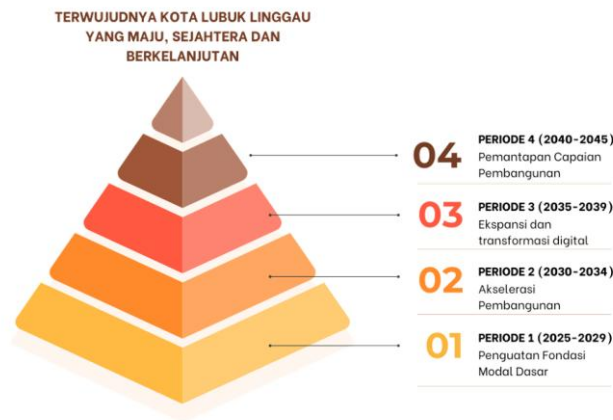
Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun maka Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah diselaraskan dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional, dan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

(2) RPJMD dan RPJPD Kota Lubuk Linggau

RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045.

Gambar 1.3.

Tahapan Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045



Sumber : RPJPD Kota Lubuk Linggau 2025-2029

(3) RPJMD dan RTRW Kota Lubuk Linggau

Sesuai dengan amanat pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: a) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Lubuk Linggau sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Lubuk Linggau, berpedoman pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah bahwa Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Lubuk Linggau.

Gambar 1.4.

Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



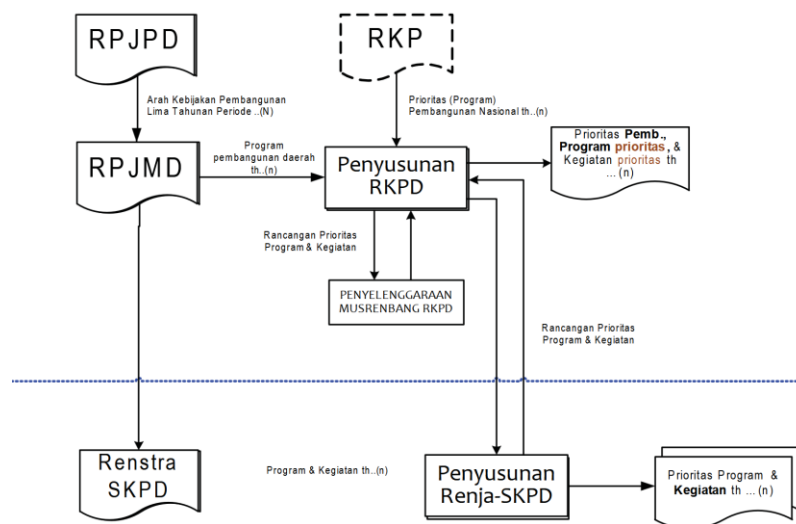
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

(5) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Lubuk Linggau setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang memuat prioritas program dan kegiatan dari RKPD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Lubuk Linggau yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.

Gambar 1.5.

Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Lubuk Linggau sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam Menyusun Renstra perangkat daerah periode 2025-2029;
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029;
- e. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau periode 2025-2029.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Sub bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Lubuk Linggau secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

Sub bab Gambaran Keuangan Daerah menjelaskan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proteksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

Sub bab Permasalahan dan Isu Strategis memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran. Serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Lubuk Linggau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program-program prioritas daerah Kota Lubuk Linggau dalam jangka menengah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub bab ini menjelaskan mengenai program perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Sub bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

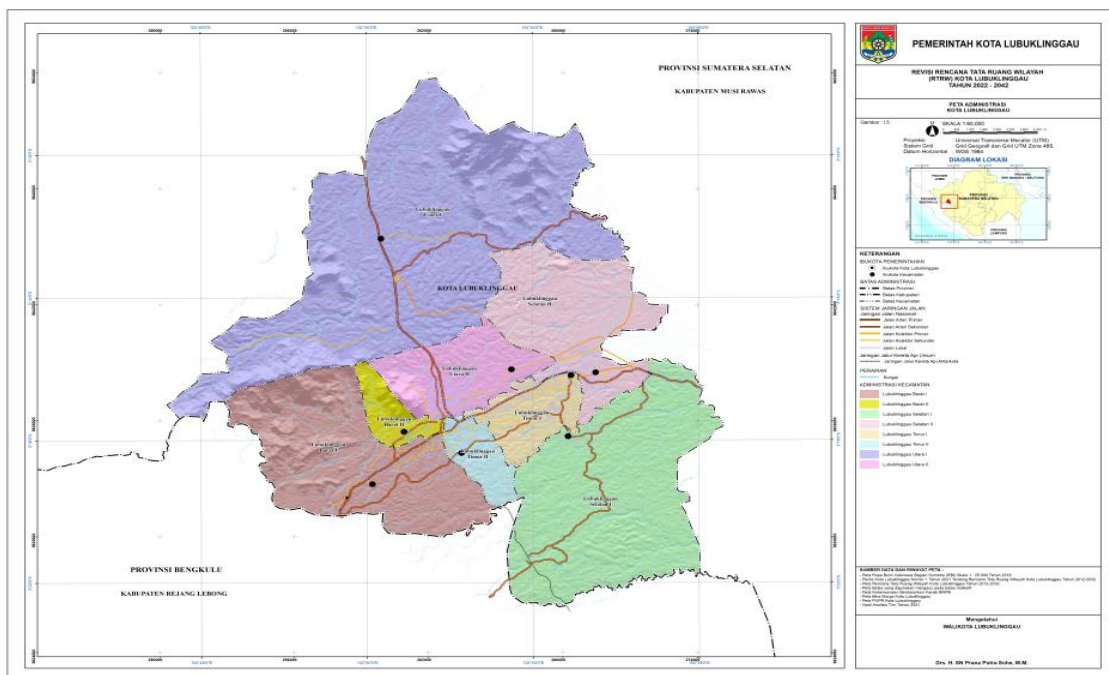
2.1.1.1. Peran Strategis Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas wilayah Kota Lubuk Linggau adalah 367,73 KM². Secara geografis Kota Lubuk Linggau berada di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan geografis terletak antara 102° 40'00"–103° 0'0" Bujur Timur (BT) dan 3° 4'10" – 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS) dan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- ❑ **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- ❑ **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
- ❑ **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dan Provinsi Bengkulu
- ❑ **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau



Sumber : RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

Wilayah Kota Lubuk Linggau terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 72 (tujuh puluh dua) Kelurahan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuk Linggau per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lubuk Linggau Timur I	Air Kuti	8	1.367,40	3,72%
2	Lubuk Linggau Timur II	Mesat Seni	9	1.031,07	2,80%
3	Lubuk Linggau Selatan I	Perumnas Rahmah	7	7.518,23	20,44%
4	Lubuk Linggau Selatan II	Marga Rahayu	9	3.250,03	8,84%
5	Lubuk Linggau Barat I	Kayu Ara	11	5.983,44	16,27%
6	Lubuk Linggau Barat II	Sido Rejo	8	760,70	2,07%
7	Lubuk Linggau Utara I	Petanang Ilir	10	13.774,78	37,46%
8	Lubuk Linggau Utara II	Batu Urip Permai	10	3.087,36	8,40%
Kota Lubuk Linggau			72	36.793,94	100,00%

Sumber : RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Struktur Ruang RTRW Kota Lubuk Linggau memuat pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan menjadi pemicu pengembangan wilayah dalam Kota Lubuk Linggau. Sektor perdagangan dan jasa yang menjadi kegiatan utama pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Lubuk Linggau dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, sektor ini terus berkembang dan menjadi potensi untuk terus dikembangkan sebagai sektor terbesar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuk Linggau. Kawasan Perdagangan dan Jasa difokuskan pada Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pasar Pemiri dengan didukung oleh 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK). Simpul pertumbuhan ini diproyeksikan sebagai pemicu pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagai titik sentral pendukung pengembangan kawasan.

Kota Lubuk Linggau telah memiliki Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2042. Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Lubuk Linggau yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa berskala regional. Adapun Rencana struktur ruang wilayah tersebut meliputi:

- a) **Sistem pusat pelayanan kota**, meliputi:
 - I) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - II) Pusat pelayanan kota (PPK);
 - III) Sub-pusat pelayanan kota (Sub-PPK); dan
 - IV) Pusat lingkungan (PL).

- b) **Sistem jaringan prasarana kota**, meliputi:
- I) Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
 - II) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Beberapa Potensi Kota Lubuk Linggau yang patut untuk dikembangkan antara lain:

1. **Wisata**

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Keragaman alam dan budaya yang dimiliki tersebut merupakan modal dasar dalam pengembangan daya tarik wisata. Namun beberapa kendala yang dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung. Untuk pengembangan sektor pariwisata saat ini sudah ada obyek wisata yaitu:

A. Wisata Alam

- a) Air Terjun Taqli;
- b) Air Terjun Temam II;
- c) Bukit Sulap;
- d) Goa Batu Kel. Taba Jemekeh;
- e) Goa Batu Naga Kelurahan Jukung;
- f) Air Terjun Curug Layang Kel. Lubuk Kupang; dan
- g) Air Terjun Sei Sando Kel. Ulak Surung.

B. Wisata Budaya

- a) Museum Sub Kos Garuda
- b) Benteng Kuto Ulak Lebar;
- c) Rumah Adat di Kel. Batu urip dan Kel. Jukung

C. Wisata Buatan

- a) DAM Air Watervang
- b) Danau Malus Kel. Petanang
- c) DAM KESIE

2. **Pertanian, Perikanan dan Peternakan**

Pertanian di Kota Lubuk Linggau secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, ternak, ikan, dan hutan). Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 24 persen dari

jumlah penduduk bekerja, meskipun presentase penyerapannya cenderung menurun.

Namun hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.

Kota Lubuk Linggau memiliki potensi pembangunan ekonomi peternakan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya air tawar. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis perikanan serta produksi sumber daya perikanan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan.

3. Investasi

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan UMKM dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan. Lebih dari 90 persen, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuk Linggau bergerak pada sektor sekunder, yang rentan terhadap pengaruh ekonomi global.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis

Pertumbuhan penduduk merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari, dengan bertambahnya waktu maka kepadatan penduduk di suatu wilayah akan terus meningkat. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Semakin tinggi jumlah penduduk dan semakin tinggi kepadatan penduduk, maka daya dukung dan daya

tampung suatu wilayah akan semakin menurun. Berdasarkan standar kebutuhan menurut jumlah penduduk, maka nilai daya tampung akan menurun sering dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 10.000 jiwa per hektar, maka nilai daya dampungnya sebesar 0,1. Nilai daya tampung akan terus berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah kepadatan penduduk per hektar.

Tabel 2.2.

Standar Kebutuhan menurut Jumlah Penduduk (Yeates)

Penduduk (Jiwa)	Nilai Daya Tampung (ha/ jiwa)
10.000	0,100
25.000	0,091
50.000	0,086
100.000	0,076
250.000	0,070
500.0000	0,066
1.000.000	0,061
2.000.000	0,057

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

Potensi daya dukung demografis dan lahan pada masing-masing wilayah kecamatan di Kota Lubuk Linggau disajikan pada Tabel 2.3. Kecamatan yang memiliki luas wilayah yang terluas adalah Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, yaitu seluas 15.230 ha, tetapi dihuni hanya sebanyak 18.356 jiwa penduduknya, sehingga nilai daya dukung demografisnya paling tinggi, yaitu 0,8297. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II merupakan kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau yang memiliki nilai daya dukung demografis yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena kecamatan ini memiliki luas wilayah yang kecil, yaitu 1.012 ha, tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi, yaitu 33.259 jiwa, sehingga nilai daya dukungnya hanya 0,0304.

Wilayah kecamatan yang memiliki nilai daya dukung demografis yang tinggi tersebut, merupakan wilayah kecamatan yang masih berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah pemukiman, karena daya dukung demografisnya masih sangat memungkinkan. Wilayah kecamatan yang memiliki nilai daya dukung demografis yang rendah, menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah penduduknya sudah relatif padat, sehingga membutuhkan penanganan mengenai penambahan penduduk agar daya dukungnya tidak semakin turun. Apabila semakin kecil daya dukung demografis suatu wilayah, akan menyebabkan daya dukung wilayah yang bersangkutan untuk menunjang kehidupan penduduk di wilayah tersebut akan semakin kecil.

Tabel 2.3.**Daya Dukung Demografis/Lahan di Kecamatan****Kota Lubuk Linggau**

No	Kecamatan	Luas wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Daya Dukung Lahan (ha/jiwa)
1	Lubuk Linggau Barat I	5.481	39.886	0,1374
2	Lubuk Linggau Barat II	1.084	21.006	0,5160
3	Lubuk Linggau Selatan I	8.515	16.364	0,5203
4	Lubuk Linggau Selatan II	3.726	34.555	0,1078
5	Lubuk Linggau Timur I	1.390	34.842	0,0398
6	Lubuk Linggau Timur II	1.012	33.259	0,0304
7	Lubuk Linggau Utara I	15.230	18.356	0,8297
8	Lubuk Linggau Utara II	3.711	41.970	0,0884

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

Semakin sempitnya ketersediaan lahan di suatu wilayah, dan seiring dengan perkembangan populasi penduduk akan menyebabkan kemampuan daya dukung lahan suatu wilayah akan semakin menurun. Berkurangnya daya dukung penduduk disuatu wilayah mengakibatkan standar kebutuhan lahan untuk masing-masing jiwa tiap penduduk cenderung akan semakin kecil. Berdasarkan Tabel 2.3, diketahui bahwa semakin tinggi daya dukung lahan mengakibatkan standar kebutuhan lahan per jiwa penduduk akan semakin tinggi. Kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau yang memiliki daya dukung lahan yang tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, yaitu sebesar 0,8287 ha/jiwa menyebabkan kecamatan ini memiliki standar kebutuhan lahan per jiwanya adalah sebesar 0,091 ha/jiwa, dengan daya tampung jiwanya sebesar 152.300 jiwa yang menyebabkan kecamatan ini masih mengalami defisit penduduk sebesar 133.944 jiwa.

Wilayah kecamatan di Kota Lubuk Linggau yang memiliki daya dukung lahan yang terendah adalah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, yaitu sebesar 0,086 ha/jiwa. Menyebabkan kecamatan ini memiliki standar kebutuhan lahan per jiwanya sebesar 0,086 ha/jiwa, dengan daya tampung sebesar 10.120 jiwa, sehingga menyebabkan wilayah kecamatan ini mengalami surplus penduduk sebesar 23.139 ribu jiwa. Beberapa wilayah kecamatan di Kota Lubuklinggau yang mengalami defisit jumlah penduduk adalah Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I, Lubuk Linggau Selatan II, dan Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, yang masing-masing defisit jumlah penduduknya berturut- turut sebesar 14.924 ribu jiwa, 68.786 ribu jiwa, 2.705 ribu jiwa, dan 133.944 ribu jiwa. Sedangkan kecamatan yang telah mengalami surplus penduduk adalah

Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Lubuk Linggau Timur I, Lubuk Linggau Timur II, dan Lubuk Linggau Utara II, yang masing-masing secara berturut-turut jumlahnya adalah 10.166 ribu jiwa, 20.942 ribu jiwa, 23.139 ribu jiwa, dan 4.860 ribu jiwa.

Tabel 2.4.

Daya Dukung Lahan tiap Kecamatan di Kota Lubuk Linggau

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan (ha/jiwa)	Standar Kebutuhan lahan/jiwa (ha/jiwa)	Daya Tampung (jiwa)	Defisit/Surplus (jiwa)
1	Lubuk Linggau Barat I	0,1374	0,086	54.810	14.924
2	Lubuk Linggau Barat II	0,5160	0,091	10.840	-10.166
3	Lubuk Linggau Selatan I	0,5203	0,091	85.150	68.786
4	Lubuk Linggau Selatan II	0,1078	0,086	37.260	2.705
5	Lubuk Linggau Timur I	0,0398	0,086	13.900	-20.942
6	Lubuk Linggau Timur II	0,0304	0,086	10.120	-23.139
7	Lubuk Linggau Utara I	0,8297	0,091	152.300	133.944
8	Lubuk Linggau Utara II	0,0884	0,086	37.110	-4.860

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

Nilai defisit atau surplus penduduk dimasing-masing kecamatan bila dibandingkan dengan nilai range nilai daya dukung daya tampung demografis dapat dikategorikan mulai dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Berdasarkan hasil komparasi antara defisit dan surplus penduduk dengan indikator nilai daya dukung daya tampung demografis, maka Kecamatan Lubuk Linggau Utara I memiliki kategori sangat tinggi dalam hal daya tampung demografis, yaitu defisit sebesar 133.944 ribu jiwa. Kecamatan yang memiliki daya tampung demografis yang sangat rendah di wilayah Kota Lubuk Linggau adalah Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, dan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II. Sedangkan Kecamatan Lubuk Linggau Barat I memiliki kategori Rendah, dan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I memiliki daya tampung demografis yang cukup.

Tabel 2.5.**Indikator Nilai Daya Dukung Daya Tampung Demografis**

Indikator	Nilai Range
Sangat Rendah	-23.139 - 8.277
Rendah	9.277 - 40.693
Cukup	41.693 - 3.109
Tinggi	74.109 - 110.525
Sangat Tinggi	111.525 - 142.941

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

Luas masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau relatif bervariasi. Pada masing-masing wilayah kecamatan juga terdapat kawasan hutan lindung serta kawasan yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Adanya wilayah kecamatan yang memiliki kawasan lindung dan rawan bencana, mengakibatkan luas kawasan layak pemukiman menjadi berkurang. Beberapa kecamatan yang memiliki kawasan hutan lindung adalah Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, dan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, yang masing-masing secara berturut-turut luas wilayah hutan lindungnya adalah sebesar 23.360.000 m², 4.260.000 m², 35.650.000 m², dan 970.000 m².

Wilayah di Kota Lubuk Linggau yang memiliki wilayah yang rawan terjadi bencana adalah semua wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Lubuk Linggau Timur I. Berdasarkan luas wilayah kecamatan dan keberadaan hutan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, maka kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau yang memiliki luas wilayah yang layak untuk kawasan pemukiman yang terluas adalah Kecamatan Lubuk Linggau Utara I. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki luas kawasan yang layak untuk pemukiman yang paling kecil adalah Lubuk Linggau Barat I.

Tabel 2.6.**Kondisi Daya Tampung Demografis Tiap Kecamatan Di Kota Lubuk Linggau**

No	Kecamatan	Defisit/ Surplus (Jiwa)	Indikator
1	Lubuk Linggau Barat I	14.924	Rendah
2	Lubuk Linggau Barat II	-10.166	Sangat Rendah
3	Lubuk Linggau Selatan I	68.786	Cukup
4	Lubuk Linggau Selatan II	2.705	Sangat Rendah
5	Lubuk Linggau Timur I	-20.942	Sangat Rendah
6	Lubuk Linggau Timur II	-23.139	Sangat Rendah
7	Lubuk Linggau Utara I	133.944	Sangat Tinggi
8	Lubuk Linggau Utara II	-4.860	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

Berdasarkan kajian tata ruang luas wilayah layak permukiman di masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel berikut. Apabila luas tersebut dibagi dengan jumlah penduduk yang ada dan hasilnya dikalikan dengan nilai koefisien luas kebutuhan lahan, maka akan diketahui kemampuan daya dukung permukiman untuk masing-masing wilayah.

Tabel 2.7.

Daya Dukung Permukiman tiap Kecamatan di Kota Lubuk Linggau

No	Kecamatan	Luas Layak Permukiman (m ²)	Koef/kebutuhan (m ² /kapita)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Daya Dukung Permukiman (kapita/jiwa)	Keterangan
1	Lubuk Linggau Barat I	24.390.000	26	39.886	23.52	Mendukung
2	Lubuk Linggau Barat II	4.640.000	26	21.006	8.49	Mendukung
3	Lubuk Linggau Selatan I	85.000.000	26	16.364	199.78	Mendukung
4	Lubuk Linggau Selatan II	37.030.000	26	34.555	41.22	Mendukung
5	Lubuk Linggau Timur I	13.900.000	26	34.842	15.34	Mendukung
6	Lubuk Linggau Timur II	10.110.000	26	33.259	11.69	Mendukung
7	Lubuk Linggau Utara I	98.750.00	26	18.356	206.91	Mendukung
8	Lubuk Linggau Utara II	34.910.000	26	41.970	31.99	Mendukung

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Lubuk Linggau Utara I memiliki daya dukung permukiman tertinggi, yaitu sebesar 206,91 kapita/jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki daya dukung permukiman yang terendah adalah Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, yaitu sebesar 8,49 kapita/jiwa. Berdasarkan nilai daya dukung permukiman yang ada di tiap-tiap kecamatan yang ada di wilayah Kota Lubuk Linggau, maka dapat disimpulkan bahwa semua wilayah kecamatan yang ada mampu mendukung untuk permukiman penduduk.

Tabel 2.8.

Indikator Daya Dukung Permukiman

Indikator	Nilai Range
Sangat Rendah	8.49 - 48.174
Rendah	49.174 - 88.858
Cukup	89.859 - 129.543
Tinggi	130.543 - 170.227
Sangat Tinggi	171.227 - 210.911

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

Berdasarkan indikator daya dukung permukiman, kemampuan daya dukung permukiman di wilayah Kota Lubuk Linggau dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) indikator, yaitu sangat rendah dan sangat tinggi. Wilayah kecamatan dengan indikator sangat tinggi adalah Kecamatan Lubuk

Linggau Selatan I, dan Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya menunjukkan indikator daya dukung permukiman yang sangat rendah.

Tabel 2.9.
Kondisi Daya Dukung Permukiman tiap Kecamatan
Di Kota Lubuk Linggau

No	Kecamatan	Daya Dukung Permukiman (kapita/jiwa)	Indikator Daya Dukung Permukiman
1	Lubuk Linggau Barat I	23.52	Sangat Rendah
2	Lubuk Linggau Barat II	8.49	Sangat Rendah
3	Lubuk Linggau Selatan I	199.78	Sangat Tinggi
4	Lubuk Linggau Selatan II	41.22	Sangat Rendah
5	Lubuk Linggau Timur I	15.34	Sangat Rendah
6	Lubuk Linggau Timur II	11.69	Sangat Rendah
7	Lubuk Linggau Utara I	206.91	Sangat Tinggi
8	Lubuk Linggau Utara II	31.99	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Status air diperhitungkan berdasarkan aspek ketersediaan air dan kebutuhan air. Status air dinilai surplus ketika ketersediaan air mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Kondisi status air defisit menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Status air dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas lahan, ketersediaan dan kebutuhan air suatu wilayah.

Berdasarkan data jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau, maka dapat diketahui jumlah keseluruhan kebutuhan air pada wilayah yang bersangkutan. Seperti yang disajikan pada di bawah ini, dapat diketahui bahwa status air di masing-masing kecamatan di Kota Lubuk Linggau belum terlampaui, yang artinya ketersediaan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan kebutuhan air untuk penggunaan lahan termasuk sawah.

Tabel 2.10.

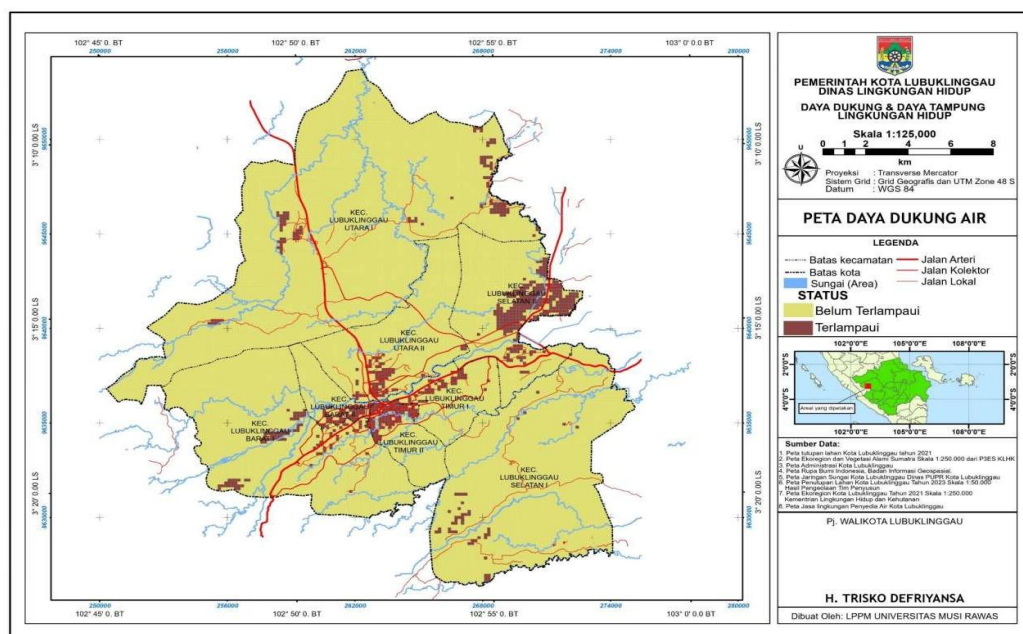
Status Air Berdasarkan Analisis Spasial di Kecamatan Kota Lubuk Linggau

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih	Status
1	Lubuk Linggau Barat I	39.886	5.481	72145961.07	26665200.49	45480761	Belum Terlampaui
2	Lubuk Linggau Barat II	21.006	1.084	9945317.437	2971541.071	6973776.4	Belum Terlampaui
3	Lubuk Linggau Selatan I	16.364	8.515	95644810.26	53187430.9	42457379	Belum Terlampaui
4	Lubuk Linggau Selatan II	34.555	3.726	39772761.21	29642986.13	10129775	Belum Terlampaui
5	Lubuk Linggau Timur I	34.842	1.390	15707118.64	9739095.795	5968022.8	Belum Terlampaui
6	Lubuk Linggau Timur II	33.259	1.012	11910856.19	9537187.994	2373668.2	Belum Terlampaui
7	Lubuk Linggau Utara I	18.356	15.230	194070570.1	37734388.08	156336182	Belum Terlampaui
8	Lubuk Linggau Utara II	41.970	3.711	40922961.72	17108502.08	23814460	Belum Terlampaui

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

Gambar 2.2.

Peta Daya Dukung Air di Kota Lubuk Linggau



Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Lubuk Linggau 2025-2029, 2024

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Ketahanan Energi

Ketahanan energi berkaitan dengan sumber penerangan listrik yang sudah termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu perlu diperhitungkan kebutuhan listrik agar memiliki gambaran mengenai berapa banyak daya yang diperlukan oleh penduduk di kota Lubuk Linggau masa periode proyeksi. Dengan begitu, diharapkan dapat menjaga

stabilitas sistem listrik. Menghitung daya listrik yang dibutuhkan oleh rumah merupakan hal yang sangat penting, dengan bertujuan memastikan instalasi listrik yang aman dan sesuai dengan kebutuhan penduduk.

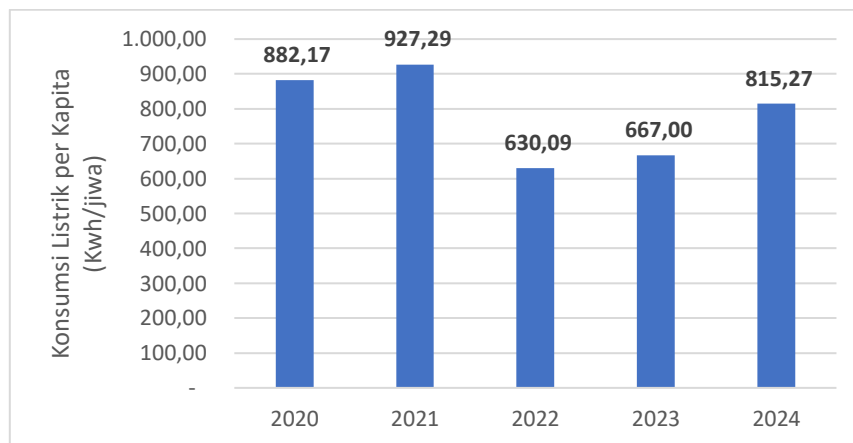
Indikator yang menggambarkan ketahanan energi di Kota Lubuk Linggau digambarkan dengan Konsumsi Listrik per Kapita. Konsumsi listrik per kapita menggambarkan rata-rata jumlah energi listrik yang digunakan oleh setiap penduduk dalam satu tahun di suatu wilayah. Satuan yang umum digunakan adalah kilowatt-hour (kWh) per kapita per tahun. Konsumsi listrik per kapita di Kota Lubuk Linggau mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah meningkat dari 882,17 kWh/jiwa pada 2020 menjadi 927,29 kWh/jiwa pada 2021, konsumsi listrik sempat menurun tajam pada 2022 menjadi 630,09 kWh/jiwa. Namun, tren kembali meningkat pada 2023 dan mencapai 815,27 kWh/jiwa pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan energi masyarakat setelah perlambatan pada masa pandemi.

Secara umum, tren konsumsi listrik per kapita di Kota Lubuk Linggau selama lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung mengarah pada pemulihan setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permintaan energi listrik terus tumbuh seiring peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut perkembangan konsumsi listrik per kapita Kota Lubuk Linggau tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.3.

Konsumsi Listrik per Kapita Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025 (diolah)

B. Ketahanan Air

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, air dikonsumsi untuk minum, mandi, cuci, masak dan sebagainya. Untuk kawasan perkotaan air minum dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM. Salah satu persyaratan penting dalam penyediaan air

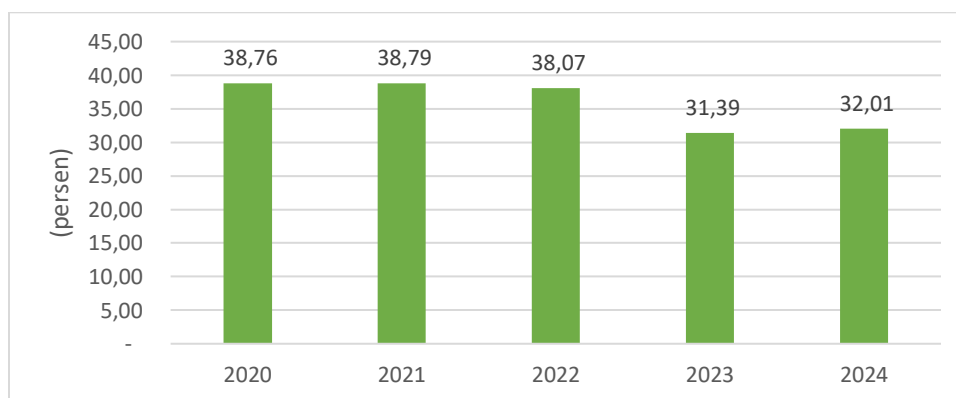
adalah kualitas air yang diproduksi harus memenuhi standar kualitas air yang berlaku. Laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksi akan semakin tinggi di Kota Lubuk Linggau tentu akan meningkatkan kebutuhan air bersih. Dengan demikian diperlukan kualitas dan kuantitas air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk kota Lubuk Linggau.

Indikator yang menggambarkan ketahanan air di Kota Lubuk Linggau adalah Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan yang merupakan salah satu indikator yang termuat dalam Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Lubuk Linggau. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan layak di Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi.

Pada tahun 2020, capaian akses tercatat sebesar 38,76 persen dan relatif stabil pada 2021 di angka 38,79 persen. Namun pada 2022, persentase akses mengalami sedikit penurunan menjadi 38,07 persen. Kondisi ini kemudian memburuk pada 2023 dengan penurunan signifikan hingga mencapai 31,39 persen, yang merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit perbaikan dengan meningkatnya akses menjadi 32,01 persen, meski nilainya masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian awal pada 2020–2021.

Lebih lanjut perkembangan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai dengan 2024 ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.4.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan
Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, 2025

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan akses air minum layak di Kota Lubuk Linggau belum stabil dan masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Penurunan drastis pada 2023 dapat mengindikasikan adanya kendala pada aspek infrastruktur penyediaan air minum, kualitas layanan, maupun faktor lingkungan yang berdampak pada keterbatasan akses. Peningkatan kecil di tahun 2024 menunjukkan adanya upaya

perbaikan, namun belum cukup untuk mengembalikan capaian pada level sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam memperluas akses rumah tangga terhadap air minum layak, di antaranya melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, peningkatan kualitas layanan distribusi, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air. Upaya berkelanjutan ini penting untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas air minum layak sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

C. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Capaian IKP Kota Lubuk Linggau pada periode 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2020, nilai IKP berada pada angka 53,37 dan meningkat sedikit pada 2021 menjadi 53,91. Namun, pada 2022 terjadi penurunan tipis ke angka 53,71, sehingga pada periode 2020–2022 kondisi ketahanan pangan masih relatif stagnan di level menengah.

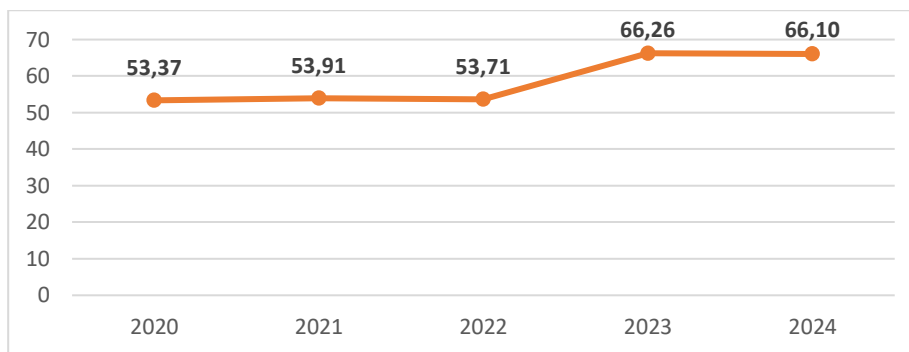
Perubahan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023 ketika nilai IKP melonjak cukup tinggi menjadi 66,26, atau naik lebih dari 12 poin dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan yang berarti dalam pemenuhan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, hingga kualitas konsumsi masyarakat. Meski pada tahun 2024 IKP sedikit menurun menjadi 66,10, capaian ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tiga tahun awal periode pengamatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan Kota Lubuk Linggau mengalami perbaikan struktural yang cukup kuat.

Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, antara lain penguatan program pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan lokal, perbaikan distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan, serta penguatan UMKM dan sektor pertanian yang mampu menambah nilai dan ketersediaan bahan pangan. Selain itu, program perlindungan sosial dan intervensi gizi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Lebih lanjut, perkembangan IKP Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.5.

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

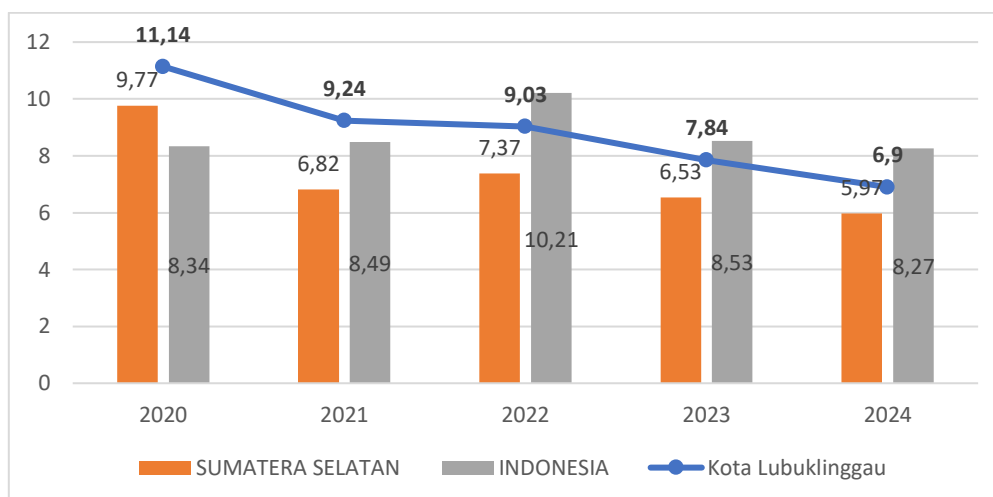
Secara keseluruhan, perkembangan IKP Kota Lubuk Linggau pada 2020–2024 mencerminkan adanya transisi dari kondisi stagnan menuju perbaikan signifikan pada ketahanan pangan. Capaian tahun 2023 dan 2024 menjadi pijakan penting untuk memperkuat kebijakan pangan yang lebih berkelanjutan, dengan fokus pada stabilisasi pasokan, peningkatan kualitas gizi, serta penguatan sistem distribusi yang mampu menjaga ketahanan pangan secara konsisten di masa mendatang.

D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Dalam lima tahun terakhir, Kota Lubuk Linggau menunjukkan capaian yang signifikan dalam menurunkan prevalensi ketidakcukupan pangan. Pada tahun 2020, angka ketidakcukupan pangan di kota ini tercatat sebesar 11,14 persen, angka yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional pada tahun yang sama. Namun, sejak saat itu, prevalensi tersebut mengalami penurunan secara konsisten setiap tahun, menjadi 9,24 persen pada 2021, 9,03 persen pada 2022, 7,84 persen pada 2023, hingga mencapai 6,90 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar 4,24 poin persentase dalam lima tahun ini mencerminkan adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Capaian ini juga menunjukkan bahwa Kota Lubuk Linggau berhasil mempersempit kesenjangan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Bahkan pada tahun 2024, angka ketidakcukupan pangan di Lubuk Linggau lebih rendah dibandingkan angka nasional (8,27 persen) dan hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (5,97 persen). Kemajuan ini kemungkinan didorong oleh kombinasi kebijakan yang tepat, seperti peningkatan akses terhadap pangan bergizi, penguatan program perlindungan sosial, serta pengembangan produksi pangan lokal. Secara keseluruhan, Kota Lubuk Linggau telah berada pada jalur yang tepat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Gambar 2.6.

**Pekembangan Prevalensi Ketidacukupan Pangan
Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dibanding 16 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Lubuk Linggau ada di urutan ke-9. Fenomena ini juga menjadi indikasi pentingnya pemerintah meningkatkan aspek jaring perlindungan/pengaman sosial seperti bantuan sosial untuk pangan dan lain-lain pada masa-masa krisis untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah yang rawan/rentan terdampak.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berbagai persoalan yang dihadapi Kota Lubuk Linggau di masa datang yang menyangkut lingkungan hidup adalah penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, dan persoalan limbah. Pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan, kualitas lingkungan hidup harus tetap terjaga dan harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indikator komposit dari 3 komponen utama yaitu Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

Selama periode 2020 hingga 2024, kualitas lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan gabungan dari indeks kualitas air, udara, dan lahan, mencerminkan kondisi ini. Pada tahun 2020, IKLH berada pada angka 80,4, namun mengalami penurunan tajam ke angka 60,43 pada 2021. Meski begitu, tren perbaikan mulai tampak pada tahun-tahun berikutnya, dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 71,83 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan lingkungan yang mulai membuahkan

hasil. Lebih lanjut, perkembangan IKLH Kota Lubuk Linggau beserta komponennya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	68,75	55	55	68,82	68,82
Indeks Kualitas Udara	85,71	85,57	85,57	86,64	91,20
Indeks Kualitas Lahan	88,56	23,26	89,04	26,57	41,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,4	60,43	64,86	66,79	71,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan kualitas udara selama lima tahun terakhir tergolong stabil dan berada dalam kategori baik. Indeks Kualitas Udara hanya mengalami sedikit perubahan, dari 85,71 pada tahun 2020 menjadi 85,57 pada 2021 dan 2022. Selanjutnya, indeks ini meningkat menjadi 86,64 pada 2023 dan mencapai 91,20 pada 2024. Kestabilan dan kenaikan ini menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran udara berjalan relatif efektif, sehingga kualitas udara tetap terjaga.

Sementara itu, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan pada 2021, dari 68,75 menjadi 55, dan stagnan pada tahun berikutnya. Namun, sejak 2023 terjadi perbaikan yang cukup signifikan, dengan indeks kembali naik ke 68,82 dan bertahan pada angka tersebut hingga 2024. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya air, walaupun tantangan sebelumnya sempat menghambat kualitasnya.

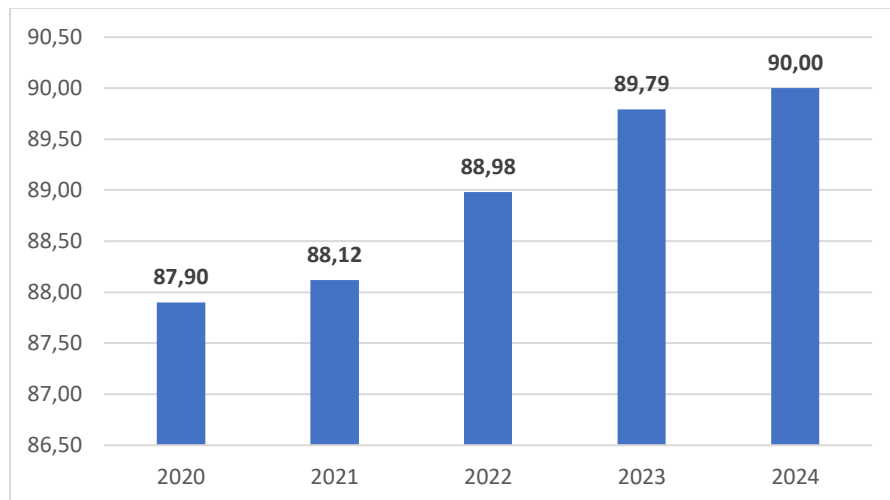
Yang paling fluktuatif selama lima tahun terakhir adalah Indeks Kualitas Lahan. Indeks ini awalnya sangat tinggi pada 2020 dengan angka 88,56, namun kemudian anjlok drastis ke 23,26 pada 2021. Meski sempat membaik menjadi 89,04 pada 2022, penurunan kembali terjadi pada 2023 (26,57) dan hanya sedikit meningkat ke 41,15 pada 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam menjaga kualitas lahan, seperti konversi lahan, erosi, atau aktivitas pertanian dan industri yang tidak ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat fluktuasi, terutama pada kualitas lahan, tren perbaikan IKLH menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya menjaga lingkungan. Konsistensi dalam pengawasan, kebijakan yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman digambarkan dengan indikator Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman).

Gambar 2.7. Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Persen) Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, 2025

Gambar diatas menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak di Kota Lubuk Linggau mengalami tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian akses sanitasi layak berada di angka 87,90%, kemudian meningkat menjadi 88,12% pada tahun 2021, 88,98% pada tahun 2022, 89,79% pada tahun 2023, dan mencapai 90,00% pada tahun 2024.

Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sarana sanitasi bagi masyarakat. Meski peningkatannya relatif bertahap, tren positif tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah daerah dalam mendukung sanitasi layak—seperti pembangunan jamban sehat, pengelolaan air limbah domestik, dan penyediaan sarana air bersih—berjalan efektif dan berkesinambangan.

Peningkatan signifikan yang terjadi terutama sejak tahun 2022 dapat dikaitkan dengan pemulihan aktivitas pembangunan pasca-pandemi COVID-19, di mana perhatian terhadap kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) semakin meningkat. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas sanitasi turut mempercepat pencapaian target.

Secara keseluruhan, capaian 90% pada tahun 2024 menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Lubuk Linggau telah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 6, yakni memastikan ketersediaan dan pengelolaan

air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tantangan ke depan adalah menjangkau 10% rumah tangga yang belum memiliki akses, terutama di wilayah permukiman padat dan daerah pinggiran kota, agar pemerataan akses sanitasi dapat terwujud sepenuhnya.

C. Persampahan

Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Pada indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, terjadi peningkatan yang konsisten dari 70,00 persen pada tahun 2020 menjadi 87,95 persen pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan efektivitas fasilitas pengolahan sampah di Kota Lubuk Linggau, sekaligus menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil memperluas cakupan pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Pencapaian ini juga menggambarkan adanya komitmen dalam mengurangi ketergantungan pada pembuangan langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta mendukung target pengelolaan sampah berkelanjutan.

Sementara itu, pada indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, perkembangannya juga menunjukkan tren positif meskipun fluktuatif. Pada tahun 2020 cakupan layanan tercatat sebesar 70,82 persen, sedikit meningkat pada 2021 menjadi 71,29 persen, lalu naik ke 73,40 persen pada 2022. Namun, pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 72,60 persen, sebelum kembali meningkat pada 2024 hingga mencapai 75,00 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian pengumpulan sampah relatif baik, terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi layanan, khususnya terkait dengan ketersediaan armada, SDM pengangkut, maupun partisipasi masyarakat dalam memastikan sampah terkelola dengan baik dari sumbernya.

Lebih lanjut perkembangan kinerja terkait persampahan di Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.12.

**Perkembangan Kinerja Persampahan
Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	70,00	74,90	80,00	80,00	87,95
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	70,82	71,29	73,40	72,60	75,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, 2025

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kota Lubuk Linggau telah mencatat kemajuan dalam pengelolaan sampah, terutama pada aspek pengolahan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah masih perlu dioptimalkan agar seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan yang merata. Ke depan, diperlukan strategi penguatan berupa penambahan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan efisiensi sistem pengumpulan, serta edukasi dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan sampah di Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan.

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan analisis, kemungkinan terjadinya bencana di kota Lubuk Linggau adalah berasal dari banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi serta angin puting beliung. Saat ini, bencana banjir belum terjadi secara mengkhawatirkan hanya sebatas banjir sesaat atau genangan air selama beberapa jam setelah hujan deras mengguyur kondisi tersebut sering terjadi pada kawasan Pusat Kota yaitu di beberapa titik di depan Eks Rumah Sakit Dr. Sobirin. Selanjutnya, tanah longsor dikhawatirkan terjadi di sekitar Bukit Sulap terutama pada daerah permukiman yang terletak dibawah kaki bukit sulap karena masyarakat yang mengambil batu alam untuk peralatan dapur dari Bukit Sulap yaitu pada wilayah Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, dan sebagian besar Kelurahan didaerah Kecamatan Lubuk Linggau Utara II yaitu Kelurahan Kaliserayu Kelurahan Ulak Surung, Kelurahan Jogoboyo.

Bahaya kebakaran sering terjadi karena kecerobohan masyarakat, misalnya kompor, tabung gas bahkan karena lilin dan membakar sampah di halaman. Permukiman yang padat ataupun dibuat dari bahan kayu menyebabkan kawasan permukiman rawan kebakaran. Di Kota Lubuk Linggau potensi terbesar untuk bahaya kebakaran terdapat di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kelurahan Mesat Seni dan Kelurahan Mesat jaya.

Dalam hal gempa bumi, Kota Lubuk Linggau berdekatan dengan kawasan Bukit Barisan yang memiliki salah satu lempeng (vault) gempa bumi di pulau Sumatera. Kemungkinan terjadi bencana gempa bumi di kota Lubuk Linggau tetap perlu menjadi pertimbangan karena lokasinya relatif berdekatan dengan kawasan Bukit Barisan.

Bencana akibat angin puting beliung dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, hal ini diakibatkan karena pengaruh *global warming* maupun *climate change*. Oleh sebab itu, perlu juga diwaspadai akibat dari angin puting

beliung yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Korban yang mungkin terjadi dalam jumlah besar di kota Lubuk Linggau, kemungkinan terjadi akibat dari gempa bumi maupun kebakaran.

A. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lubuk Linggau dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan nilai rata-rata di atas 124. Pada tahun 2020 hingga 2022, nilai IRB tercatat konstan sebesar 124,80, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 124,44, sebelum kembali meningkat tipis pada tahun 2024 menjadi 124,55. Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), nilai tersebut menempatkan Kota Lubuk Linggau pada kelas risiko sedang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun daerah tidak berada pada kategori risiko tinggi, potensi ancaman bencana masih cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian dan upaya mitigasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Lubuk Linggau disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.13.

Indeks Risiko Bencana Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

IRB	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
Kota Lubuk Linggau	124,80	124,80	124,80	124,44	124,55	Sedang

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Stabilnya nilai IRB selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa tingkat ancaman bahaya relatif tidak banyak berubah, sementara aspek kerentanan dan kapasitas penanggulangan bencana belum mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Penurunan tipis pada tahun 2023 dapat diasosiasikan dengan adanya upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas yang dilakukan pemerintah daerah, namun kenaikan kembali pada tahun 2024 menegaskan bahwa tantangan pengurangan risiko bencana masih cukup besar. Dengan kondisi risiko sedang, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan dan program pengurangan risiko bencana, baik melalui mitigasi struktural seperti peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang berbasis risiko, maupun mitigasi non-struktural berupa edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi faktor

penting untuk memastikan terjadinya penurunan nilai IRB di masa mendatang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko bencana di Kota Lubuk Linggau dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah guna mendukung tercapainya pembangunan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

B. Indeks Ketahanan Daerah

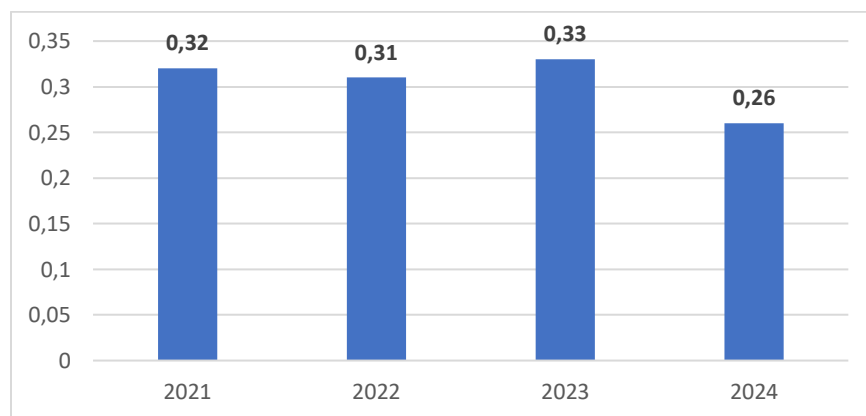
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lubuk Linggau dalam periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun di akhir periode. Pada tahun 2021 nilai IKD tercatat sebesar 0,32, kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 0,31. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada 2023 dengan capaian 0,33, namun pada tahun 2024 indeks kembali mengalami penurunan cukup signifikan hingga berada pada angka 0,26.

Lebih lanjut perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 sampai dengan 2024 ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.8.

Pekembangan Indeks Ketahanan Daerah

Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa ketahanan daerah Kota Lubuk Linggau belum konsisten dan masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas indikator. Penurunan tajam pada 2024 perlu menjadi perhatian, karena mencerminkan adanya kelemahan pada aspek-aspek yang membentuk ketahanan daerah, baik dari sisi ketahanan sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Meskipun sempat membaik pada 2023, penurunan berikutnya menunjukkan bahwa upaya penguatan ketahanan belum berjalan secara berkelanjutan.

Analisis ini menegaskan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan IKD, antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta penguatan sektor ekonomi lokal yang tangguh terhadap perubahan dan guncangan. Dengan konsistensi kebijakan dan pengelolaan yang

berkesinambungan, diharapkan IKD Kota Lubuk Linggau dapat kembali meningkat dan mencerminkan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan pembangunan di masa mendatang.

2.1.1.7. Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat dihitung sebagai persentase perubahan jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah penduduk sebelumnya. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Peningkatan jumlah penduduk tidak selalu menjadi pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, antara lain: Kelahiran (fertilitas/natalitas), Kematian (mortalitas), Migrasi (perpindahan). Kelahiran dan kematian disebut faktor alami atau faktor demografi, sedangkan migrasi disebut faktor non alami atau non demografi. Data Hasil Registrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lubuk Linggau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lubuk Linggau Barat I	2,28	1,85	2,15	2,53	2,43
Lubuk Linggau Barat II	-0,18	0,01	0,31	0,19	0,10
Lubuk Linggau Selatan I	1,37	0,94	1,24	1,90	2,81
Lubuk Linggau Selatan II	2,24	1,8	2,11	2,49	2,69
Lubuk Linggau Timur I	1,08	0,65	0,95	1,51	1,90
Lubuk Linggau Timur II	0,63	0,21	0,50	0,63	0,62
Lubuk Linggau Utara I	1,53	1,09	1,40	2,11	2,23
Lubuk Linggau Utara II	2,19	1,76	2,05	2,44	3,13
Lubuk Linggau	1,47	1,14	1,44	1,82	2,09

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk per satuan luas, seperti per kilometer persegi. Kepadatan penduduk memiliki beberapa kegunaan, di antaranya : mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah, sebagai acuan untuk mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk dan menunjukkan adanya perbedaan sumber daya yang

dimiliki suatu wilayah. Tingkat kepadatan penduduk di Kota Lubuk Linggau tahun 2024 adalah sebesar 673 jiwa per km², dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.15.

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Lubuk Linggau

Tahun 2020-2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ² (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lubuk Linggau Barat I	699,51	712,42	727,71	729,70	709
Lubuk Linggau Barat II	1931,55	1931,83	1937,82	1936,35	2735
Lubuk Linggau Selatan I	188,04	189,82	192,18	198,94	229
Lubuk Linggau Selatan II	892,16	908,27	927,40	925,82	881
Lubuk Linggau Timur I	2466,91	2483,02	2506,62	2511,87	2554
Lubuk Linggau Timur II	3263,14	3269,96	3286,46	3242,69	3749
Lubuk Linggau Utara I	117,58	118,86	120,53	122,01	136
Lubuk Linggau Utara I	1089,03	1108,19	1130,96	1163,03	1930
Lubuk Linggau	583,86	589,86	598,35	602,49	673

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Selama lima tahun terakhir, tingkat kepadatan penduduk di berbagai kecamatan di Kota Lubuk Linggau mengalami perubahan yang bervariasi. Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan kepadatan, meskipun beberapa wilayah menunjukkan dinamika yang cukup mencolok. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi secara konsisten adalah Lubuk Linggau Timur II. Pada tahun 2020, kepadatan di wilayah ini tercatat sebesar 3.263 jiwa/km², dan terus meningkat hingga mencapai 3.749 jiwa/km² pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa kawasan ini kemungkinan menjadi pusat pertumbuhan penduduk atau aktivitas ekonomi yang intensif. Tren serupa juga terlihat di Lubuk Linggau Timur I, yang naik dari 2.466 jiwa/km² pada 2020 menjadi 2.554 jiwa/km² pada 2024.

Perubahan paling mencolok terjadi di Lubuk Linggau Barat II, di mana kepadatan melonjak dari 1.936 jiwa/km² pada 2023 menjadi 2.735 jiwa/km² pada 2024. Lompatan ini cukup signifikan dan mungkin berkaitan dengan migrasi, pertumbuhan permukiman, atau pengembangan wilayah baru yang menarik penduduk. Sementara itu, kecamatan seperti Lubuk Linggau Selatan I dan Lubuk Linggau Utara I menunjukkan peningkatan kepadatan secara bertahap namun stabil. Misalnya, Lubuk Linggau Selatan I meningkat dari 188 jiwa/km² pada 2020 menjadi 229 jiwa/km² pada 2024, sementara Lubuk Linggau Utara I bertambah dari 117 menjadi 136 jiwa/km² dalam periode yang sama. Menariknya, Lubuk Linggau Selatan II justru mengalami sedikit penurunan kepadatan pada 2024, dari puncaknya 927 jiwa/km² di tahun 2022 menjadi 881 jiwa/km². Hal ini bisa menjadi indikasi adanya pergeseran

penduduk ke wilayah lain atau perubahan dalam penggunaan lahan di kecamatan tersebut.

Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk Kota Lubuk Linggau juga mengalami peningkatan, dari 583,86 jiwa/km² pada 2020 menjadi 673 jiwa/km² pada 2024. Hal ini mencerminkan pertumbuhan penduduk secara umum, yang perlu disertai dengan perencanaan tata ruang dan penyediaan layanan dasar yang baik agar tidak menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur kota.

C. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin digambarkan dalam rasio jenis kelamin penduduk. Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Dalam periode 2020 hingga 2024, rasio jenis kelamin di Kota Lubuk Linggau relatif stabil, dengan angka kota secara keseluruhan meningkat sedikit dari 101,65 menjadi 101,8, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki masih sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Beberapa kecamatan seperti Lubuk Linggau Utara I dan Selatan I konsisten memiliki rasio tinggi, masing-masing mencapai 103,2 dan 103,4 pada tahun 2024. Sementara itu, Lubuk Linggau Timur I menjadi satu-satunya kecamatan dengan rasio di bawah 100, menandakan dominasi perempuan yang tipis.

Secara umum, keseimbangan rasio ini mencerminkan stabilitas demografis yang baik dan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap gender. Lebih lanjut perkembangan rasio jenis kelamin penduduk per kecamatan di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.16.

Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Kota Lubuk Linggau

Tahun 2020-2024

Kecamatan dan Kota	Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lubuk Linggau Barat I	100,13	100,05	99,99	100,94	101,4
Lubuk Linggau Barat II	101,44	101,41	101,38	101,27	101,6
Lubuk Linggau Selatan I	103,74	103,56	103,8	102,95	103,4
Lubuk Linggau Selatan II	102,77	102,60	102,42	102,57	102,0

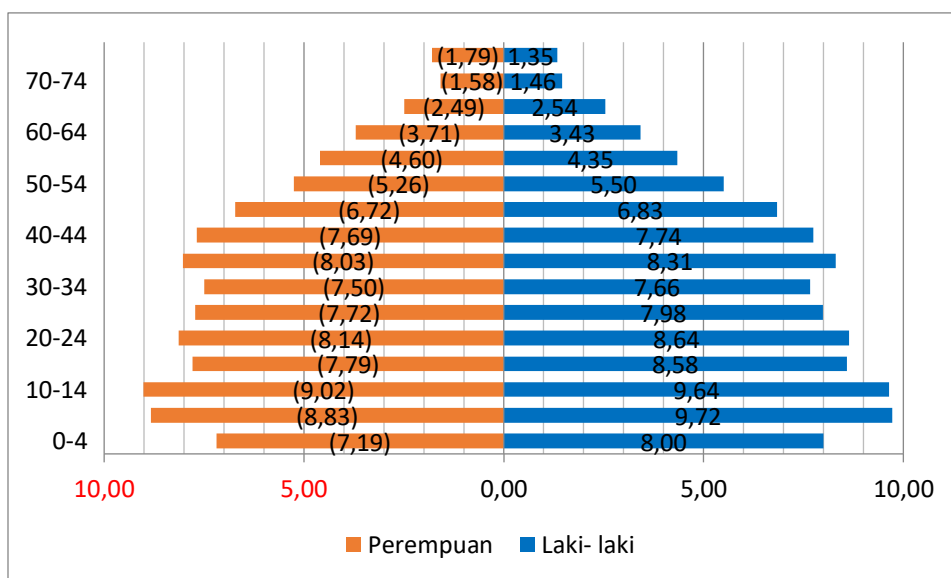
Kecamatan dan Kota	Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lubuk Linggau Timur I	99,51	99,54	99,55	99,61	99,7
Lubuk Linggau Timur II	101,08	100,85	100,62	101,31	101,7
Lubuk Linggau Utara I	105,14	104,95	104,73	102,90	103,2
Lubuk Linggau Utara II	102,27	102,10	101,96	102,09	102,5
Kota Lubuk Linggau	101,65	101,50	101,41	101,55	101,8

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

Dilihat dari kelompok usia, komposisi penduduk di Kota Lubuk Linggau pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.9.

Piramida Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau (diolah), 2025

Gambar diatas mengilustrasikan komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin di Kota Lubuk Linggau Tahun 2024. Komposisi penduduk Kota Lubuk Linggau pada tahun 2024 membentuk piramida ekspansif yang merupakan ciri negara berkembang dimana penduduk di Kota Lubuk Linggau berada dalam keadaan bertumbuh. Hal ini menunjukkan kondisi kependudukan Kota Lubuk Linggau cukup baik, dimana jumlah penduduk usia muda lebih besar dengan angka keahiran tinggi dan angka kematian bayi yang rendah. Dengan komposisi usia penduduk seperti yang ditunjukkan pada Gambar diatas, maka diperlukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk sebagai upaya pemerataan sumber daya dan pembangunan.

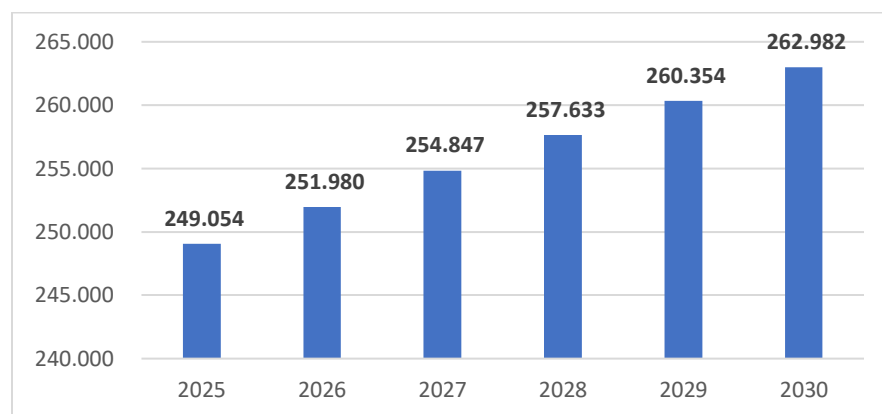
D. Proyeksi Penduduk

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, Kota Lubuk Linggau diperkirakan memiliki populasi sebesar 249.054 jiwa pada tahun 2025 dan akan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 262.982 jiwa pada tahun 2030.

Artinya, dalam kurun waktu enam tahun terjadi penambahan sekitar 13.928 jiwa atau rata-rata 2.321 jiwa per tahun. Pertumbuhan ini relatif stabil dengan laju sekitar 0,9–1,1 persen per tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan moderat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang harus diantisipasi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Lebih lanjut proyeksi penduduk 5 (lima) tahun ke depan ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.10.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025-2030



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Dari sisi ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk berpotensi memperluas pasar konsumen sehingga dapat mendorong sektor perdagangan, jasa, dan industri untuk tumbuh lebih pesat. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga berarti meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik, seperti perumahan, transportasi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik, pertumbuhan ini dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan fasilitas umum.

Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja di masa mendatang. Hal ini bisa menjadi peluang bonus demografi apabila didukung oleh penyediaan lapangan kerja yang memadai serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan penduduk justru dapat menimbulkan masalah pengangguran. Di sisi lain, aspek lingkungan juga perlu mendapat perhatian, sebab peningkatan populasi berpotensi memperbesar kebutuhan lahan, menambah volume sampah, dan mengurangi ruang terbuka hijau.

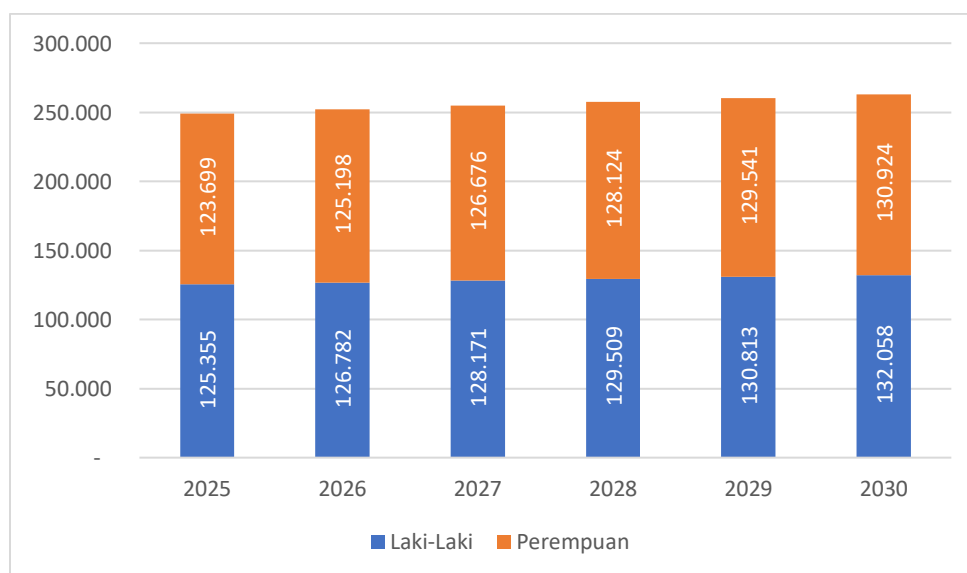
Secara keseluruhan, proyeksi penduduk Kota Lubuk Linggau yang terus meningkat hingga tahun 2030 dapat menjadi modal pembangunan apabila dikelola secara tepat. Dengan kebijakan yang terarah, pertumbuhan ini dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa perencanaan dan pengendalian yang baik, pertumbuhan penduduk justru berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam pembangunan daerah.

Jika dilihat dari jenis kelamin, proyeksi penduduk Kota Lubuk Linggau tahun 2025–2030 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan sebanyak 125.355 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 123.699 jiwa. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2030 jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 132.058 jiwa dan perempuan sebanyak 130.924 jiwa. Dengan demikian, selama periode enam tahun tersebut terdapat tambahan sekitar 6.703 jiwa laki-laki dan 7.225 jiwa perempuan.

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, meskipun selisihnya relatif kecil yaitu rata-rata sekitar 1.600–1.800 jiwa per tahun. Hal ini menunjukkan struktur penduduk Kota Lubuk Linggau relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga distribusi peran dan potensi sumber daya manusia dari kedua jenis kelamin dapat berjalan selaras.

Lebih jelas, proporsi jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.11.
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2030



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Pertumbuhan jumlah penduduk ini memiliki implikasi penting bagi pembangunan daerah. Peningkatan populasi laki-laki berpotensi menambah jumlah angkatan kerja, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja fisik seperti industri dan konstruksi. Sementara itu, peningkatan jumlah perempuan juga perlu diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja yang setara, akses pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi agar potensi perempuan dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan.

Secara keseluruhan, proyeksi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa Kota Lubuk Linggau akan mengalami pertumbuhan penduduk yang merata antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang berbasis kesetaraan gender serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting agar pertumbuhan penduduk ini mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Dari tahun 2020 hingga 2024, perekonomian Kota Lubuk Linggau menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan tren pemulihan yang cukup baik pasca-pandemi. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan kecil sebesar -0,13 persen, meskipun lebih baik dibandingkan dengan Provinsi yang tercatat -0,11 persen dan nasional yang mengalami kontraksi lebih dalam pada angka -2,07 persen. Penurunan ini mencerminkan dampak awal pandemi yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di seluruh wilayah.

Namun, pada 2021, ekonomi mulai pulih secara signifikan dengan Kota Lubuk Linggau tumbuh 3,15 persen. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi yang mencapai 3,58 persen dan nasional yang tumbuh 3,69 persen, ini menunjukkan pemulihan yang cukup baik di tingkat kota. Pada 2022, Kota Lubuk Linggau mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 4,51 persen, meskipun sedikit lebih rendah dari Provinsi (5,32 persen) dan nasional (5,31 persen).

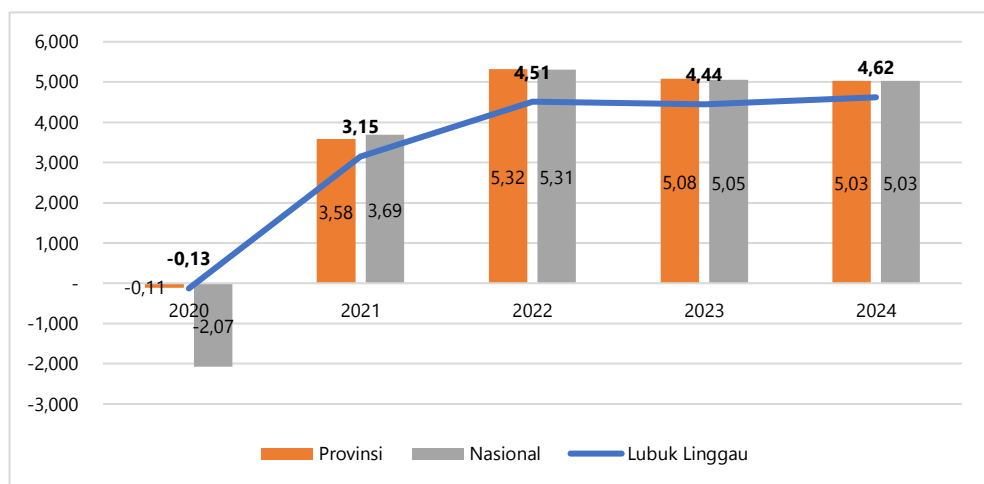
Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau tetap solid, dengan angka 4,44 persen, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi dan nasional tumbuh pada angka yang sedikit lebih tinggi, yakni 5,08 persen dan 5,05 persen. Pada 2024, perekonomian Kota Lubuk Linggau tumbuh 4,62 persen, masih lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan Provinsi dan nasional yang tetap stabil di 5,03 persen.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi dalam laju pertumbuhannya, Kota Lubuk Linggau menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan tren pertumbuhan yang terus berlanjut. Hal ini mencerminkan pemulihan yang stabil meskipun tantangan di tingkat provinsi dan nasional masih ada. Lebih jelas, Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.12.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Lebih lanjut, pertumbuhan PDRB Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.15.

**PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024**

Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	247,88	5,72	252,20	5,64	253,27	5,42	254,37	5,21	265,02	5,19
B. Pertambangan dan Penggalian	75,18	1,73	77,25	1,73	80,55	1,72	79,64	1,63	82,28	1,61
C. Industri Pengolahan	285,75	6,59	292,31	6,54	310,39	6,64	326,65	6,69	331,15	6,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,18	0,12	5,44	0,12	5,77	0,12	5,97	0,12	6,22	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,72	0,22	9,73	0,22	10,22	0,22	10,60	0,22	10,31	0,20
F. Konstruksi	986,26	22,76	1.001,59	22,41	1.020,07	21,83	1.038,23	21,28	1.077,87	21,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	735,10	16,96	775,41	17,35	836,21	17,90	893,28	18,31	958,83	18,78
H. Transportasi dan Pergudangan	270,24	6,24	275,36	6,16	299,30	6,41	322,56	6,61	332,97	6,52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	156,49	3,61	163,91	3,67	185,96	3,98	208,47	4,27	235,88	4,62
J. Informasi dan Komunikasi	87,41	2,02	91,81	2,05	98,57	2,11	104,83	2,15	107,54	2,11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	247,30	5,71	250,47	5,60	251,53	5,38	258,07	5,29	263,79	5,17
L. Real Estate	424,62	9,80	445,58	9,97	467,72	10,01	489,50	10,03	503,02	9,85
M,N. Jasa Perusahaan	51,15	1,18	51,32	1,15	53,89	1,15	56,24	1,15	60,70	1,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	132,85	3,07	138,06	3,09	138,14	2,96	138,49	2,84	145,34	2,85
P. Jasa Pendidikan	266,33	6,15	279,13	6,24	279,22	5,98	292,03	5,98	306,64	6,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104,62	2,41	109,99	2,46	113,79	2,44	113,80	2,33	117,13	2,29
R,S,T,U. Jasa Lainnya	247,60	5,71	250,67	5,61	267,29	5,72	286,72	5,88	300,37	5,88
Produk Domestik Regional Bruto	4.333,67	100,00	4.470,23	100,00	4.671,90	100,00	4.879,45	100,00	5.105,06	100,00

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Tabel 2.16.

**PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024**

Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen	(Rp. Milyar)	persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	341,84	5,09	353,82	5,03	372,27	4,84	389,52	4,73	415,54	4,77
B. Pertambangan dan Penggalian	119,64	1,78	123,28	1,75	128,71	1,67	129,07	1,57	133,41	1,53
C. Industri Pengolahan	471,43	7,02	495,08	7,04	548,46	7,13	598,61	7,27	624,06	7,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,30	0,12	8,96	0,13	9,62	0,13	9,98	0,12	10,42	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,78	0,19	13,11	0,19	13,97	0,18	14,51	0,18	14,17	0,16
F. Konstruksi	1.514,45	22,54	1.577,92	22,44	1.702,76	22,15	1.769,93	21,5	1.838,36	21,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.448,12	21,56	1.539,82	21,9	1.730,91	22,51	1.908,71	23,18	2.063,73	23,67
H. Transportasi dan Pergudangan	405,40	6,03	414,90	5,9	485,74	6,32	543,09	6,6	566,38	6,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	279,17	4,16	293,62	4,18	340,29	4,43	385,75	4,69	451,70	5,18
J. Informasi dan Komunikasi	106,07	1,58	111,49	1,59	119,72	1,56	127,65	1,55	131,85	1,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	344,19	5,12	356,02	5,06	368,72	4,8	381,56	4,63	391,65	4,49
L. Real Estate	596,15	8,87	626,01	8,9	687,11	8,94	727,21	8,83	748,08	8,58
M,N. Jasa Perusahaan	86,48	1,29	87,42	1,24	96,12	1,25	101,55	1,23	112,07	1,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	172,62	2,57	180,15	2,56	184,60	2,4	187,49	2,28	197,97	2,27
P. Jasa Pendidikan	343,62	5,11	361,56	5,14	367,45	4,78	391,15	4,75	422,03	4,84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,32	2,04	147,92	2,1	156,52	2,04	160,93	1,95	169,41	1,94
R,S,T,U. Jasa Lainnya	330,40	4,92	339,41	4,83	374,87	4,88	406,99	4,94	427,02	4,9
Produk Domestik Regional Bruto	6.717,98	100	7.030,47	100	7.687,85	100	8.233,71	100	8.717,86	100

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Berdasarkan tabel di atas, selama periode 2020-2024, struktur ekonomi Kota Lubuk Linggau masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kegiatan konstruksi. Kontribusi dari lapangan usaha ini mencapai angka di atas 20 persen dari total PDRB Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2024, kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian Kota Lubuk Linggau sebesar 23,67 persen sedangkan kategori konstruksi sebesar 21,09 persen.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus berupaya meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor-sektor unggulan, khususnya perdagangan, jasa, dan industri. Sektor perdagangan didorong melalui penguatan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar tradisional yang lebih modern dan higienis, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital melalui e-commerce juga difasilitasi agar produk lokal dapat lebih kompetitif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Pada sektor jasa, kontribusinya ditingkatkan dengan pengembangan potensi pariwisata, jasa transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan kualitas infrastruktur, promosi destinasi wisata, serta penyediaan layanan publik yang profesional menjadi prioritas agar sektor jasa dapat tumbuh lebih signifikan. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan komunitas untuk menciptakan ekosistem jasa yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing.

Sementara itu, sektor industri diarahkan pada penguatan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada potensi lokal, seperti olahan pertanian, perikanan, dan kerajinan. Upaya peningkatan nilai tambah produk dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, peningkatan akses permodalan, serta pembangunan kawasan industri terpadu. Dengan strategi tersebut, diharapkan sektor industri dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kota Lubuk Linggau.

Secara keseluruhan, peningkatan kontribusi ketiga sektor ini tidak hanya bertujuan memperkuat struktur PDRB, tetapi juga untuk membuka lapangan

kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing.

B. Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kota Lubuk Linggau tercatat sebesar 12,71 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Musi Rawas (13,50 persen) dan Provinsi Sumatera Selatan (12,66 persen), serta lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang tercatat 9,78 persen. Namun, seiring berjalannya waktu, Kota Lubuk Linggau berhasil mengurangi tingkat kemiskinannya.

Pada 2024, Kota Lubuk Linggau berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,14 persen, yang menunjukkan pencapaian signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang tercatat 9,03 persen, penurunan ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan melalui berbagai program sosial dan pembangunan ekonomi.

Beberapa faktor yang mendorong penurunan ini antara lain:

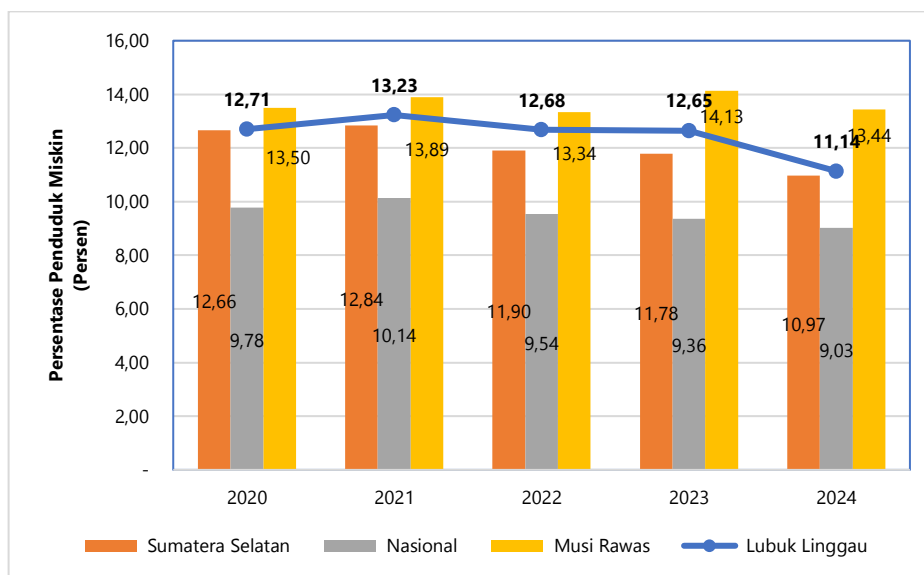
1. Peningkatan efektivitas program bantuan sosial seperti PKH dan bantuan pangan nontunai.
2. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang membuka peluang kerja dan pendapatan.
3. Program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat.
4. Pembangunan infrastruktur dasar yang meningkatkan kualitas hidup warga.
5. Pemanfaatan data kemiskinan yang lebih akurat dan terintegrasi.

Penurunan ini menjadi indikator bahwa kebijakan pembangunan daerah telah berjalan di jalur yang tepat, meskipun upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan tetap menjadi prioritas ke depan.

Secara keseluruhan, meskipun kemiskinan di Kota Lubuk Linggau masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, tren penurunan yang konsisten menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan

kemiskinan di kota ini. Ke depan, langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat lebih mempercepat pengurangan angka kemiskinan.

Gambar 2.13.
Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ditinjau dari garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan non makanan, pada tahun 2024, Kota Lubuk Linggau memiliki angka garis kemiskinan sebesar Rp. 598.850/Kapita/Bulan.

Tabel 2.17.
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan		Penduduk miskin	
	(Rp./Kapita/Bulan)	Ribu Jiwa	Ribu Jiwa	persen
2020	495.213	29,8		12,71
2021	516.763	31,61		13,23
2022	541.784	30,68		12,68
2023	583.867	31,02		12,65
2024	598.850	27,653		11,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *head count* (**P0**). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung

dan dipahami, namun tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan dan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Kota Lubuk Linggau memiliki P1 sebesar 2,2, yang berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kota ini jauh di bawah garis kemiskinan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Musi Rawas (2,05) dan Provinsi Sumatera Selatan (2,08), serta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat 1,61.

Pada tahun 2024, Kota Lubuk Linggau mencatatkan angka P1 sebesar 1,43, yang menunjukkan pencapaian signifikan dalam mengurangi kedalaman kemiskinan, meskipun masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat 1,46. Penurunan ini menggambarkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin semakin berkurang, mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan.

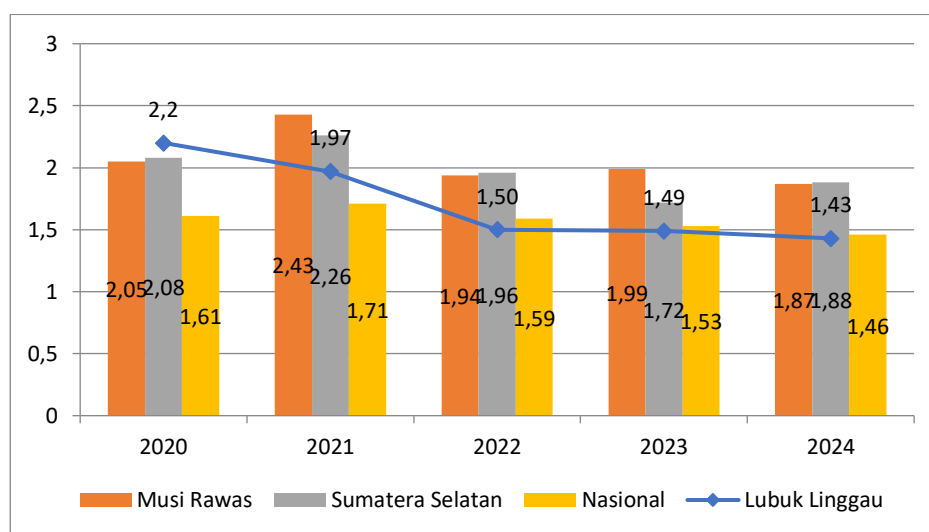
Secara keseluruhan, tren penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat miskin dan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, meskipun

tantangan masih ada untuk mencapainya pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Lubuk Linggau lebih rendah dibanding ketiga wilayah lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.14.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau

Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan adanya pengurangan ketimpangan yang lebih besar di antara penduduk miskin. Pada tahun 2020, P2 di Kota Lubuk Linggau tercatat sebesar 0,54, yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan yang cukup tinggi. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Musi Rawas (0,45) dan Provinsi Sumatera Selatan (0,48), serta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat 0,38.

Namun, selama lima tahun terakhir, Kota Lubuk Linggau berhasil menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan secara konsisten. Pada tahun 2021, P2 menurun menjadi 0,46, dan pada tahun 2022, angka ini semakin kecil menjadi 0,27, yang menandakan adanya perbaikan signifikan dalam mengurangi kesenjangan antara mereka yang paling miskin dan garis kemiskinan. Meskipun ada sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 0,22, angka ini tetap menunjukkan penurunan secara keseluruhan.

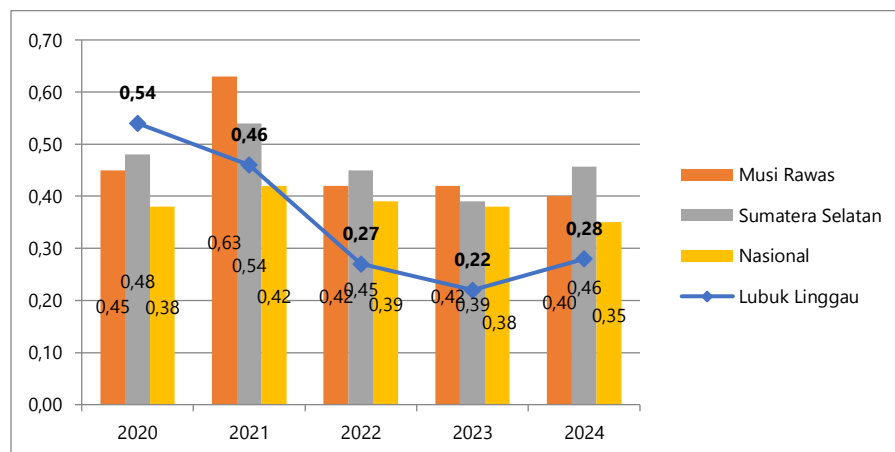
Pada tahun 2024, Kota Lubuk Linggau tercatat memiliki P2 sebesar 0,28, yang meskipun sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, masih mencerminkan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, Kota Lubuk Linggau masih mampu menjaga tingkat keparahan kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Secara keseluruhan, Kota Lubuk Linggau berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengurangi keparahan kemiskinan, meskipun tantangan tetap ada. Penurunan yang konsisten dalam Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) menunjukkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah, yang diharapkan dapat terus memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin di masa depan.

Lebih jelas, perbandingan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) Kota Lubuk Linggau dengan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan Nasional ditampilkan dalam Gambar berikut.

Gambar 2.15.

Indeks Keparahhan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. PDRB Per Kapita

PDRB per-kapita merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Sehingga jumlah penduduk di Kota Lubuk Linggau akan sangat berpengaruh pada nilai PDRB per kapita. Sementara itu, nilai PDRB di Kota Lubuk Linggau sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada.

Perekonomian Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, sebagaimana tercermin dalam PDRB Perkapita (Ribu Rp). Pada 2020, PDRB Perkapita tercatat sebesar 28.688,971 ribu

rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2021, angka ini naik menjadi 29.685,966 ribu rupiah, diikuti oleh 32.000,960 ribu rupiah pada 2022. Proyeksi untuk 2023 adalah 33.886,938 ribu rupiah, dengan estimasi 35.431,821 ribu rupiah pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan semakin baik dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, perkembangan PDRB Per Kapita Kota Lubuk Linggau disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.18.

PDRB Per Kapita Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	6.717,98	7.030,47	7.687,85	8.233,71	8.717,86
b. ADHK 2010	4.333,67	4.470,23	4.671,90	4.879,45	5.105,06
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	28.688,971	29.685,966	32.000,960	33.886,938	35.431,821
b. ADHK 2010	18.569,30	18.888,52	19.478,11	20.082,03	20.748,38
Jumlah penduduk (Ribu jiwa)	234,166	236,828	240,238	242,976	246,046

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

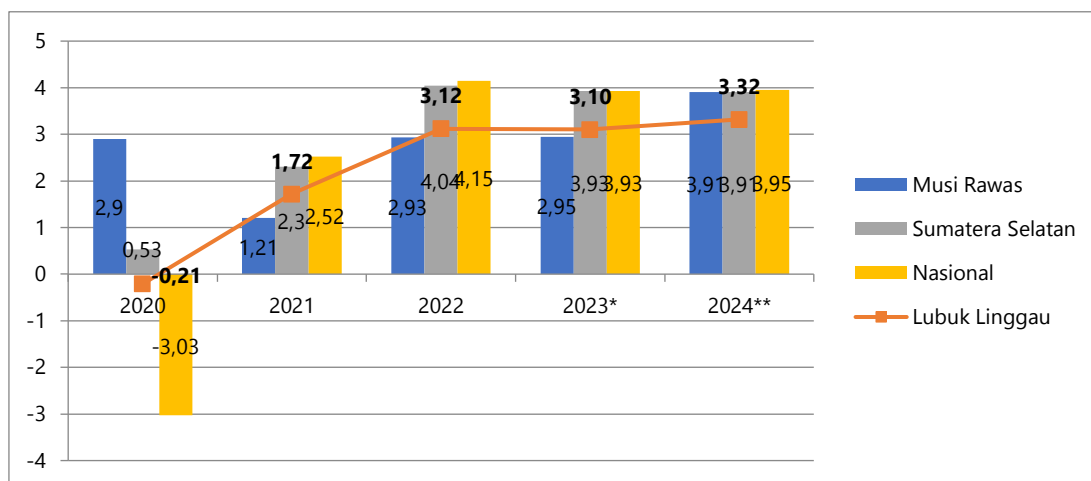
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Musi Rawas, Laju pertumbuhan PDRB per kapita Kota Lubuk Linggau menunjukkan pemulihan dan tren positif dalam lima tahun terakhir. Setelah mengalami kontraksi sebesar -0,21 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, perekonomian kota mulai bangkit dengan pertumbuhan 1,72 persen di tahun 2021. Tren ini terus membaik dengan pertumbuhan sebesar 3,12 persen pada 2022, 3,10 persen pada 2023, dan diperkirakan mencapai 3,32 persen pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, pertumbuhan Lubuk Linggau berada di bawah rata-rata nasional, yang sempat berkontraksi lebih dalam di tahun 2020 (-3,03 persen), namun kemudian mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya (mencapai 3,95 persen di 2024). Di tingkat provinsi, Sumatera Selatan juga mencatatkan pertumbuhan stabil, yaitu 0,53 persen pada 2020 hingga 3,91 persen pada 2024.

Sementara itu, Kabupaten Musi Rawas menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dari Lubuk Linggau, terutama pada tahun 2024 dengan proyeksi 3,91 persen. Meski demikian, Lubuk Linggau tetap menunjukkan konsistensi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil, menjadi indikasi pemulihan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Lebih lanjut, perkembangan laju pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK masing-masing wilayah dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.16.

**Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHK)
Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan PDRB per kapita Kota Lubuk Linggau pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -3,03 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Sejak tahun 2021, perekonomian daerah mulai pulih dengan pertumbuhan 1,72 persen, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 3,12 persen, dan relatif stabil pada 2023 sebesar 3,10 persen serta 2024 sebesar 3,32 persen. Tren pertumbuhan ini pada dasarnya mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan pemulihan sektor-sektor utama, terutama perdagangan, jasa, dan konsumsi rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan perkembangan inflasi, terlihat bahwa peningkatan PDRB per kapita tidak sepenuhnya disebabkan oleh kenaikan harga. Pada tahun 2022, memang terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi sebesar 5,83 persen sehingga meskipun PDRB per kapita meningkat, daya beli masyarakat berpotensi tertekan. Namun, pada 2023 dan 2024 inflasi kembali terkendali pada level rendah, masing-masing 2,61 persen dan 1,02 persen, sementara pertumbuhan PDRB per kapita tetap terjaga di atas 3 persen. Kondisi ini menandakan bahwa kenaikan PDRB per kapita di dua tahun terakhir lebih mencerminkan perbaikan riil kesejahteraan masyarakat karena didukung stabilitas harga dan peningkatan daya beli.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan PDRB per kapita Kota Lubuk Linggau sepanjang 2021–2024 bukan hanya akibat faktor inflasi, melainkan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Inflasi hanya memberikan tekanan sesaat pada tahun 2022, tetapi berhasil dikendalikan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi lebih nyata dirasakan masyarakat.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama periode 2020 hingga 2024, kondisi ketenagakerjaan di Kota Lubuk Linggau menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk usia kerja meningkat dari 172.300 orang pada 2020 menjadi 180.154 orang pada 2024. Angkatan kerja juga mengalami kenaikan, dari 121.049 menjadi 128.341 orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja bertambah dari 112.078 menjadi 121.546 orang.

Seiring itu, jumlah pengangguran terus menurun, dari 8.971 orang pada 2020 menjadi hanya 6.795 orang pada 2024. Hal ini juga tercermin dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,41 persen menjadi 5,29 persen dalam lima tahun. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat, dari 70,25 persen menjadi 71,24 persen, menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Data ini mengindikasikan perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan dan keberhasilan program pemulihan ekonomi di Kota Lubuk Linggau. Lebih lanjut, statistik ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.19.

Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja	Orang	172.300	175.127	177.854	177.206	180.154
2	Angkatan Kerja	Orang	121.049	128.894	120.822	125.598	128.341
	Penduduk yang bekerja	Orang	112.078	120.815	113.645	118.519	121.546
	Pengangguran	Orang	8.971	8.079	7.177	7.079	6.795
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	51.251	46.233	57.032	51.608	51.813
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	70,25	73,6	67,93	70,88	71,24
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	7,41	6,27	5,94	5,64	5,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

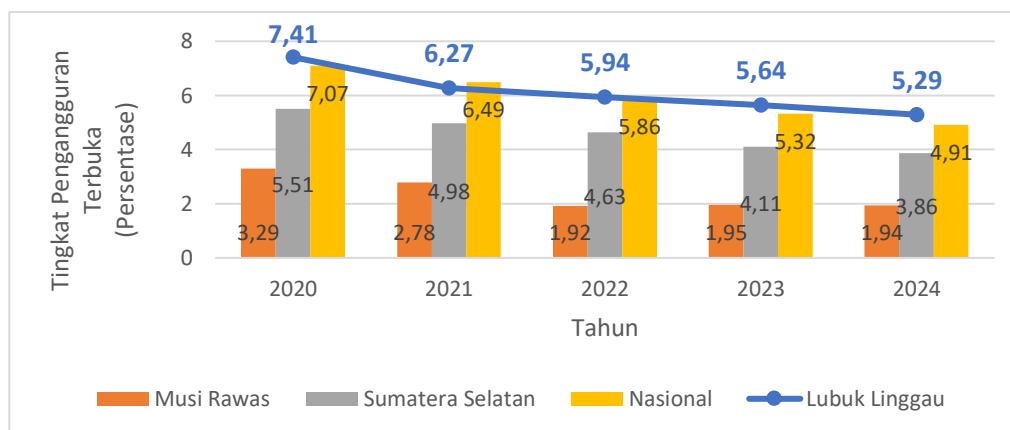
Secara persentase, selama periode 2020 hingga 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren penurunan yang stabil. Pada tahun 2020, TPT sempat melonjak hingga 7,41 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, angka tersebut terus menurun setiap tahun: menjadi 6,27 persen di 2021, 5,94 persen di 2022, 5,64 persen di 2023, dan akhirnya mencapai 5,29 persen pada tahun 2024.

Meski penurunannya cukup konsisten, TPT Lubuk Linggau masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan nasional, serta jauh di atas Kabupaten Musi Rawas. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar tenaga kerja, namun masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang lebih merata dan produktif.

Lebih lanjut, perkembangan TPT dan jumlah pengangguran Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar 2.17.

Perkembangan TPT Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.20.

Pengangguran Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Lubuk Linggau	8.971	8.079	7.177	7.079	6.795
Musi Rawas	7.088	5.968	4.091	4.038	4.440
Sumatera Selatan	238.363	219.199	208.256	188.511	179.709
Nasional*	9,8	9,1	8,4	7,86	7,46

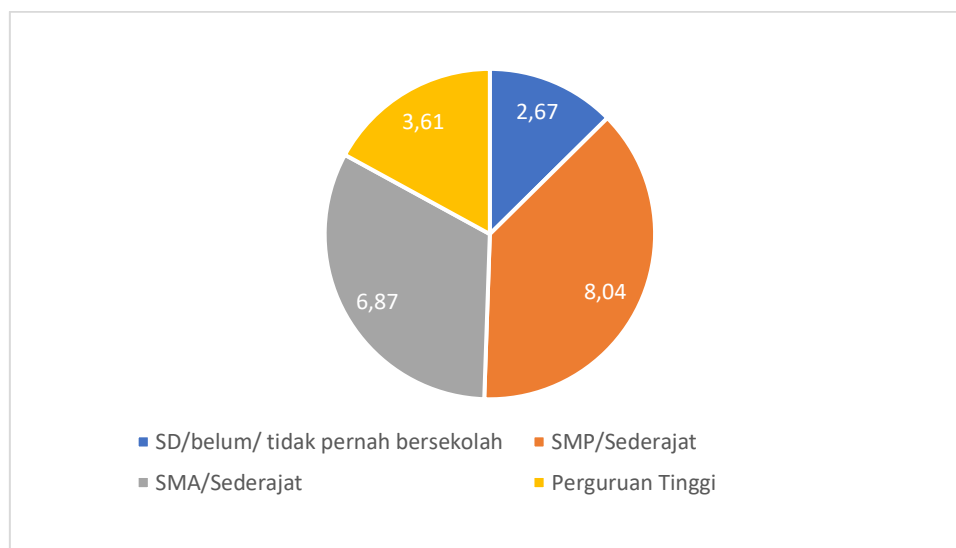
Ket: * satuan jumlah pengangguran dalam juta orang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dilihat dari Tingkat pendidikannya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lubuk Linggau bervariasi menurut tingkat pendidikan. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa TPT terendah tercatat pada kelompok SD/belum/tidak pernah bersekolah sebesar 2,67 persen, sementara TPT tertinggi ada pada kelompok SMP/ sederajat yang mencapai 8,04 persen. Selanjutnya, kelompok SMA/ sederajat juga memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi, yaitu 6,87 persen. Adapun pada kelompok lulusan Perguruan Tinggi, TPT tercatat sebesar 3,61 persen.

Gambar 2.18.

TPT Kota Lubuk Linggau Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Pola ini mengindikasikan bahwa pengangguran di Kota Lubuk Linggau cenderung lebih tinggi pada lulusan pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan keterampilan yang dimiliki pada level pendidikan tersebut, sehingga daya saing di pasar kerja menjadi relatif rendah. Sementara itu, TPT yang rendah pada kelompok berpendidikan rendah (SD atau tidak sekolah) kemungkinan besar dipengaruhi oleh kecenderungan mereka bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus, sehingga relatif lebih cepat terserap.

Di sisi lain, lulusan perguruan tinggi memiliki TPT yang lebih rendah dibandingkan SMP dan SMA, meskipun tetap ada pengangguran. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan, meskipun masih terdapat tantangan berupa ketidaksesuaian antara keterampilan yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan peningkatan keterampilan kerja, terutama bagi lulusan SMP dan SMA. Program pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri menjadi penting agar kelompok pendidikan menengah dapat lebih cepat terserap ke pasar kerja.

E. Gini Rasio

Selama periode 2020 hingga 2024, Gini Rasio Kota Lubuk Linggau mengalami fluktuasi, namun secara umum berada pada tingkat ketimpangan menengah. Pada tahun 2020, Gini Rasio tercatat sebesar 0,340, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan (0,339) namun masih di bawah rata-rata

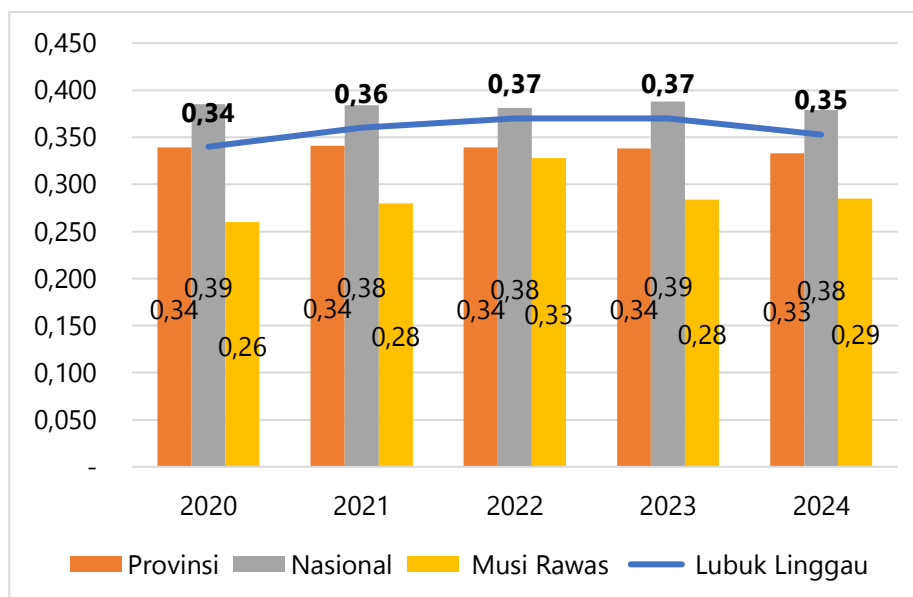
nasional (0,385). Angka ini meningkat hingga mencapai 0,370 pada 2022 dan 2023, menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, pada tahun 2024, indeks ini turun menjadi 0,353, mengindikasikan perbaikan dalam distribusi pendapatan di kota tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, Lubuk Linggau memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi setiap tahunnya, karena Musi Rawas mencatat Gini Rasio yang lebih rendah dan relatif stabil di kisaran 0,26–0,33. Penurunan Gini Ratio di Lubuk Linggau pada 2024 menjadi sinyal positif bahwa kesenjangan pendapatan mulai menurun, meskipun tetap diperlukan kebijakan berkelanjutan untuk menjaga tren ini.

Perkembangan Gini Rasio Kota Lubuk Linggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.19.

Perkembangan Gini Rasio Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan rasio gini Kota Lubuk Linggau periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2020, rasio gini berada di angka 0,340 kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,370 pada tahun 2022 dan bertahan di level yang sama pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 0,353 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan adanya faktor penghambat sekaligus faktor pendukung yang memengaruhi capaian pemerataan pembangunan di daerah.

Dari sisi penghambat, salah satu faktor utama adalah belum meratanya akses ekonomi masyarakat. Sebagian besar kelompok berpendapatan rendah masih bergantung pada sektor informal dengan pendapatan terbatas, sementara kelompok berpendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih luas di sektor

modern. Ketimpangan ini semakin diperburuk dengan perbedaan kualitas pendidikan dan keterampilan, yang membuat sebagian masyarakat sulit masuk ke pasar kerja yang lebih produktif. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, ketimpangan antar-sektor ekonomi, serta dampak pandemi COVID-19 pada periode 2020–2022 turut memperbesar kesenjangan, karena kelompok rentan lebih terdampak terhadap hilangnya pekerjaan maupun menurunnya pendapatan.

Namun, di sisi lain terdapat sejumlah faktor pendukung yang mendorong perbaikan rasio gini, khususnya penurunan pada tahun 2024. Program pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, perlindungan masyarakat miskin, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja memberikan kontribusi nyata dalam menahan laju kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi lokal pasca-pandemi juga menjadi faktor penting, terutama melalui kebangkitan sektor perdagangan, jasa, UMKM, dan ekonomi kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Pembangunan infrastruktur perkotaan serta digitalisasi layanan turut membuka peluang ekonomi baru yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tren penurunan rasio gini pada tahun 2024 memberikan sinyal positif bahwa berbagai program dan kebijakan mulai menunjukkan hasil. Meski demikian, tantangan dalam pemerataan pendapatan masih cukup besar sehingga diperlukan konsistensi kebijakan, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, serta pemerataan investasi dan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan tren penurunan rasio gini dapat terus berlanjut sekaligus memperkuat keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Kota Lubuk Linggau.

F. Indeks Pembangunan Manusia

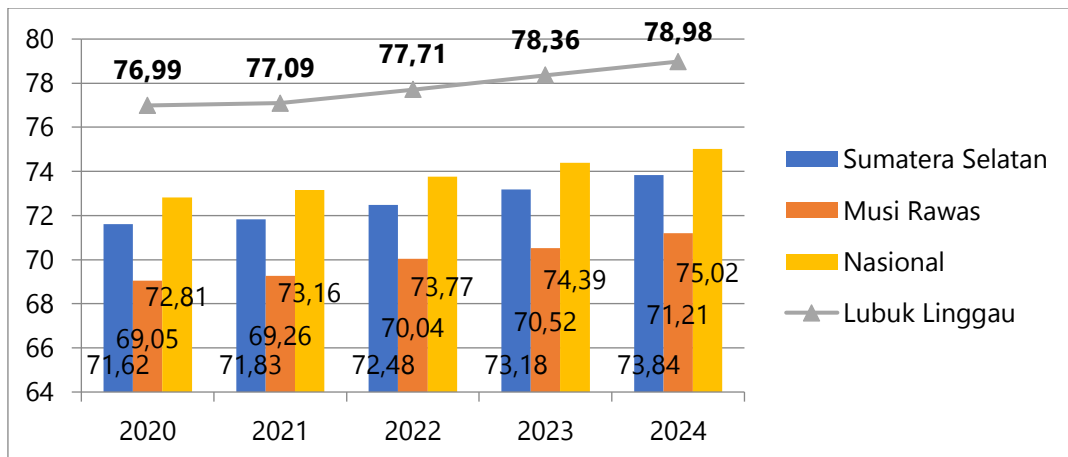
Kota Lubuk Linggau terus menunjukkan performa unggul dalam pembangunan manusia. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hasil Long Form SP2020, IPM Kota Lubuk Linggau mengalami peningkatan yang konsisten dan signifikan selama lima tahun terakhir, dari 76,99 pada tahun 2020 menjadi 78,98 pada tahun 2024.

Kenaikan ini mencerminkan kemajuan yang merata dalam tiga dimensi utama IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Selama periode tersebut, rata-rata peningkatan IPM Lubuk Linggau sekitar 0,5 poin per tahun, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan fokus pada pembangunan sumber daya manusia.

Yang patut dicatat, capaian IPM Kota Lubuk Linggau selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan maupun nasional. Pada tahun 2024, IPM Kota Lubuk Linggau berada di angka 78,98, unggul dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Selatan (73,84) dan IPM Nasional (75,02). Hal ini menempatkan Kota Lubuk Linggau sebagai salah satu kota dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Sumatera Selatan.

Lebih jelas, perbandingan IPM Kota Lubuk Linggau dengan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan Nasional ditampilkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.20.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian ini merupakan hasil dari sinergi berbagai program pembangunan di bidang pendidikan—seperti peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan dasar hingga menengah—serta sektor kesehatan yang semakin merata, dan program penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan tren yang positif ini, Kota Lubuk Linggau semakin memperkuat posisinya sebagai kota yang maju dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup

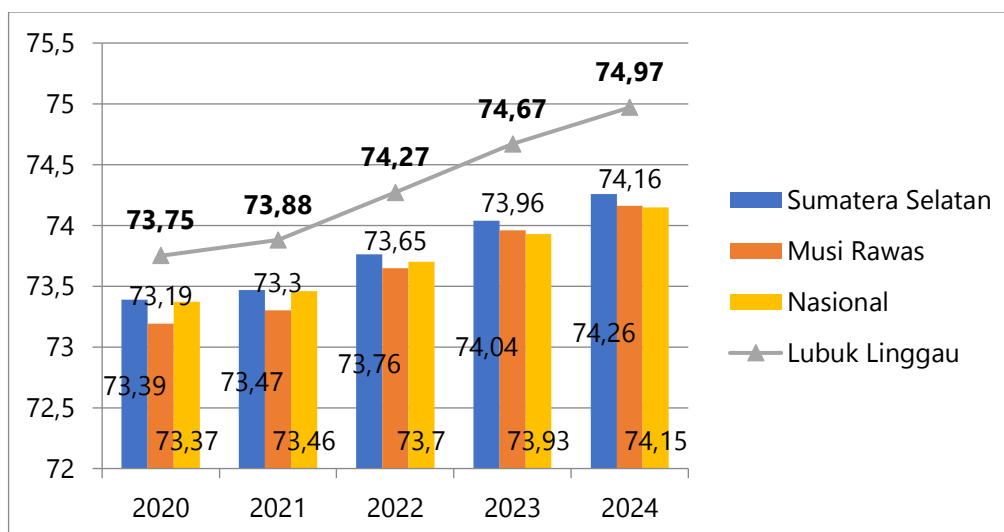
Indikator berikutnya yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan UHH di Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Dari 73,75

tahun di tahun 2020 meningkat menjadi 74,97 tahun di tahun 2024. Angka tersebut menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang lahir pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya.

Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam memperbaiki layanan kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan di Lubuk Linggau, yang sejalan dengan upaya peningkatan fasilitas medis dan program kesehatan yang lebih efektif. Meskipun demikian, Lubuk Linggau masih sedikit di bawah rata-rata nasional yang diperkirakan mencapai 75,02 tahun pada 2024. Lebih jelas, perbandingan UHH Kota Lubuk Linggau dengan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan Nasional ditampilkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.21.

Usia Harapan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kesehatan, ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian UHH diperlukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya-upaya dari berbagai faktor tersebut.

B. Angka Kesakitan

Angka Kesakitan di Kota Lubuk Linggau mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2017 hingga 2024. Pada tahun 2017, angka kesakitan tercatat sebesar 10,23, kemudian meningkat secara signifikan pada 2018 menjadi 11,45, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada 2019 dengan angka 14,06. Namun, setelah 2019, angka kesakitan mulai menurun pada 2020 menjadi 12,27, yang mungkin dipengaruhi oleh penurunan aktivitas sosial dan mobilitas selama pandemi COVID-19.

Pada 2021, angka kesakitan kembali menurun menjadi 10,37, sebelum sedikit meningkat lagi pada 2022 menjadi 10,89. Pada tahun 2023, angka kesakitan kembali naik menjadi 13,95, namun pada 2024, angka ini

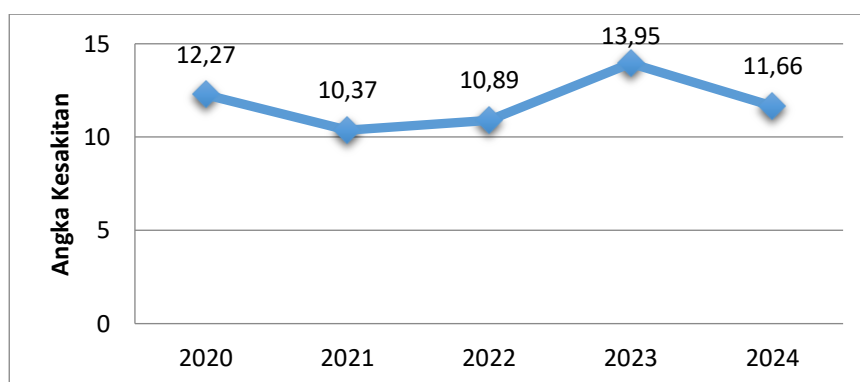
diperkirakan turun sedikit menjadi 11,66, menunjukkan adanya upaya pengendalian masalah kesehatan yang lebih baik di masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi dalam angka kesakitan selama beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan mencegah penyakit mulai menunjukkan hasil, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk menurunkan angka kesakitan lebih jauh.

Lebih jelas, perkembangan angka kesakitan Kota Lubuk Linggau ditampilkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.22.

Perkembangan Angka Kesakitan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

C. Prevalensi Stunting

Hal lain yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja urusan kesehatan dapat dilihat dari bagaimana capaian penurunan *stunting* di suatu wilayah. Kejadian balita *stunting* merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini. *Stunting* (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.

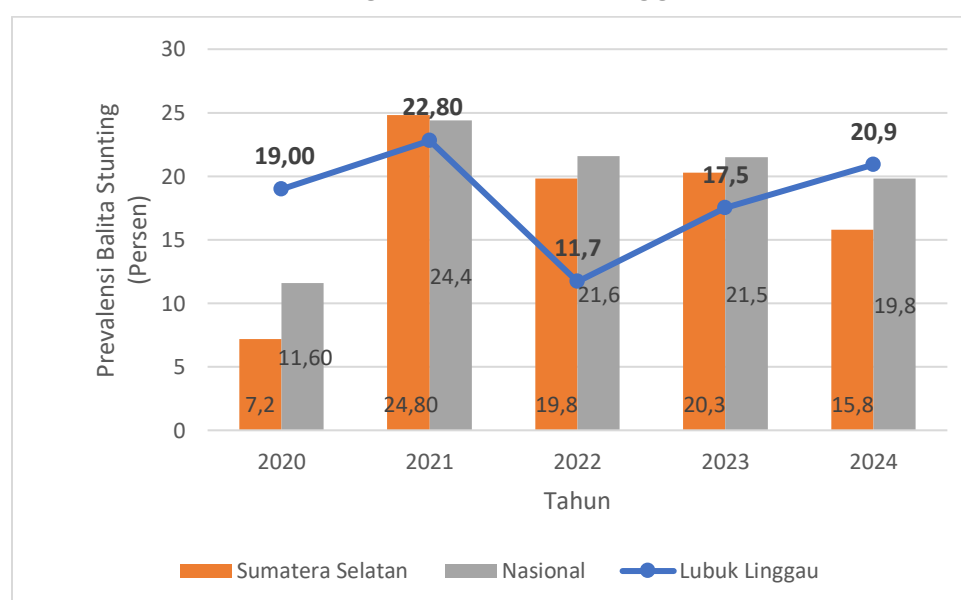
Prevalensi stunting di Kota Lubuk Linggau pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 19,0 persen dan meningkat menjadi 22,8 persen pada 2021. Capaian positif terlihat pada 2022 ketika angka stunting berhasil ditekan signifikan hingga mencapai 11,7 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Namun, capaian tersebut belum berkelanjutan karena pada 2023 prevalensi kembali naik menjadi 17,5 persen, dan pada 2024 meningkat lagi hingga 20,9 persen. Fluktuasi ini menggambarkan bahwa meskipun Lubuk Linggau mampu menurunkan stunting secara drastis, tantangan terbesar terletak pada menjaga konsistensi capaian agar sejalan dengan target nasional penurunan stunting.

Tingginya angka stunting di Lubuk Linggau dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Masih terdapat keluarga yang menghadapi keterbatasan akses dan pemahaman mengenai gizi seimbang, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Kualitas layanan kesehatan ibu dan anak yang bervariasi, ketimpangan kondisi sosial ekonomi, serta perilaku pola asuh dan sanitasi yang belum optimal juga turut berkontribusi terhadap kasus stunting. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendorong yang memungkinkan percepatan penurunan stunting. Dukungan program nasional dan daerah, keterlibatan lintas sektor, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta kemudahan akses layanan kesehatan di kota menjadi modal penting untuk memperkuat capaian.

Secara keseluruhan, capaian Kota Lubuk Linggau memperlihatkan bahwa upaya menurunkan stunting sebenarnya sangat mungkin dicapai, terbukti pada capaian tahun 2022. Namun, dinamika dua tahun terakhir menegaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi bukan hanya menurunkan angka stunting, melainkan menjaga keberlanjutan program, memperkuat intervensi gizi spesifik, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dengan konsistensi dan kolaborasi yang lebih kuat, Kota Lubuk Linggau berpeluang besar untuk mencapai target penurunan stunting secara berkelanjutan.

Lebih lanjut kondisi balita *stunting* di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.23.
Prevalensi Balita *Stunting* Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber : SSGI, 2025

Ket: 2023 data dari Survei Kesehatan Indonesia

Menurunnya prevalensi balita stunting yang sangat drastis ini menunjukkan keberhasilan penanganan masalah stunting yang komprehensif

melalui kerjasama lintas sektoral antar Perangkat Daerah di Kota Lubuk Linggau. Di samping itu kejadian balita *stunting* sangat berkaitan dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, seperti: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya perilaku hidup, bersih dan sehat, pola asuh anak yang kurang baik, dan lain-lain. Seiring dengan kondisi ekonomi yang tumbuh secara signifikan, prevalensi balita *stunting* di Kota Lubuk Linggau mampu ditekan secara maksimal.

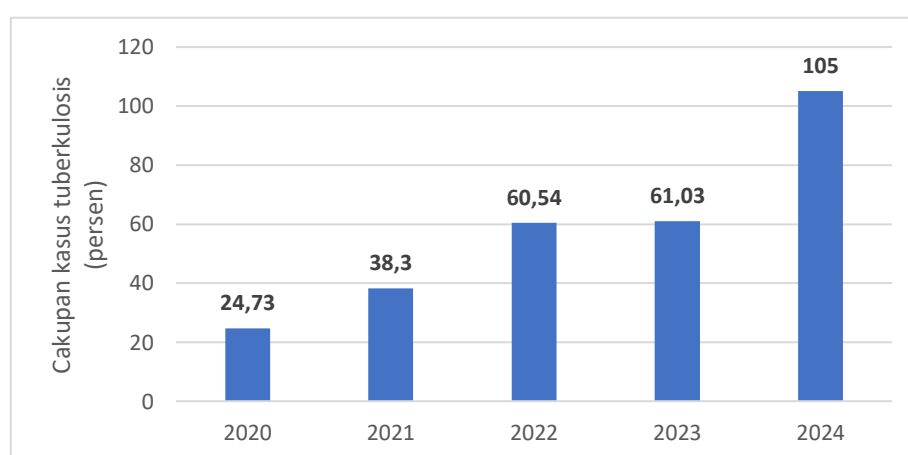
D. Capaian Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis (TBC) di Kota Lubuk Linggau selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah kasus tercatat relatif tinggi, kemudian sempat mengalami penurunan pada 2021 seiring dengan meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar dan deteksi dini. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 angka kasus kembali meningkat yang mengindikasikan semakin aktifnya upaya penemuan kasus (*case finding*) melalui program skrining maupun *contact tracing*. Meskipun demikian, pada tahun 2024 jumlah kasus kembali mengalami penurunan, yang di satu sisi menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengendalian penyakit, namun di sisi lain juga masih perlu diwaspadai agar tidak terjadi *under-reporting* akibat kasus yang tidak terdeteksi.

Gambar 2.24.

Perkembangan Capaian Tuberkulosis Kota Lubuk Linggau

Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, 2025

Secara umum, fluktuasi kasus TBC di Kota Lubuk Linggau mencerminkan dinamika antara keberhasilan deteksi kasus dengan tantangan pengendalian penyakit menular. Penurunan kasus tidak selalu berarti beban penyakit berkurang, melainkan bisa menunjukkan keterbatasan cakupan penemuan kasus. Oleh karena itu, strategi penanggulangan TBC di Kota Lubuk Linggau ke depan perlu menekankan pada penguatan sistem surveilans, peningkatan

kapasitas layanan kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan pengobatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka kasus TBC dapat benar-benar ditekan secara berkelanjutan menuju eliminasi TBC sesuai target nasional tahun 2030.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren positif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS di kota ini tercatat 9,89 tahun, yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Sumatera Selatan yang hanya 8,24 tahun pada tahun yang sama. Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahun, dengan RLS mencapai 9,94 tahun pada 2024.

Peningkatan RLS ini mencerminkan keberhasilan Kota Lubuk Linggau dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan aksesnya bagi penduduk. RLS yang terus meningkat menunjukkan bahwa penduduk di Kota Lubuk Linggau semakin memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih lama, yang tentu saja berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota ini.

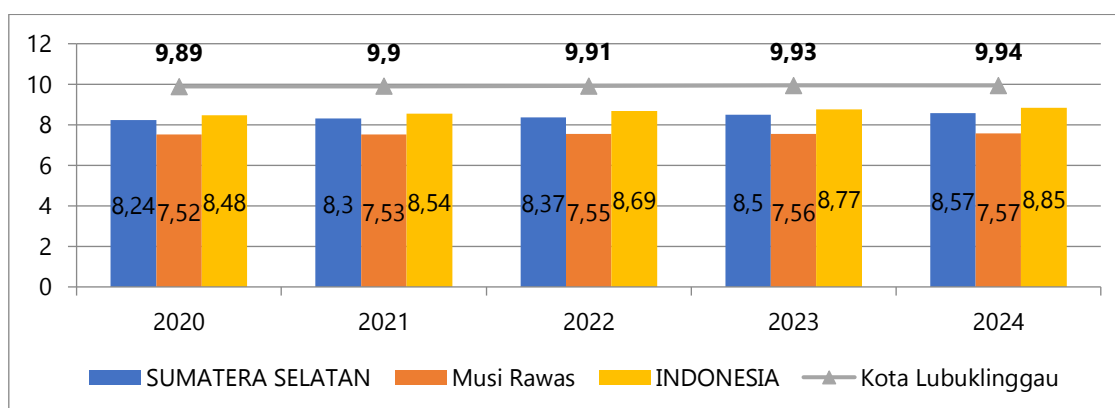
Kota Lubuk Linggau juga berhasil melampaui rata-rata Sumatera Selatan dan rata-rata nasional dalam hal RLS. Pada tahun 2024, diperkirakan rata-rata lama sekolah di Sumatera Selatan hanya 8,57 tahun, sementara rata-rata nasional diperkirakan 8,85 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lubuk Linggau telah berhasil memberikan lebih banyak peluang pendidikan bagi warganya dibandingkan dengan banyak daerah lainnya.

Secara keseluruhan, perkembangan RLS di Kota Lubuk Linggau menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam sektor pendidikan dan menunjukkan upaya yang terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui akses pendidikan yang lebih baik. Ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan sosial kota di masa depan.

Lebih jelas, perbandingan RLS Kota Lubuk Linggau dengan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan Nasional ditampilkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.25.

**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

B. Harapan Lama Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahunnya, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan. Pada 2020, HLS di Kota Lubuk Linggau tercatat 13,37 tahun, dan angka ini meningkat secara bertahap hingga mencapai 13,69 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa warga Kota Lubuk Linggau semakin memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih lama, yang menjadi indikator kemajuan dalam sektor pendidikan di kota ini.

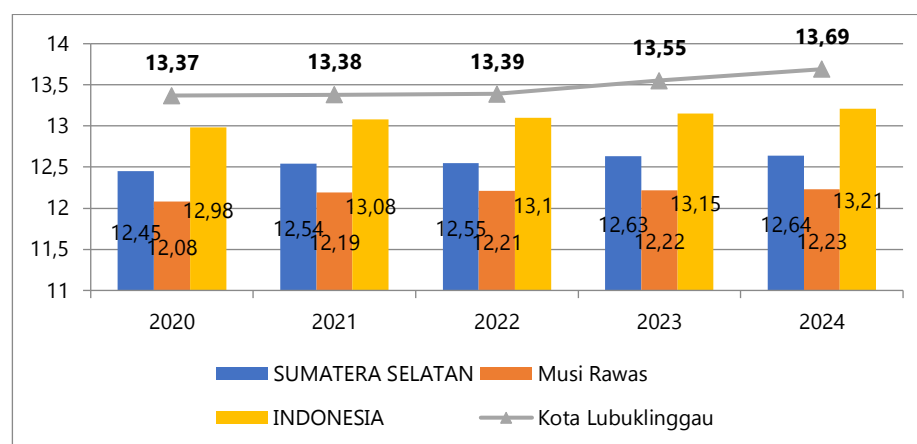
Dibandingkan dengan provinsi Sumatera Selatan, yang HLS-nya diperkirakan 12,64 tahun pada 2024, serta rata-rata nasional yang mencapai 13,21 tahun pada tahun yang sama, Kota Lubuk Linggau memiliki HLS yang lebih tinggi, menunjukkan komitmen kota ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk penduduknya. Bahkan jika dibandingkan dengan Musi Rawas, yang memiliki HLS 12,23 tahun pada 2024, Kota Lubuk Linggau tetap unggul dalam hal harapan lama sekolah.

Peningkatan HLS di Kota Lubuk Linggau ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memberikan lebih banyak akses pendidikan kepada masyarakat. Dengan angka HLS yang terus meningkat, kota ini memiliki potensi

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif di masa depan.

Lebih jelas, perbandingan HLS Kota Lubuk Linggau dengan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan Nasional ditampilkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.26.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Dalam lima tahun terakhir, angka melek huruf di Kota Lubuklinggau tetap tinggi dan stabil, dengan capaian selalu di atas 98 persen. Pada tahun 2020, angka melek huruf total tercatat 99,06 persen dan berada di 98,81 persen pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi, tren keseluruhan menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat literasi yang baik.

Secara rinci perkembangan AMH penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21.
Angka Melek Huruf Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

Angka Melek Huruf	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Kelamin					
Laki-laki	99,72	99,09	99,23	99,29	98,98
Perempuan	98,39	99,10	98,48	97,74	98,65
Total	99,06	99,09	98,46	99,00	98,81

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Angka melek huruf laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun kesenjangan relatif kecil. Pada 2021, bahkan angka melek huruf perempuan sempat melampaui laki-laki. Penurunan angka pada tahun-tahun tertentu, terutama di kalangan perempuan, menjadi catatan penting untuk penguatan program literasi yang lebih merata. Secara umum, capaian ini mencerminkan komitmen Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan akses literasi bagi seluruh masyarakat.

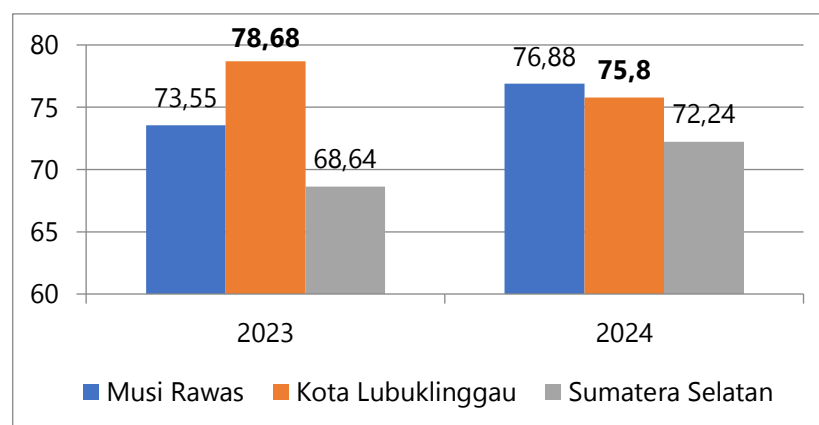
C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan alat ukur tingkat pembangunan literasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IPLM mengukur upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. IPLM terdiri dari 7 unsur, yaitu 1) Pemerataan layanan perpustakaan; 2) Ketercukupan koleksi; 3) Ketercukupan tenaga perpustakaan; 4) Tingkat kunjungan masyarakat per hari; 5) Jumlah perpustakaan ber-SNP; 6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi; dan 7) Anggota perpustakaan. Untuk menentukan nilai IPLM, dilakukan perhitungan $\text{Total UPLM} / 7 \times 100$. Nilai IPLM dibagi menjadi 5 kategori, yaitu: Sangat rendah: 0–29,9, Rendah: 30–49,9, Sedang: 50–79,9, Tinggi: 80–89,9, Sangat tinggi: 90–100.

Berdasarkan kategori diatas, nilai IPLM Kota Lubuk Linggau tahun 2023 termasuk dalam kategori “Sedang”. Jika dibandingkan dengan IPLM Sumatera Selatan nilai IPLM Kota Lubuk Linggau lebih unggul yaitu sebesar 75,8, sedangkan jika dibandingkan dengan Musi Rawas capaian IPLM Kota Lubuk Linggau tertinggal sebesar 1 poin.

Gambar 2.27.

**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kota Lubuk Linggau Tahun Tahun 2023-2024**



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

Jika dilihat komponen pembentuk IPLM, penurunan IPLM Kota Lubuk Linggau tahun 2024 disebabkan oleh menurunnya ketercukupan koleksi perpustakaan. Lebih lanjut, perkembangan IPLM Kota Lubuk Linggau beserta komponennya tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.22.
IPLM dan Komponen Pembentuknya
Kota Lubuk Linggau Tahun 2023-2024

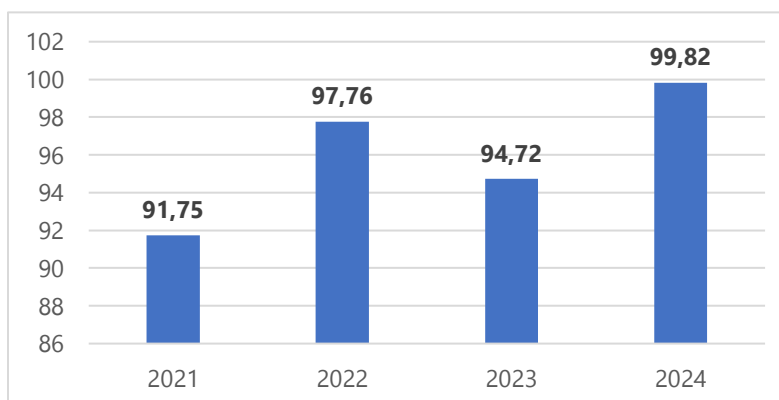
Komponen	2023	2024
Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,7507	0,7939
Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	0,6691	0,4164
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1	1
Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	0,088	0,0961
Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	1	1
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	1	1
Jumlah Anggota Perpustakaan	1	1
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78,68	75,8

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif kini menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial, ekonomi, dan bencana. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau kelompok rentan dan memastikan bantuan sosial diberikan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan lokal. Melalui kebijakan yang responsif dan berbasis data, program perlindungan sosial daerah diarahkan tidak hanya untuk mengatasi kemiskinan kronis, tetapi juga untuk memberikan respon tanggap terhadap krisis yang bersifat mendadak.

Gambar 2.28.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, 2025

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, tingkat kepesertaan tercatat sebesar 91,75%, kemudian meningkat tajam menjadi 97,76% pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 94,72%, cakupan JKN kembali naik secara signifikan hingga mencapai 99,82% pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui program JKN. Hampir seluruh penduduk telah terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional, sehingga pada tahun 2024 Kota Lubuk Linggau hampir mencapai status *Universal Health Coverage (UHC)*.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program JKN di Kota Lubuk Linggau telah berjalan efektif, baik melalui peningkatan kepesertaan mandiri maupun optimalisasi pendaftaran peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan ini diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Untuk menggambarkan kondisi Kota Lubuk Linggau yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju, salah satunya ditunjukkan dengan capaian indikator zero konflik umat beragama. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Kota Lubuk Linggau berhasil mencatatkan capaian Zero Konflik Antar Umat Beragama sebesar 100 persen. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tidak terjadi satu pun konflik terbuka maupun tertutup yang melibatkan unsur keagamaan di wilayah ini. Keberhasilan ini merupakan prestasi signifikan yang mencerminkan tingginya tingkat toleransi, kesadaran sosial, dan kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, hingga lembaga pendidikan yang secara konsisten membangun ruang dialog, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, dan menyelesaikan potensi gesekan secara damai. Program-program seperti sosialisasi moderasi beragama, pelatihan toleransi untuk pemuda, serta pembinaan rumah ibadah berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Indeks ini mencerminkan tingkat keberhasilan upaya perlindungan anak melalui kebijakan, program, serta layanan yang mendukung tumbuh kembang anak secara aman, sehat, dan bermartabat.

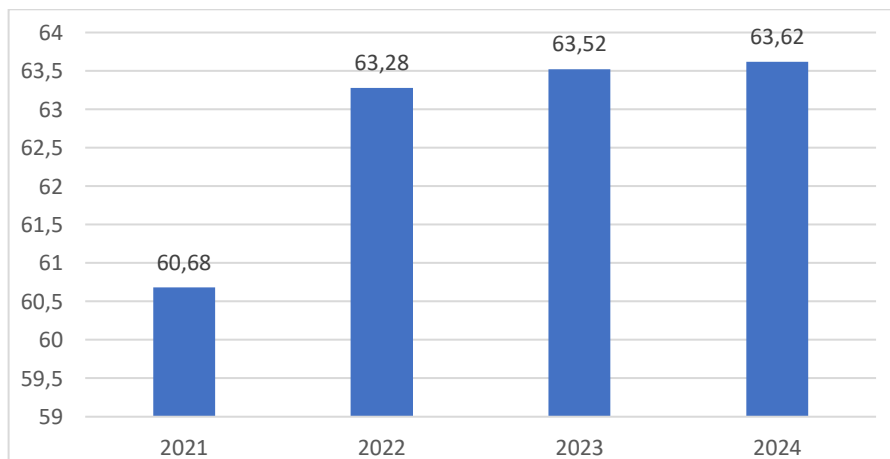
Indeks Perlindungan Anak di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren meningkat setiap tahun pada periode 2021–2024. Nilai indeks naik dari 60,68 pada tahun 2021 menjadi 63,28 pada tahun 2022, kemudian sedikit meningkat menjadi 63,52 pada tahun 2023, dan mencapai 63,62 pada tahun 2024.

Kenaikan signifikan pada tahun 2022 mencerminkan penguatan kebijakan dan program perlindungan anak pascapandemi, seperti peningkatan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak, pembentukan forum anak, serta pengembangan ruang ramah anak di tingkat kelurahan. Sementara itu, peningkatan yang relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kota Lubuk Linggau sudah berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Lebih lanjut perkembangan Indeks Perlindungan Anak di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.29.

Indeks Perlindungan Anak Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2025

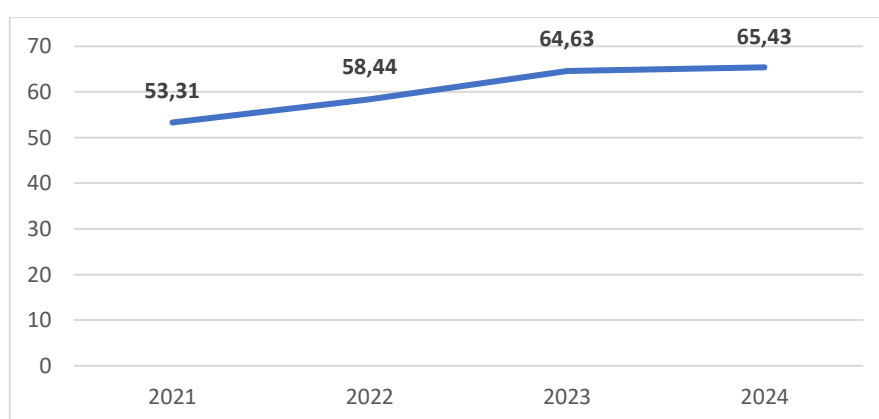
Secara keseluruhan, tren positif ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Kota Layak Anak secara penuh.

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren yang konsisten meningkat dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai iBangga tercatat sebesar 53,31, kemudian naik menjadi 58,44 pada 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada 2023 dengan capaian 64,63, dan pada 2024 indeks kembali meningkat meskipun lebih moderat, yaitu menjadi 65,43. Lebih lanjut perkembangan iBangga Kota Lubuk Linggau ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.30.

Perkembangan Capaian iBangga Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24, 2025

Kenaikan yang konsisten ini menggambarkan adanya perbaikan dalam kualitas pembangunan keluarga di Kota Lubuk Linggau, baik dari aspek ketentraman, kemandirian, maupun kebahagiaan keluarga. Tren positif tersebut menunjukkan keberhasilan berbagai program intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mulai dari penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga penguatan nilai-nilai sosial dan ketahanan keluarga.

Faktor yang mendorong peningkatan ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola asuh dan kualitas hidup keluarga, dukungan program pemerintah dalam bidang kesehatan ibu dan anak, serta adanya upaya pemberdayaan ekonomi melalui berbagai kegiatan UMKM dan bantuan sosial produktif. Selain itu, sinergi lintas sektor juga memperkuat capaian, khususnya melalui program-program yang menekankan pada pembangunan keluarga sejahtera.

Meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang baik, tantangan tetap ada terutama dalam menjaga keberlanjutan tren positif ini. Upaya memperkecil kesenjangan antar keluarga, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta memastikan akses layanan dasar yang

merata akan menjadi faktor kunci agar Indeks Pembangunan Keluarga Kota Lubuk Linggau terus meningkat dan semakin mendekati kategori keluarga sejahtera secara menyeluruh.

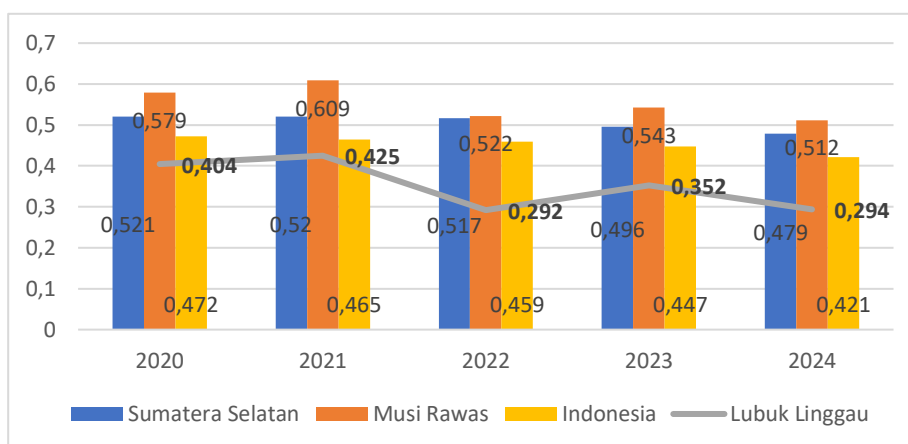
C. Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan berbasis persoalan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG diadopsi dari Gender Inequality Index (GII) milik UNDP. Besarannya 0-1.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu: 1) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF (proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan) dan MHPK20 (proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun); 2) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif; dan 3) dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator TPAK. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.

Gambar 2.31.

Indeks Ketimpangan Gender Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dilihat per komponen pembentuknya, secara umum dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan kondisi yang kurang baik di akhir periode. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas

kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun kembali meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi kembali meningkat.

Sementara itu, pada dimensi pemberdayaan dan pasar kerja terlihat semakin membaik. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif meskipun angkanya masih di bawah 30 persen. Kondisi ini menyiratkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih setara dibandingkan sebelumnya. Indikator lain pada dimensi pemberdayaan, yaitu Persentase Pendidikan SMA ke Atas menunjukkan proporsi perempuan semakin meningkat sementara laki-laki semakin menurun. Pada dimensi pasar kerja, tren TPAK laki-laki dan perempuan cenderung meningkat meskipun cukup fluktuatif. Kondisi ini memperkecil adanya ketimpangan gender pada dimensi pemberdayaan dan pasar kerja.

Tabel 2.23.

**Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Pembentuknya
Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023**

Dimensi/Indikator	Gender	2019	2020	2021	2022	2023
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,082	0,053	0,058	0,014	0,032
MHPK 20	Perempuan	0,229	0,231	0,299	0,285	0,288
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (persen)	Laki-Laki	84	86,67	85,71	80	80
	Perempuan	16	13,33	14,29	20	20
Pendidikan SMA ke Atas (persen)	Laki-Laki	53,66	54,33	47,42	47,47	46,59
	Perempuan	42,04	47,56	39,56	41,5	44,09
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (persen)	Laki-Laki	84,52	84,85	86,85	80,63	83,83
	Perempuan	56,91	55,8	60,49	55,38	57,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

D. Indeks Pembangunan Gender

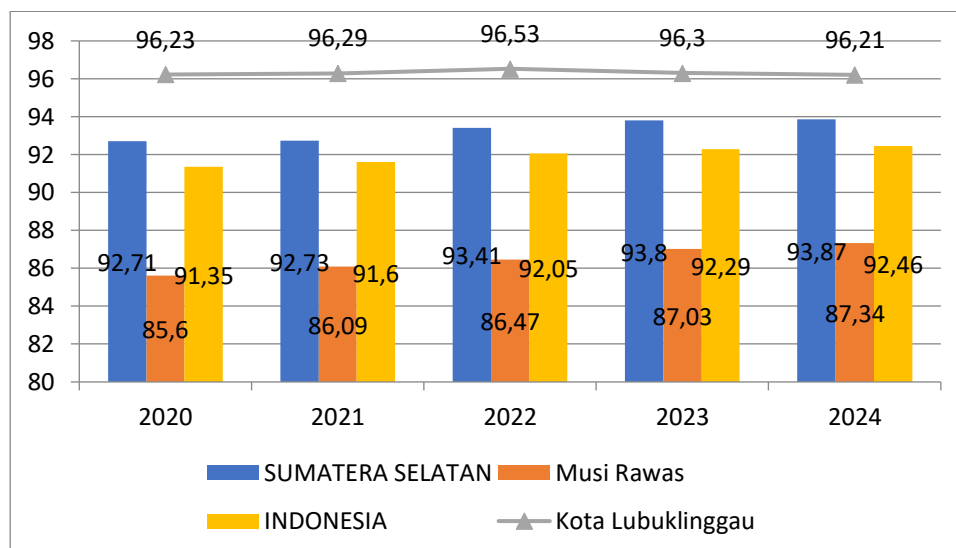
Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan berbasis persoalan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Capaian angka IPG Kota Lubuk Linggau selama periode 2020 sampai dengan 2024 berada di atas angka IPG provinsi dan IPG nasional. Namun, angka ini masih masih dibawah angka standar yaitu 100, sebagai bentuk

terwujudnya kesetaraan gender di suatu wilayah. Lebih lanjut, capaian IPG Kota Lubuk Linggau jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.32.

Indeks Pembangunan Gender Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan angka yang stabil dalam lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024. Pada 2020, IPG Kota Lubuk Linggau tercatat 96,23, yang sudah mencerminkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Angka ini kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun-tahun berikutnya, dengan 96,29 pada 2021, 96,53 pada 2022, dan sedikit penurunan pada 2023 menjadi 96,3. Namun, pada 2024, angka IPG kembali berada di angka 96,21, menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan meskipun masih terbilang stabil dan tinggi.

Tabel 2.24.

Indeks Pembangunan Gender dan Komponen Pembentuknya di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

Komponen		IPM	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita
2020	Perempuan	77,06	76,13	14,12	9,64	12.816
	Laki-Laki	80,08	71,50	13,30	10,26	17.296
2021	Perempuan	77,18	76,30	14,13	9,65	12.846
	Laki-Laki	80,15	71,58	13,31	10,27	17.314
2022	Perempuan	77,88	76,83	14,14	9,67	13.379
	Laki-Laki	80,68	71,83	13,32	10,28	18.038
2023	Perempuan	78,35	77,37	14,31	9,68	13.431
	Laki-Laki	81,36	72,09	13,34	10,31	19.016
2024	Perempuan	78,89	77,75	14,31	10,32	13.892
	Laki-Laki	82,00	72,32	13,56	9,69	19.628

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Penurunan Indeks Pembangunan Gender di Kota Lubuk Linggau dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua; 2) Perlindungan hukum yang dirasakan kurang; 3) Peraturan perundang-undangan yang diskriminatif; 4) Ketidaksetaraan akses pendidikan; 5) Stereotip dan prasangka; dan 6) Pola pikir masyarakat.

E. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur untuk mengevaluasi dan menggambarkan kondisi pemuda di suatu negara atau wilayah. IPP mencakup lima domain dasar, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan kerja, Partisipasi dan kepemimpinan, Gender dan diskriminasi. Capaian IPP termuat dalam laporan IPP yang disusun secara berkala oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan dukungan Program Kerjasama Pemerintah RI-United Nations Population Fund (UNFPA).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPP Kota Lubuk Linggau mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 45,17 menjadi 52,17 di tahun 2023. Lebih jelas, perkembangan IPP Kota Lubuk Linggau dari tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.25.
Perkembangan IPP dan Komponen Pembentuknya
di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023

Komponen IPP	2019	2020	2021	2022	2023
Domain 1 : Pendidikan	-	-	46,67	46,67	70,00
Domain 2 : Kesehatan dan Kesejahteraan	-	-	57,5	57,5	57,5
Domain 3 : Lapangan dan kesempatan kerja	-	-	55	55	70
Domain 4 : Partisipasi dan Kepemimpinan	-	-	16,67	16,67	16,67
Domain 5 : Gender dan diskriminasi	-	-	50	50	46,67
Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	45,17	45,17	52,17

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuk Linggau, 2024

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

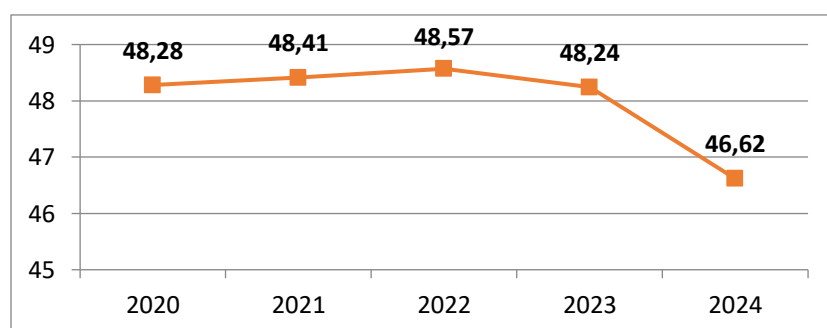
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif Rasio angka beban ketergantungan di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun ke tahun, meskipun ada penurunan kecil pada 2024. Pada 2020, rasio beban ketergantungan tercatat sebesar 48,28, yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berada dalam usia produktif (15-64 tahun), ada sekitar 48 orang yang bergantung pada mereka, baik yang berada di usia muda (di bawah 15 tahun) maupun usia tua (65 tahun ke atas).

Pada 2021, rasio ini sedikit meningkat menjadi 48,41, dan terus mengalami sedikit kenaikan hingga mencapai 48,57 pada 2022. Namun, pada 2023, rasio ini mengalami penurunan menjadi 48,24, dan terus berlanjut pada 2024 dengan rasio 46,62, yang merupakan angka terendah selama periode tersebut. Penurunan rasio pada 2024 ini menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur demografis Kota Lubuk Linggau, dengan proporsi lebih banyak penduduk usia produktif dibandingkan dengan yang tidak produktif. Hal ini mungkin mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja di Kota Lubuk Linggau.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi kecil, rasio angka beban ketergantungan di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren yang positif, dengan penurunan pada tahun terakhir yang mengindikasikan perubahan yang lebih seimbang dalam struktur usia penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Lubuk Linggau mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 2.33.

Angka Ketergantungan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Untuk menggambarkan kondisi Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di Kota Lubuk Linggau, ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: 1) Rasio PDRB Industri Pengolahan, 2) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, dan 3) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, beberapa sektor unggulan di Kota Lubuk Linggau menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan, mencerminkan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat. Lebih lanjut perkembangan indikator tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.26.

Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Lainnya di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Rasio PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lubuk Linggau (Persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Industri Pengolahan	7,02	7,04	7,13	7,27	7,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	4,18	4,43	4,69	5,18
Jasa Lainnya	4,92	4,83	4,88	4,94	4,9

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Sektor Industri Pengolahan memperlihatkan tren pertumbuhan yang relatif stabil. Dimulai dari kontribusi sebesar 7,02 persen pada tahun 2020, angka ini terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 7,27 persen di tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 7,16 persen, sektor ini tetap menunjukkan peran penting dalam struktur ekonomi kota, terutama dalam mendukung produktivitas lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan yang paling signifikan di antara ketiga sektor yang diamati. Dari angka 4,16 persen pada tahun 2020, sektor ini tumbuh stabil hingga mencapai 5,18 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pariwisata, pertumbuhan usaha kuliner dan perhotelan, serta dampak positif dari pemulihan mobilitas masyarakat pasca pandemi. Ini menjadi sinyal bahwa sektor ini berpotensi menjadi salah satu pendorong ekonomi kreatif dan pariwisata kota.

Di sisi lain, sektor Jasa Lainnya menunjukkan tren yang cenderung stabil namun relatif stagnan. Angka kontribusinya berkisar antara 4,83 persen hingga 4,94 persen, dengan fluktuasi kecil selama lima tahun terakhir. Meskipun tidak mengalami pertumbuhan signifikan, sektor ini tetap memainkan peran pelengkap dalam penyediaan layanan masyarakat dan ekonomi berbasis jasa.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan moderat, terdapat sektor-sektor yang berkembang dengan pesat dan menjanjikan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau ke depan. Konsistensi dukungan kebijakan, investasi, serta penguatan UMKM akan menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sektor-sektor tersebut di masa mendatang.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator lainnya yang menggambarkan kondisi Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di Kota Lubuk Linggau adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lubuk Linggau selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik pada kelompok perempuan maupun laki-laki. Secara umum, TPAK laki-laki tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun terdapat pergerakan menarik yang mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi di wilayah ini.

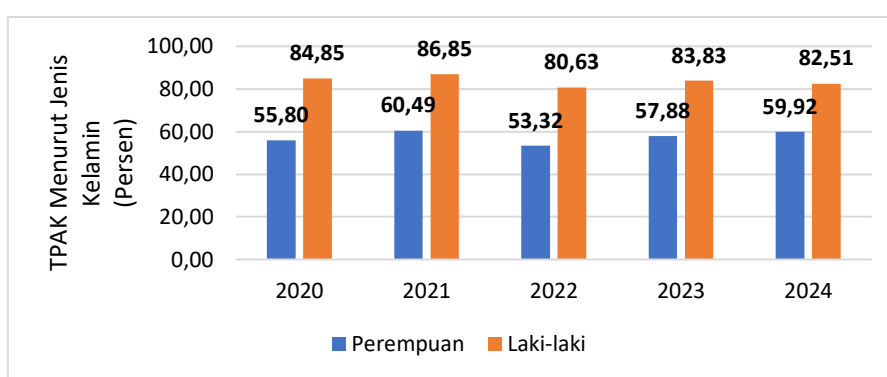
Untuk TPAK perempuan, angka pada tahun 2020 tercatat sebesar 55,8 persen, kemudian meningkat cukup tajam menjadi 60,49 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan ke 53,32 persen, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi terhadap sektor-sektor kerja yang banyak melibatkan perempuan. Meski demikian, angka ini kembali meningkat menjadi 57,88 persen pada tahun 2023, dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 59,92 persen. Tren ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja semakin menguat, didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi serta peningkatan akses perempuan terhadap peluang kerja dan pendidikan.

Sementara itu, TPAK laki-laki menunjukkan fluktuasi yang relatif lebih stabil. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki berada di angka 84,85 persen, naik menjadi 86,85 persen di tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode ini. Namun, tahun 2022 mencatat penurunan cukup besar menjadi 80,63 persen, diikuti oleh kenaikan kembali ke 83,83 persen pada 2023, dan sedikit penurunan lagi ke 82,51 persen pada tahun 2024. Meski mengalami penurunan dibandingkan awal periode, tingkat partisipasi laki-laki tetap tinggi dan menunjukkan dominasi yang kuat dalam struktur angkatan kerja.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya peningkatan partisipasi perempuan yang cukup konsisten setelah 2022, serta dinamika pada kelompok laki-laki yang meskipun lebih stabil, tetap menunjukkan adanya pengaruh dari kondisi ekonomi makro. Peningkatan TPAK perempuan menjadi indikator positif terhadap kesetaraan gender dan inklusivitas dunia kerja di Kota Lubuk Linggau, serta menandakan bahwa potensi sumber daya manusia perempuan semakin diakui dan dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi lokal.

Gambar 2.34.

**TPAK Menurut Jenis Kelamin di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024**

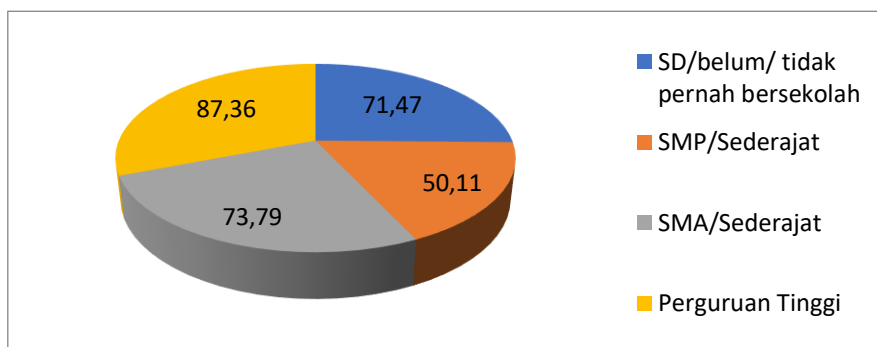


Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2025

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki jauh lebih besar daripada TPAK perempuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum kesiapan penduduk laki-laki untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan budaya/tradisi dimana masyarakat pada umumnya menempatkan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah utama dalam suatu keluarga. Sementara itu sebagian besar penduduk perempuan lebih banyak melakukan kegiatan domestik seperti mengurus rumah tangga.

Gambar 2.35.

**TPAK Menurut Tingkat Pendidikan yang Telah Ditamatkan
di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2025

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, terlihat bahwa TPAK paling besar adalah penduduk lulusan perguruan tinggi, yaitu sebesar 87,36 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk tamatan perguruan tinggi terdapat 87-88 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari kerja). Sedangkan TPAK paling rendah adalah penduduk lulusan SMP/ sederajat, yaitu sebesar 50,11 persen.

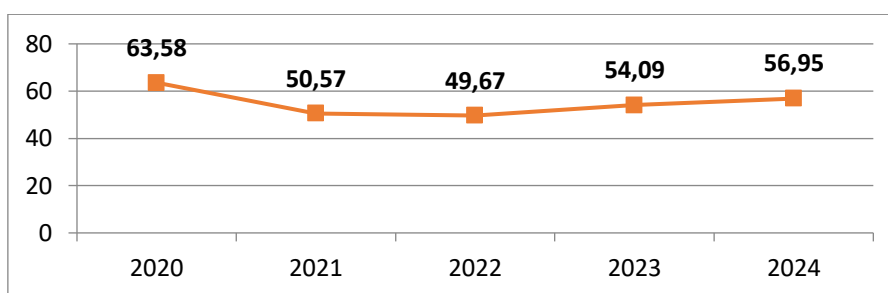
C. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi dari suatu daerah. IID dirancang untuk mengukur tingkat inovasi dalam berbagai bidang, termasuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. IID terdiri dari 3 komponen, yaitu: (i) inovasi tata kelola pemerintahan, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) inovasi pelayanan publik, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat; dan (iii) inovasi daerah lainnya, yang mengukur tingkat inovasi dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Kota Lubuk Linggau berhasil meraih predikat Kota Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2019 dan 2020. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Lubuk Linggau ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (i) komitmen pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk mendorong inovasi daerah; (ii) dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan swasta; dan (iii) peningkatan jumlah dan kualitas inovasi daerah.

Gambar 2.36.

Skor Indeks Inovasi Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

Faktor-faktor penghambat peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: (i) Kurangnya dukungan politik dari pemerintah daerah; (ii) kurangnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan; (iii) kurangnya sumber daya manusia yang kompeten; dan (iv) kurangnya budaya inovasi. Sementara itu eksternal terdiri dari: (i) persaingan inovasi dari daerah lain; (ii) kebijakan pemerintah pusat; dan (iii) lingkungan bisnis yang tidak kondusif akan menghambat inovasi.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

A. Kontribusi Pilar Ekonomi terhadap Penerapan Ekonomi Hijau

Salah satu indikator yang menggambarkan kontribusi penerapan ekonomi hijau dari sisi pilar ekonomi di Kota Lubuk Linggau adalah produktivitas pertanian. Tanaman bahan pangan (padi dan palawija) menjadi tanaman yang andal dan unggul dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan. Padi, jagung dan ubi kayu merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Kota Lubuk Linggau yang produksinya terus menerus mengalami peningkatan sejalan dengan tren pertumbuhan penduduk.

Selama lima tahun terakhir, sektor pertanian di Kota Lubuk Linggau, khususnya pada komoditas padi, mengalami fluktuasi dalam hal produktivitas dan luas panen. Produktivitas padi berada di kisaran yang relatif stabil, yakni antara 51,54 ton/hektar pada 2020 hingga 52,26 ton/hektar pada 2024. Puncak produktivitas terjadi pada 2021 sebesar 52,94 ton/hektar.

Dari sisi produksi, total produksi padi sempat menurun drastis dari 9.020,94 ton pada 2021 menjadi hanya 6.381,94 ton pada 2022, seiring dengan berkurangnya luas panen. Namun, pada 2024, produksi kembali meningkat menjadi 8.362,71 ton, menunjukkan pemulihan sektor pertanian. Produksi padi setara beras juga mengikuti pola yang sama, dengan peningkatan pada 2024 menjadi 4.802,32 ton setelah sempat turun di tahun 2022.

Luas panen padi mengalami penurunan tajam pada 2022, dari 1.704,11 hektar pada 2021 menjadi 1.225,67 hektar, namun kembali naik menjadi 1.600,08 hektar pada 2024. Untuk komoditas jagung, produktivitas menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 5,52 ton/hektar pada 2020 menjadi 8,33 ton/hektar pada 2023. Sementara itu, produktivitas kedelai sempat mencapai titik nol pada 2022, namun melonjak menjadi 3,10 ton/hektar pada 2023, menandakan adanya upaya perbaikan budidaya atau peningkatan kualitas lahan dan benih.

Lebih jelas perkembangan produktivitas pertanian Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 sampai tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.27.
Perkembangan Produktivitas Pertanian Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024

No	Bidang Pertanian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Padi. (Ton/Hektar) ¹⁾	51,54	52,94	52,07	52,81	52,26
	- Produksi Padi. (Ton)	8.532,43	9.020,94	6.381,94	6.679,10	8.362,71
	- Produksi Padi Setara Beras (Ton)	4.874,54	5.180,33	3.664,85	3.835,49	4.802,32
	- Luas Panen Padi. (Hektar)	1.655,53	1.704,11	1.225,67	1.264,84	1.600,08
2	Produktivitas jagung (Ton/Hektar) ²⁾	5,52	4,34	6,25	8,33	-
3	Produktivitas kedelai (Ton/Hektar) ²⁾	0,37	1,29	0	3,10	-

Sumber : 1) BPS Sumatera Selatan, 2025

2) Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, 2024

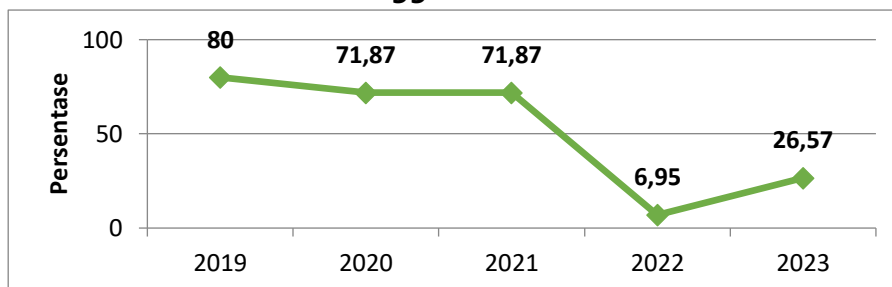
B. Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Hijau

Salah satu indikator yang menggambarkan kontribusi penerapan ekonomi hijau dari sisi pilar lingkungan di Kota Lubuk Linggau adalah persentase luas tutupan lahan. Dalam lima tahun terakhir persentase luas tutupan lahan di Kota Lubuk Linggau cenderung menurun secara signifikan jika dibandingkan dari tahun 2019 yaitu sebesar 80 persen menjadi hanya sebesar 26,57 persen di tahun 2023. Beberapa faktor mempengaruhi hal tersebut di antaranya adanya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan sarana, tutupan air, dan pertumbuhan area permukiman.

Gambar 2.37.

Perkembangan Persentase Luas Tutupan Lahan

Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, 2024

2.1.3.4. Transformasi Digital

A. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Lubuk Linggau dalam periode 2022 hingga 2024 menunjukkan dinamika perkembangan yang beragam pada tiap pilar pembentuknya. Pada tahun 2022, nilai IMDI berada pada angka 42,91, dengan capaian tertinggi pada pilar Keterampilan Digital sebesar 56,45, sementara pilar Pemberdayaan mencatat angka terendah yaitu 28,72. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun masyarakat relatif memiliki kemampuan digital yang cukup baik, namun pemanfaatannya untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masih terbatas.

Pada tahun 2023, IMDI mengalami peningkatan menjadi 45,63, didorong oleh peningkatan signifikan pada pilar Infrastruktur dan Ekosistem yang mencapai 59,09 serta peningkatan pada pilar Keterampilan Digital sebesar 61,47. Akan tetapi, pilar Pekerjaan menurun menjadi 34,39, dan pilar Pemberdayaan juga turun ke 26,98, menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dan keterampilan digital belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas produktif maupun pemberdayaan masyarakat.

Memasuki tahun 2024, nilai IMDI kembali menurun menjadi 42,03. Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya pilar Keterampilan Digital menjadi 51,27 serta turunnya pilar Pemberdayaan ke angka 22,96. Meskipun pilar Pekerjaan mengalami perbaikan menjadi 39,54, peningkatan ini belum cukup untuk mengimbangi penurunan pada pilar lainnya. Tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital relatif berkembang, kemampuan masyarakat dalam menguasai keterampilan digital serta menggunakannya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, sosial, dan lapangan pekerjaan masih perlu diperkuat secara konsisten.

Tabel 2.27.
Perkembangan IMDI Kota Lubuk Linggau beserta Komponennya
Tahun 2020-2024

Tahun	Pilar				IMDI
	Infrastruktur & Ekosistem	Keterampilan Digital	Pemberdayaan	Pekerjaan	
2022	46,05	56,45	28,72	41,26	42,91
2023	59,09	61,47	26,98	34,39	45,63
2024	57,70	51,27	22,96	39,54	42,03

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Secara keseluruhan, perkembangan IMDI Kota Lubuk Linggau mengindikasikan bahwa tantangan utama terletak pada pemanfaatan teknologi digital untuk aspek pemberdayaan dan transformasi pekerjaan. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada penguatan literasi digital yang aplikatif, peningkatan kapasitas SDM untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan berbasis digital yang inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan nilai IMDI dapat meningkat secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Net Ekspor Antar Daerah

Secara total, nilai net ekspor Kota Lubuk Linggau selama tahun 2020 hingga 2024 selalu bernilai negatif. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat yang masih banyak bergantung pada barang-barang dari luar wilayah Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2020 nilai net ekspor atas dasar harga berlaku mencapai negatif 1.379,75 miliar rupiah. Selanjutnya negatif 1.263,64 miliar rupiah (2021), negatif 1.345,12 miliar rupiah (2022), negatif 1.476,52 miliar rupiah (2023), dan negatif 1.657,44 miliar rupiah (2024). Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku, nilai net ekspor atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama. Nilai "riil" pada periode 2020-2024 adalah negatif 963,37 miliar rupiah pada tahun 2020 hingga negatif 839,38 miliar rupiah pada tahun 2024. Proporsi terhadap total PDRB cenderung mengalami peningkatan yang artinya kebutuhan masyarakat mulai banyak beralih ke barang dari dalam wilayah Kota Lubuk Linggau.

Lebih lanjut perkembangan net ekspor antar daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.28.

**Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Nilai Net Ekspor Antar Daerah (Miliar Rp)					
a. ADHB	-1.379,75	-1263,64	-1345,12	-1476,52	-1657,44
b. ADHK 2010	-969,37	-860,58	-740,88	-763,29	-839,38
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	-20,54	-17,5	-17,5	-17,93	-19,01

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Ket: *: Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

B. PDRB Pengeluaran

Perekonomian Kota Lubuk Linggau berdasarkan pengeluaran menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang periode 2020–2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp6,717 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp8,717 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, peningkatan aktivitas investasi, serta pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Dari sisi komponennya, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan nilai yang terus meningkat dari Rp4,176 triliun pada 2020 menjadi Rp5,725 triliun pada 2024. Peningkatan ini menandakan konsumsi masyarakat tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit Rumah Tangga) juga memperlihatkan tren meningkat, dari Rp105,9 miliar pada 2020 menjadi Rp164,7 miliar pada 2024, menunjukkan bertambahnya aktivitas lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah relatif berfluktuasi. Pada 2020 tercatat Rp803,4 miliar, naik menjadi Rp849,6 miliar pada 2021, sedikit menurun pada 2022 sebesar Rp826,1 miliar, dan kembali meningkat hingga mencapai Rp963,8 miliar pada 2024. Hal ini mengindikasikan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui belanja publik, terutama sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga terus meningkat dari Rp2,938 triliun pada 2020 menjadi Rp3,517 triliun pada 2024, yang mencerminkan tumbuhnya investasi baik pada sektor bangunan maupun nonbangunan. Namun, perubahan inventori justru mengalami penurunan

signifikan, dari Rp73,1 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp4,1 miliar pada 2024, mengindikasikan rendahnya akumulasi stok barang oleh pelaku usaha.

Di sisi lain, komponen net ekspor-impor antar daerah selalu bernilai negatif, dengan defisit yang cenderung melebar dari -Rp1,379 triliun pada 2020 menjadi -Rp1,657 triliun pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Lubuk Linggau masih sangat bergantung pada pasokan barang dan jasa dari luar daerah.

Lebih lanjut PDRB Pengeluaran ADHB disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.29.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kota Lubuk Linggau (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

Komponen PDRB Pengeluaran	[SERI 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Lubuk Linggau (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.176.254,86	4.297.530,30	4.842.192,80	5.284.216,94	5.725.117,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	105.990,19	110.502,46	125.849,55	135.575,48	164.744,42
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	803.457,08	849.674,33	826.151,22	858.268,72	963.867,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.938.917,15	2.963.580,67	3.078.065,17	3.169.149,83	3.517.443,49
Perubahan Inventori	73.114,43	72.824,43	65.935,46	31.825,58	4.128,65
Net Ekspor-Impor	-1.379.752,19	-1.263.644,31	-1.250.347,65	-1.245.323,83	-1.657.443,89
PDRB	6.717.981,52	7.030.467,87	7.687.846,55	8.233.712,73	8.717.857,72

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Secara umum, struktur PDRB Kota Lubuk Linggau masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan PMTB sebagai motor pertumbuhan. Meskipun nilai PDRB terus meningkat, tantangan yang dihadapi adalah mengurangi defisit ekspor-impor antar daerah melalui penguatan sektor produksi lokal. Dengan memperkuat sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, Kota Lubuk Linggau berpeluang meningkatkan kemandirian ekonomi serta memperkuat kontribusi investasi produktif dalam jangka panjang.

Berdasarkan perhitungan PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan (ADHK 2010), perekonomian Kota Lubuk Linggau menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang periode 2020–2024. Nilai PDRB meningkat dari Rp4,333 triliun pada 2020 menjadi Rp5,105 triliun pada 2024, yang mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi dan pertumbuhan aktivitas produktif di berbagai sektor.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan tren peningkatan konsisten dari Rp2,644 triliun pada 2020 menjadi Rp3,211 triliun pada 2024. Hal ini menunjukkan daya beli

masyarakat semakin membaik serta konsumsi tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi LNPRT juga mencatat pertumbuhan positif, naik dari Rp73,5 miliar pada 2020 menjadi Rp97,9 miliar pada 2024, yang menandakan peran lembaga non-profit semakin kuat dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah relatif stabil, dari Rp480,7 miliar pada 2020 menjadi Rp560,3 miliar pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peran belanja pemerintah tetap terjaga dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan relatif lebih kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) justru menunjukkan tren yang cenderung stagnan. Setelah sempat menurun dari Rp2,043 triliun pada 2020 menjadi Rp1,974 triliun pada 2022, nilai PMTB perlahan meningkat kembali hingga Rp2,071 triliun pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi produktif belum sepenuhnya pulih, meskipun ada indikasi perbaikan pada tahun terakhir.

Perubahan inventori mengalami penurunan signifikan dari Rp54,5 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp2,9 miliar pada 2024, yang menandakan rendahnya akumulasi stok barang oleh pelaku usaha. Sementara itu, net ekspor-impor antar daerah konsisten menunjukkan angka negatif, meskipun defisit sedikit menurun dari -Rp963,3 miliar pada 2020 menjadi -740,9 miliar pada 2023, sebelum kembali melebar menjadi -Rp839,3 miliar pada 2024. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah masih tinggi dan belum dapat diimbangi oleh produksi lokal.

Lebih lanjut PDRB Pengeluaran ADHB disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.30.

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kota Lubuk Linggau (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024**

Komponen PDRB Pengeluaran	[SERI 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Lubuk Linggau (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.644.899,80	2.687.271,19	2.855.247,95	3.026.351,94	3.211.936,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	73.521,70	74.940,81	79.821,16	85.001,56	97.943,67
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	480.713,00	493.545,82	493.644,53	500.500,99	560.343,04
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.043.314,80	2.020.207,74	1.974.524,42	1.993.326,29	2.071.261,24
Perubahan Inventori	54.585,10	54.845,87	52.118,24	15.224,64	2.948,99
Net Ekspor-Impor	-963.367,99	-860.579,61	-783.452,86	-740.952,92	-839.377,31
PDRB	4.333.666,41	4.470.231,82	4.671.903,45	4.879.452,50	5.105.056,63

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Kota Lubuk Linggau berdasarkan pengeluaran ADHK 2010 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sedikit oleh pemulihan investasi. Tantangan utama adalah memperkuat basis produksi lokal serta mendorong peningkatan investasi produktif, sehingga defisit ekspor antar daerah dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

C. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Selama periode 2020 hingga 2024, perkembangan PMTB Kota Lubuklinggau mengalami fluktuasi, namun menunjukkan pemulihan yang kuat di tahun terakhir pengamatan. Pada tahun 2020, PMTB tercatat sebesar Rp2.043,31 miliar, kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi Rp2.020,21 miliar pada 2021 dan mencapai titik terendah pada 2022 sebesar Rp1.974,52 miliar. Penurunan ini kemungkinan mencerminkan dampak dari tekanan ekonomi nasional maupun global, seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi investasi dan aktivitas pembangunan.

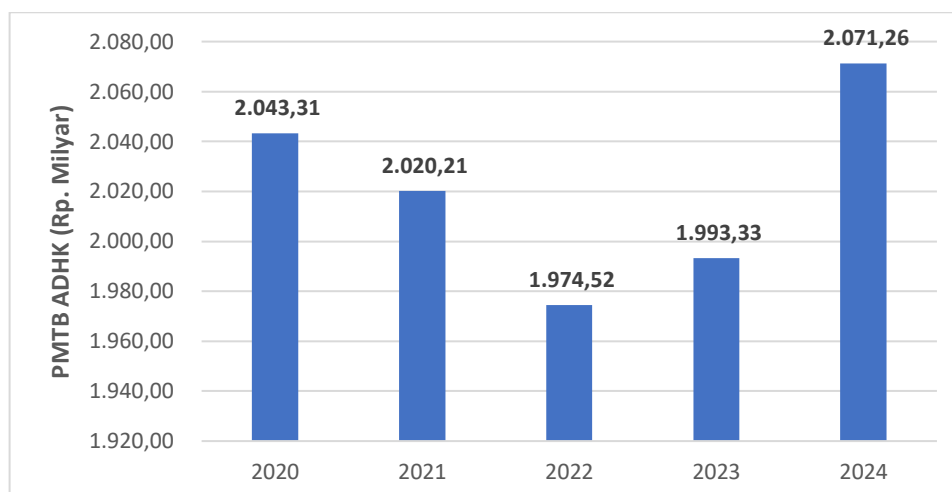
Namun, sejak tahun 2023, tren PMTB kembali meningkat, mencapai Rp1.993,33 miliar, dan melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi Rp2.071,26 miliar. Angka tahun 2024 ini tidak hanya melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan investasi fisik di Kota Lubuklinggau.

Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya aktivitas investasi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti pembangunan infrastruktur, perumahan, maupun pengadaan barang modal. Hal ini mencerminkan iklim investasi yang semakin membaik dan menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Secara lebih rinci ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.38.

Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menunjukkan cakupan layanan infrastruktur di Kota Lubuk Linggau. Tingkat ketercapaiannya dilihat dari 3 (tiga) komponen, yaitu indeks infrastruktur permukiman, indeks infrastruktur dasar, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Perkembangan indeks layanan infrastruktur Kota Lubuk Linggau selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup di Kota Lubuk Linggau menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Indeks Infrastruktur Permukiman mengalami lonjakan tajam dari hanya 8,74 hektar pada 2020 menjadi 75,29 hektar di tahun 2021. Namun, indeks ini sempat stagnan di angka 2,78 hektar selama 2022 dan 2023, sebelum melonjak drastis menjadi 99,45 hektar pada 2024. Kenaikan tajam pada 2024 menunjukkan adanya ekspansi pembangunan atau perbaikan kawasan permukiman secara signifikan di tahun tersebut.

Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan mengalami tren peningkatan dari 59,58 persen pada 2020 hingga mencapai puncaknya di 81,29 persen pada 2023. Namun, pada 2024 indeks ini menurun tajam menjadi 45,87 persen, yang bisa mengindikasikan adanya hambatan dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, atau jaringan jalan kota.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sempat merosot dari 80,4 pada 2020 ke titik terendah 60,43 di 2021. Namun, secara bertahap meningkat

kembali hingga mencapai 71,83 pada 2024. Ini menunjukkan upaya perbaikan kualitas air, udara, dan lahan yang mulai menunjukkan hasil.

Sementara itu, Indeks Layanan Infrastruktur mengalami fluktuasi. Dari 49,57 pada 2020, sempat meningkat menjadi 65,60 di 2021, kemudian turun lagi menjadi 40,16 di 2024. Tren ini menandakan perlunya penguatan dan pemerataan layanan infrastruktur agar masyarakat merasakan dampak pembangunan secara merata.

Secara keseluruhan, meski terdapat fluktuasi dalam beberapa indikator, data menunjukkan adanya upaya signifikan dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan di Kota Lubuk Linggau, terutama di tahun 2024. Namun demikian, beberapa aspek masih memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih jelas, perkembangan Indeks Layanan Infrastruktur dan komponen pembentuknya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.31.
Indeks Layanan Infrastruktur Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Permukiman	Ha	59,58	65,86	72,99	68,37	65,27
Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	persen	59,58	61,08	75,17	81,29	45,87
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,4	60,43	64,86	66,79	71,83
Indeks Layanan Infrastruktur		49,57	65,60	47,60	50,29	40,16

Sumber:

- 1) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Lubuk Linggau, 2025
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, 2025
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, 2025
- 4) BPS Kota Lubuk Linggau, 2025

B. Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan

Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan digunakan untuk menggambarkan cakupan layanan infrastruktur dasar yang merupakan rata-rata geometris dari 7 (tujuh) komponen yang terdiri dari: 1) Layanan Sanitasi Skala Perkotaan; 2) Penduduk Berakses Air Minum Perpipaian; 3) Jaringan Irigasi Fungsional; 4) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap; 5) Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap; 6) Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai; dan 7) Rumah Tangga yang menggunakan listrik. Secara lebih rinci, perkembangan Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.32.
Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Sanitasi Skala Perkotaan	persen	41,56	32	88,17	93,37	93,44
Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan	persen	38,76	38,79	38,07	31,39	32,01
Jaringan Irigasi Fungsional	persen	40,6	42,4	42,31	43,06	47,12
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	persen	78,25	79,98	79,14	63,42	63,42
Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap	persen	47,06	71,88	71,88	71,88	71,88
Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai	persen	72,84	96,95	92,36	76,44	50,00
Rumah Tangga yang menggunakan listrik	persen	98	99	99	99	99,00
Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	Indeks	59,58	65,86	72,99	68,37	65,27

Sumber:

- 1) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Lubuk Linggau, 2025
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, 2025

Selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dasar perkotaan di Kota Lubuk Linggau menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Layanan sanitasi skala perkotaan mengalami peningkatan drastis dari 32 persen di 2021 menjadi 88,17 persen pada 2022 dan 2023. Namun, capaian ini tidak berlanjut karena pada 2024 turun tajam menjadi hanya 27 persen, menandakan perlunya perhatian serius terhadap kesinambungan layanan sanitasi.

Capaian akses air minum perpipaan relatif stabil, berada di kisaran 38–39 persen, dengan angka tertinggi pada 2021 (39,63 persen) dan sedikit menurun menjadi 38,35 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan belum banyak perubahan signifikan dalam perluasan akses air perpipaan bagi masyarakat. Jaringan irigasi fungsional sempat mengalami peningkatan besar, dari 21,11 persen di 2021 hingga mencapai 96,41 persen pada 2023, namun kemudian merosot kembali menjadi 25,54 persen di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kapasitas, keberlanjutan fungsionalitas infrastruktur tersebut masih menjadi tantangan.

Kondisi jalan dan jembatan juga mengalami penurunan pada 2024. Panjang jalan dalam kondisi mantap turun drastis dari 75,67 persen di 2023 menjadi hanya 30,86 persen di 2024. Hal serupa terjadi pada panjang jembatan dalam kondisi mantap, yang merosot dari 93,86 persen menjadi 50,37 persen pada tahun yang sama. Penurunan ini mengindikasikan perlunya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur transportasi.

Sementara itu, cakupan lingkungan sehat yang didukung PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) memadai juga mengalami tren menurun dari puncaknya 96,95 persen pada 2021 ke 50 persen pada 2024. Sebaliknya, akses listrik bagi rumah tangga tetap tinggi dan stabil di angka 99 persen sejak 2021, menunjukkan bahwa elektrifikasi sudah hampir menjangkau seluruh penduduk.

Terakhir, Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan mencerminkan dinamika keseluruhan infrastruktur dasar, yang meningkat hingga mencapai 81,29 pada 2023, namun kemudian turun menjadi 45,87 pada 2024, menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan dan perawatan infrastruktur secara terpadu.

Secara umum, meskipun terdapat beberapa capaian positif, data tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan di banyak sektor, yang mengisyaratkan perlunya upaya penguatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dasar di Kota Lubuk Linggau secara berkelanjutan.

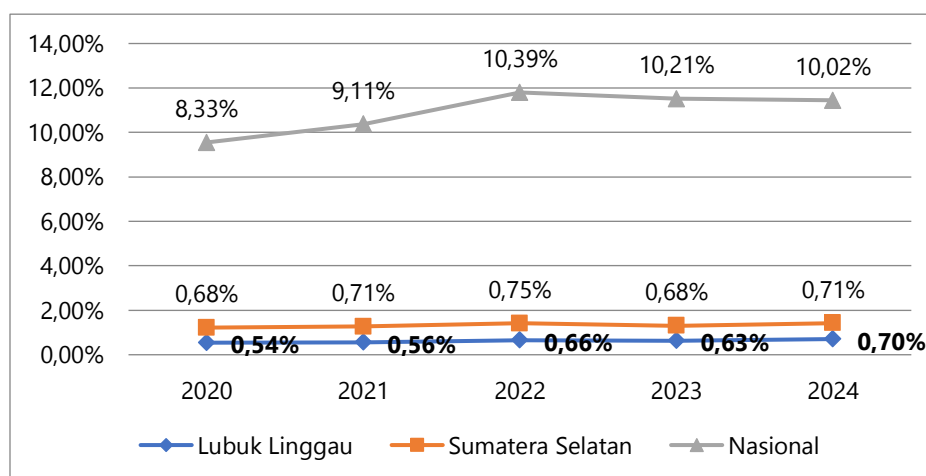
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (ADHB)

Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

Gambar 2.39.

Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (ADHB) Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren yang relatif stabil namun masih rendah selama periode 2019 hingga 2024. Nilai rasio ini bergerak dari 0,62 persen pada 2019, sempat menurun menjadi 0,54 persen di 2020, dan kemudian secara bertahap meningkat hingga mencapai 0,70 persen pada 2024. Rata-rata rasio selama lima tahun terakhir berada pada angka 0,62 persen.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (0,71 persen) dan terutama dengan rata-rata nasional yang mencapai 9,61 persen,

kinerja rasio pajak daerah Kota Lubuk Linggau masih tergolong sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak belum tergarap secara optimal, atau kontribusi pajak terhadap total PDRB masih minim. Kondisi ini memberikan sinyal perlunya strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan perluasan basis pajak agar kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah bisa ditingkatkan secara berkelanjutan.

Rendahnya rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah PDRB belum mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat. Di samping itu kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (i) Kurangnya kepatuhan pajak masyarakat; (ii) Keterbatasan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi, menagih, dan menindaklanjuti pajak daerah yang belum dibayar dengan efektif; (iii) Keterbatasan teknologi pengelolaan data pajak sehingga proses pengumpulan pajak belum efektif dan terjadi risiko kehilangan data; (iv) Ketidakpastian regulasi dan kebijakan sehingga dapat membingungkan bagi wajib pajak dan mengurangi kepatuhan pajak.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

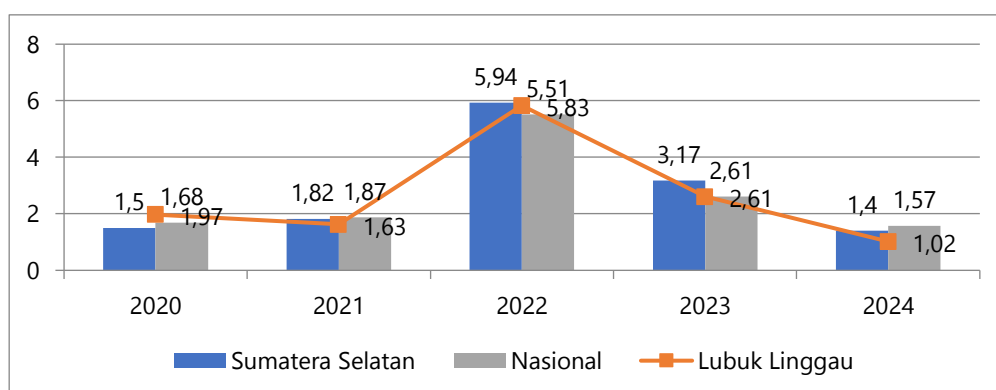
Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat inflasi di Kota Lubuk Linggau mengalami fluktuasi, mengikuti pola yang juga terlihat di tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,97 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional (1,68 persen) dan Sumatera Selatan (1,5 persen).

Tahun 2022 menjadi puncak inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir, dengan capaian 5,83 persen, yang dipengaruhi oleh tekanan harga secara nasional akibat faktor global maupun domestik. Meskipun tinggi, angka ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan (5,94 persen) namun lebih tinggi dari nasional (5,51 persen).

Setelah itu, inflasi mulai melandai. Pada 2023, inflasi Kota Lubuk Linggau turun menjadi 2,61 persen, sejalan dengan tren nasional, dan kembali menurun ke 1,02 persen pada 2024, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, Kota Lubuk Linggau mampu menjaga stabilitas harga dengan cukup baik, terutama di tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam mengelola tekanan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok tetap lancar.

Gambar 2.40. Perkembangan Inflasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Survey Penilaian Integritas

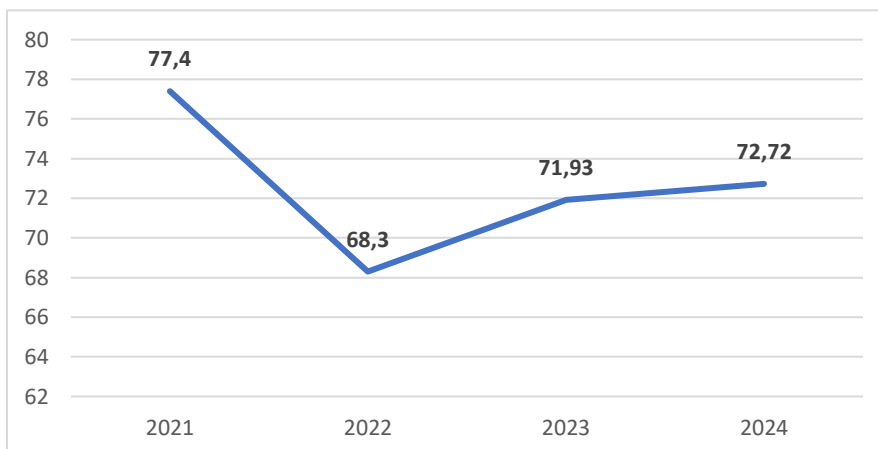
Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) Kota Lubuk Linggau dalam periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, nilai SPI berada pada angka 77,4, yang mencerminkan tingkat integritas pemerintahan daerah berada pada kategori baik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 68,3, menandakan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Memasuki tahun 2023, nilai SPI kembali mengalami peningkatan menjadi 71,93, diikuti dengan kenaikan moderat pada tahun 2024 yaitu 72,72. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek pencegahan korupsi, transparansi, serta kualitas layanan publik. Meskipun belum kembali mencapai capaian tertinggi pada 2021, tren dua tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya perbaikan integritas di Kota Lubuk Linggau mulai memberikan hasil yang positif.

Lebih lanjut perkembangan capaian SPI Kota Lubuk Linggau tahun 2021 sampai dengan 2024 ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.41.

Perkembangan SPI Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Sumber: Inspektorat Kota Lubuk Linggau, 2025

Fluktuasi capaian SPI ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penurunan pada 2022 kemungkinan terkait dengan masih adanya potensi praktik maladministrasi, kurang optimalnya sistem pengendalian internal, atau persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang belum konsisten. Sementara itu, kenaikan pada 2023 dan 2024 menunjukkan adanya faktor pendorong seperti penguatan komitmen pimpinan daerah, peningkatan implementasi sistem pengawasan dan keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, capaian SPI Kota Lubuk Linggau memperlihatkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan, arah perbaikan telah kembali ditunjukkan melalui peningkatan skor dalam dua tahun terakhir. Tantangan ke depan adalah memastikan tren positif ini terus berlanjut melalui konsistensi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mengembalikan bahkan melampaui capaian terbaik yang pernah diraih pada 2021.

B. Indeks Reformasi Hukum

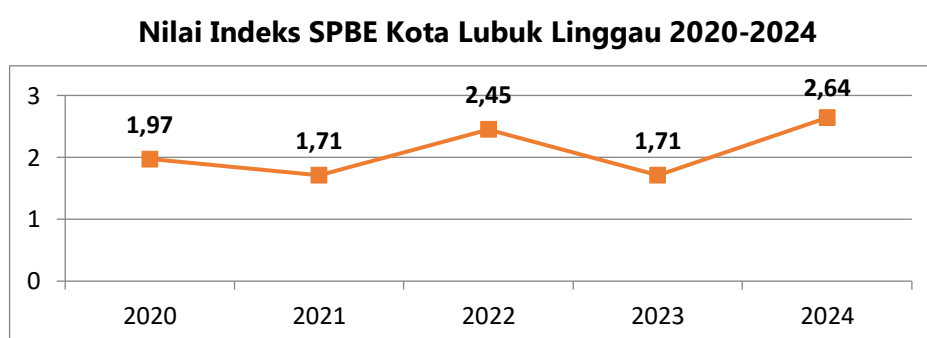
Indeks Reformasi Hukum sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan agenda reformasi di sektor hukum. Indeks ini dibentuk dari beberapa komponen utama, antara lain perencanaan dan pelaksanaan reformasi hukum, pembenahan kelembagaan dan regulasi, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Indeks Reformasi Hukum Kota Lubuk Linggau menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks ini berada di angka 79, dan meningkat menjadi 87,52 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 8,52 poin ini mencerminkan adanya perbaikan yang nyata dalam berbagai aspek reformasi hukum, termasuk peningkatan transparansi, efektivitas kelembagaan, serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Peningkatan ini juga menjadi indikator positif atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa yang akan datang. Evaluasi SPBE tahun 2020 menunjukkan Pemerintah Kota Lubuk Linggau memperoleh nilai 1,97 dengan predikat kurang, dan di tahun 2024 Kota Lubuk Linggau dapat memperoleh predikat Cukup dengan nilai sebesar 2,64. Beberapa domain yang lemah yaitu Manajemen SPBE yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen SPBE belum optimal. Domain kedua yang masih rendah yaitu Tata Kelola SPBE, oleh karena itu perlu dioptimalkan aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggara SPBE.

Gambar 2.42.



Sumber : Kemenpanrb, 2025

D. Tata Kelola Pemerintahan

Kota Lubuk Linggau menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek terkait kualitas pelayanan publik dan kapasitas birokrasi antara tahun 2020 hingga 2024. Salah satunya adalah peningkatan yang signifikan pada Indeks Reformasi Birokrasi, yang naik dari 53,72 pada

tahun 2020 menjadi 68,17 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah kota dalam melakukan reformasi birokrasi, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik secara keseluruhan. Di sisi lain, Indeks Pelayanan Publik (IPP) sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, tetapi kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 4,44. Meskipun ada fluktuasi ini, angka tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelayanan, meskipun penurunan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan angka yang relatif tinggi, meskipun terjadi penurunan kecil pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara umum, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa sektor. Nilai SAKIP yang stabil pada "BB" menunjukkan pengelolaan akuntabilitas kinerja yang cukup baik, meskipun ada potensi untuk peningkatan lebih lanjut dalam pelaporan dan pengawasan kinerja. Indeks Kapasitas Birokrasi yang terus meningkat juga mencerminkan adanya perbaikan dalam kapasitas aparat pemerintahan untuk menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, perbaikan yang terlihat pada semua indikator ini menunjukkan upaya yang kuat dan terencana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas birokrasi di Kota Lubuk Linggau. Meskipun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi kinerja, terutama di sektor pelayanan publik, serta terus mengoptimalkan reformasi birokrasi agar dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Kenaikan nilai indeks yang signifikan menunjukkan bahwa Kota Lubuk Linggau berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

Lebih lanjut, hasil kinerja tata kelola pemerintahan Kota Lubuk Linggau disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.33.

**Hasil Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53,72	54,34	55,47	57,50	68,17
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,84	4,09	4,26	3,41	4,44
	Nilai	CB	A-	A-	A-	A-
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,76	78,88	79,97	81,59	78,88
Nilai SakiP	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	58,06	66,2	67	68	69

Sumber: KemenpanRB dan Bappedalitbang, 2024

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, adil, dan berkeadilan hukum. Persentase penegakan Perda dapat menjadi indikator efektivitas kinerja aparat penegak hukum di tingkat daerah, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berperan langsung dalam menindak pelanggaran. Dalam banyak kasus, tingkat keberhasilan penegakan Perda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosialisasi yang minim, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Data lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan bahwa tingkat penegakan Perda di Kota Lubuk Linggau telah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara penyusunan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan. Sehingga pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan berkeadilan.

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Lubuk Linggau digambarkan dengan pencapaian Nilai Peduli HAM. Nilai Peduli HAM merupakan gambaran upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Selama lima tahun terakhir, Kota Lubuk Linggau selalu mendapat predikat sebagai Kota Peduli HAM. Lebih lanjut, perkembangan Nilai Peduli HAM Kota Lubuk Linggau dan parameter penilaiannya tahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.34.
Perkembangan Nilai Peduli HAM Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2023

Parameter Penilaian	Satuan	2020	2021	2022	2023
Hak atas Bantuan Hukum	nilai	-	100	100	80
Hak atas Informasi	nilai	-	85	100	100
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	nilai	-	50	100	80
Hak atas Keberagaman dan Pluralisme	nilai	-	65	50	50
Hak atas Kependudukan	nilai	-	90	90	95
Hak atas Kesehatan	nilai	-	92	92	95,5
Hak atas Pendidikan	nilai	-	74	74	73
Hak atas Pekerjaan	nilai	-	65	62	61
Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang Layak	nilai	-	66	97	90
Hak Perempuan dan Anak	nilai	-	65	85	88
Implementasi Aksi HAM	nilai	-	7	10	10
Nilai Peduli HAM	nilai	-	82,2	95,0	91,25
Kriteria Peduli HAM		Peduli HAM	Peduli HAM	Peduli HAM	Peduli HAM

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau, 2025

Nilai Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Lubuk Linggau menunjukkan peningkatan yang positif antara tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, nilai untuk peduli HAM tercatat pada angka 82,2, yang mencerminkan upaya awal dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Nilai ini kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 95,0, menunjukkan adanya upaya yang lebih konsisten dalam memenuhi kriteria peduli HAM, baik dari segi kebijakan, implementasi, maupun pengawasan terhadap hak-hak masyarakat.

Namun, pada tahun 2022, nilai Peduli HAM sedikit mengalami penurunan menjadi 91,25. Penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya, meskipun angka ini masih tergolong tinggi dan menunjukkan adanya kesadaran yang kuat terhadap pentingnya perlindungan HAM di tingkat pemerintahan. Meskipun demikian, pada tahun 2023, nilai Peduli HAM kembali berada pada tingkat yang tinggi, mengindikasikan bahwa Kota Lubuk Linggau berhasil mengatasi tantangan yang ada dan melanjutkan komitmennya dalam melindungi dan menghormati hak-hak warganya.

Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit fluktuasi, nilai Peduli HAM yang tinggi pada tahun-tahun tersebut menggambarkan adanya peningkatan komitmen dan perhatian yang serius terhadap perlindungan hak-hak manusia di Kota Lubuk Linggau. Ke depan, untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai ini, penting bagi pemerintah kota untuk

terus berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan memperbaiki kebijakan serta mekanisme yang mendukung pelaksanaan hak asasi manusia secara lebih efektif.

C. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks keamanan dan ketertiban umum. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari ancaman kejahatan, kekerasan, dan gangguan sosial lainnya. Rasa aman tidak hanya bergantung pada kenyataan objektif seperti jumlah kasus kriminal, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap kehadiran dan responsivitas aparat keamanan serta keberfungsian lingkungan sosialnya.

Perkembangan Indeks Rasa Aman di Kota Lubuk Linggau digambarkan dengan indikator terkait keamanan dan ketertiban daerah, diantaranya melalui: 1) Jumlah Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan); dan 2) Angka kriminalitas.

Tabel 2.35.

**Kondisi Keamanan dan Ketertiban Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) ¹	Angka	229	122	190	121	118
2	Angka kriminalitas ³	angka	305	312	406	337	-

*Sumber : 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau, 2025
2) BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024*

Selama periode 2020–2024, kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren membaik. Jumlah pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keindahan (K3) menurun dari 229 kasus pada 2020 menjadi 118 kasus pada 2024, menandakan peningkatan kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan aturan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, angka kriminalitas sempat meningkat dari 305 kasus pada 2020 menjadi 406 kasus pada 2022, namun menurun menjadi 337 kasus pada 2023, yang mencerminkan perbaikan situasi keamanan pasca-pandemi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat semakin optimal, meskipun pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan tetap perlu diperkuat secara berkelanjutan.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang digunakan untuk memetakan tingkat daya saing daerah baik level propinsi dan kabupaten Kota, sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan indeks tingkat daya saing daerah sebagai salah satu entry point dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. IDSD selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar kajian, perencanaan, dan kebijakan pembangunan di daerah.

Perkembangan IDSD Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami perbaikan, dengan nilai tertinggi tahun 2024 sebesar 3,92 yang termasuk dalam kategori "Tinggi".

Tabel 2.36.
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024

		2020	2021	2022	2023	2024
IDSD	nilai	2,84	2,09	3,01	3,4	3,92
	kategori	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

A. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah secara objektif dan terukur. Sub bab ini menyajikan data dan analisis mengenai capaian IKK Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan di berbagai sektor prioritas, serta menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif di masa mendatang.

Tabel 2.37.

Indikator Kinerja Kunci Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
I Indikator Makro							
1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Rp (Juta)	4.333,78	4.470.230	4.671.890	4.879.450	5.105.056
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,13	3,15	4,51	4,44	4,62
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,99	77,09	77,71	78,36	78,98
4	Angka Kemiskinan	%	12,71	13,23	12,68	12,65	11,14
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,41	6,27	5,94	5,64	5,29
6	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,34	0,36	0,366	0,37	0,353
II Indikator Kinerja Daerah Pada Masing-Masing Urusan							
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,13	3,15	4,51	4,44	4,62
2	Laju inflasi	%	1,97	1,63	5,83	2,61	1,02
3	PDRB per kapita (ADHK)	Rp.	18.509,86	19.875.270	19.446.923	20.082.020	20.748
4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	21,56	21,90	22,51	23,18	23,67
5	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	%	18,49	18,38	17,74	17,5	17,46
6	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	7,02	7,04	7,13	7,27	7,16
II. Kesejahteraan Sosial							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks	76,99	77,09	77,71	78,36	78,98
2	Angka melek huruf	%	99,06	99,09	98,48	99	98,81
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,90	9,91	9,93	9,94
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,38	13,39	13,55	13,69
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,41	6,27	5,94	5,64	5,29
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,42	1,14	1,44	1,3	02.09
III.	Seni Budaya dan Olahraga						
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	-80	-	0	0	0
2	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	cabor	0	33	0	3	5
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
I.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Produktifitas Pangan Utama	Ton/Ha	11,04	15,30	16,4	17,2	12,14
II.	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur						
1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	76,18	45,28	53,34	50,29	40,16
2	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	kawasan	0	0	0	0	0
III.	Fokus Iklim Berinvestasi						
1	Nilai ICOR	Nilai	n/a	14,85	10,05	9,68	9,3
2	Angka kriminalitas	Jumlah Angka	305	312	406	337	n/a
3	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	%	84,96	86,54	86,64	87,84	90
IV.	Fokus Sumber Daya Manusia						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sumber Daya Manusia	Indeks	74,78	73	76,3	77,11	77,58
2	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,701	0,70	0,702	0,707	0,712
3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,758	0,76	0,83	0,841	0,846
ASPEK PELAYANAN UMUM							
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1	Rata-Rata Lama Sekolah	nilai	9,89	9,90	9,91	9,93	9,94
2	Harapan Lama Sekolah	nilai	13,37	13,38	13,39	13,55	13,69
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	74,7	75,31	n/a	n/a	n/a
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	96,24	92,34	n/a	96,24	95,08
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	78,4	96,37	n/a	78,4	73,23
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0	53,63	55,08	70,29	69,52

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kesehatan						
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,75	73,88	74,27	74,67	74,97
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	144	141,81	45,2	159,2	68
3	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	0,5	2,40	0,69	6,36	6,1
4	Pravelensi Stunting Pada Balita	%	19	22,80	11,7	17,5	20,9
5	Prevalensi Balita gizi Buruk	%	1,9	0	1,27	0	n/a
6	Angka Kematian balita (Per 1000 balita)	Nilai	4,79	0	0	0	n/a
7	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79,2	80,73	84	82	82
8	IR DBD Per 100.000 Penduduk	nilai	64,1	40	91	45,2	116,99
9	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,01	0,04	0,006	n/a	n/a
10	Insiden TB Per 100.000 Penduduk	nilai	125	126	0	n/a	n/a
11	Kasus Malaria Per 1000 penduduk	kasus	0,01	0	0	0,8	0,8
12	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1,39	2,09	0,24	0,02	0,02
13	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	66,70	75	100	100
14	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	62,1	93,65	99,55	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
15	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	93,2	95,39	96,64	100	100
16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	94,6	96,83	100	100	100
17	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	39,4	91	96,5	95,12	95,12
18	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,94	100	92,45	100	100
19	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75	75	52,47	82,58	82,58
20	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	56,9	75,04	95,24	96,85	96,85
21	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	15,5	60	56	90,47	90,47
22	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	47	47	50	93,04	93,04

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
23	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	61,14	66	69,93	100	100
24	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	18	18,50	95,97	96,18	96,18
25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	18	18	49,71	99,44	99,44
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	76	76,15	33,33	33,33	30,86
2	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap	%	62	62,70	73,76	73,76	50,37
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	%	70,83	70,83	100	100	100
4	Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	29,17	29,17	100	100	100
5	Persentase Legalitas Tanah	%	0	0	20	20	20
6	Prosentasi layanan sanitasi skala perkotaan	%	23	23,38	42,04	42,04	27
7	Prosentase Penduduk berakses air minum Perpipaan	%	39	39,63	100	100	38,32

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Standar	%	0	0	29,51	29,51	29,51
9	Persentase Penurunan Titik Rawan Bencana Akibat Daya Rusak Air	%	22	22,24	78	78	78
10	Prosentase jaringan Irigasi Fungsional	%	40	40,60	11,32	11,32	25,54
11	Persentase penyedia usaha jasa konstruksi daerah berdaya saing	%	0	0	87,91	87,91	87,91
12	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	10,47	10,47	85,45	85,45	85,45
13	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	85	85	0	0	0
14	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	82	82,89	100	100	100
15	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	0	1,94	1,94	1,94
16	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
17	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
18	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	99	99	11,32	11,32	11,32
19	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	0	0	87,91	87,91	87,91
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai (diatas 70%)	%	72,84	96,95	92,36	92,36	89,59
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,5	95,31	99,2	99,2	94,19
3	Cakupan MBR mendapatkan Akses Bantuan Peningkatan RTLH	rumah	-	126	560	560	90
4	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	0	100	100	100
5	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	-	0	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	-	0,45	48,24	48,24	48,24
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	-	3,09	75,39	75,39	75,39
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	11,33	90,87	90,87	90,87
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	%	73,24	64,44	100	81,44	100
2	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu	%	-	0	79	0	90
3	Zero Konflik Antar Umat Beragama	%	100	100	100	100	100
4	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	angka	2,41	13,56	6,27	0	0
5	Persentase penanganan bencana	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	76,06	76,06	76,06

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	40	40	100	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	88	100	100	100	100
	Sosial						
1	Persentase PMKS yang mampu keluar dari Permasalahan Sosial	%	88,6	89,49	90,34	100	100
2	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	Kelompok lembaga	255	211	320	222	222
3	Persentase PMKS yang Mandiri	%	-	89,49	90,34	90,34	90,34
4	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	-	89,40	92,95	92,95	92,95

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
II.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	66,67	66,67	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	12,94	12,94	32	32	91,49
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	-	3,36	72,08	72,08	72,08
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	15	15,50	26,3	26,3	7,73
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	IPG (indeks pembangunan gender)	%	96,23	96,29	96,53	96,3	96,21
2	IDG (indeks pemberdayaan gender)	%	59,79	60,81	66,28	65,59	73,09
3	Rasio anak yang mengalami kekerasan per 1.000 jumlah anak	nilai	-	0,21	5,9	0,0003	0,0002

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	-	0,30	n/a	n/a	n/a
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	-	0,04	0,02	0,02	n/a
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	-	8,91	0	0	n/a
3	Pangan						
1	Rasio kecukupan pangan	nilai	0,015	0,92	0,91	0,91	1
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	-	88,80	92,3	92,3	92,43
3	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	71.678	7.625	100	50,533	
4	Pertanahan						
1	Persentase Legalitas Tanah	%	-	-	20	20	20
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	100	100	100
5	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,4	60,43	60,43	66,79	71,83
2	Indeks pencemaran air	Nilai	65	55,00	55	68,82	68,82
3	Indeks pencemaran udara	Nilai	84,92	85,57	85,57	86,64	91,2
4	Indeks tutupan lahan	Nilai	88,56	23,26	89,04	26,57	41,15
5	Tingkat penurunan emisi GRK	%	0	0	2	2	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	-	74,90	80	80	n/a
6	Administrari Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	83,22	84,19	100	100	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	-	38,71	50	50	50
3	Perekaman KTP elektronik	%	-	96,29	98,77	98,77	99,18
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	-	97,35	98	98	100,35
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	51,28	86,96	86,96	86,96
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Nilai swadaya masyarakat	(juta) Rupiah	1.238	1.800	2.000	2.000	2.000
2	Rata-rata nilai gotong-royong kelurahan per tahun	rupiah	-	25	5	5	5
3	Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna	Orang/kl p	-	8	32	32	32

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase rencana kegiatan pembangunan kelurahan berbasis swadaya masyarakat	%	20	20	20	20	20
5	Jumlah lembaga masyarakat dalam penerapan 10 program pokok PKK	kelompok	81	81	81	81	81
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate</i>)	Per 1000 penduduk	17,41	18,08	18,3	18,36	18,22
2	Rata-rata jumlah anak perkeluarga/TFR	Jumlah Anak	2,23	1,83	1,8	18,36	1,77
3	Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	%	12,17	7,92	23,32	8,98	4,88
4	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,23	2,38	2,44	2,23	2,23
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	41,82	84,74	79,64	64,5	64,5
9	Perhubungan						
1	Angka kecelakaan lalu lintas	angka	52	78,00	85,03	0,48	n/a
2	Rasio jumlah angkutan umum terhadap jumlah penduduk	rasio	0,001	0,0004	0,0001	0,001	n/a
3	IKM layanan transportasi angkutan perkotaan	indeks	81	81,20	78	81,19	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	-	0,48	56	56	n/a
5	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		-	0,43	46,05	46,05	n/a
10	Komunikasi dan Informatika						
1	Indeks SPBE	nilai	1,97	3	2,45	3,16	2,64
2	Nilai Selft Assesment SPBE	nilai	2,86	2,53	3	3	3
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	indeks	-	73,10	76	76	n/a
4	Data informasi yang dipublikasikan	%	-	75	70	70	n/a
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	2,50	2,7	2,7	n/a
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
1	Persentase Koperasi Sehat	%	12,92	134,90	19,2	19,2	12,8
2	Persentase koperasi aktif	%	53,3	78,20	54	57	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Rasio	24,77	14,40	12,46	11,01	n/a
4	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Rasio	0,388	0,87	1,02	11	n/a
12	Penanaman Modal						
1	Jumlah nilai investasi	Rp(juta)	586.351,54	1.077.668,92	2.755.702,29	1.069.476,47	1.642.353,18
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-	46,95	100	100	100
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Jumlah Pemuda Kader Berprestasi	orang	189	415	275	275	n/a
2	Persentase Wirasusaha Muda	%	17,69	19,22	19	19	19,19
3	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	cabor	4	33	85	85	5
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		-	6,02	3,85	3,85	3,85
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		-	5,01	6,54	6,54	6,54
14	Statistik						
1	Persentase data dan informasi yang dipublikasikan	%	70	70	85	85	85
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	0	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	0	100	100	100
15	Persandian						
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	indeks	13	13	16	16	14
16	Kebudayaan						
1	Kekayaan Budaya daerah ditetapkan	nilai	4	4	4	4	4
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	-	67,85	62,4	62,4	62,4
17	Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	-	58,56	281938	281938	n/a
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	12,43	12,43	12,43	n/a
18	Kearsipan						
1	Indeks Arsip	indeks	84,88	88	C	79	79
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	0	0	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0	0	89,4	89,4	89,4
III.	Urusan Pilihan						
1	Pariwisata						
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	100886	176.712	194.218	181.354	208.768
2	Produk wisata unggulan daerah	%	50	50	50	50	50
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	-30,18	2	2	2
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	12	12	12	12	12
2	Pertanian						
1	Produktifitas Pangan Utama	Ton/Ha	11,04	15,30	16,4	16,4	12,14
2	Produktifitas Tanaman Holtikultura	Ton/Ha	68,67	56,60	57,03	57,03	4,84
3	Produktifitas Perkebunan	Ton/Ha	0,69	6,10	6,3	6,3	2,72
4	Produktifitas Tanaman Biofarmaka	Ton/Ha	8,70	11,30	11,3	11,3	7,72
5	Produktifitas Peternakan	Ton/Ha	1710,56	1.980,00	1,98	1,98	1,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ha/thn	11,04	4,14	16,4	16,4	16,4
3	Perdagangan						
1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	21,56	21,90	22,51	23,18	23,67
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	95	83,07	100	29,21	29,21
4	Perindustrian						
1	Persentase Peningkatan Omset IKM	%	0	0	60	60	60
2	Persentase IKM yang masuk Pasar modern	%	-	3	3	3	3
3	Tingkat inflasi harga pokok dan penting	%	1,97	0,45	5,22	5,22	5,22
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	-	100	10,4	10,4	10,4
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100
5	Kelautan dan Perikanan						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat konsumsi ikan	gram/kap /hari	160	42	4775	51,18	52,23
2	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	3.284	3.551	49,1	4.191,12	4.317,50
IV.	Fungsi Penunjang						
1	Perencanaan Pembangunan						
1	Nilai SAKIP pada Aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	28,3	25,60	28	25,74	25,85
2	Nilai aspek perencanaan strategis	Nilai	9,5	8,68	8,99	22,69	n/a
3	Nilai Aspek Perencanaan Kinerja Tahunan	Nilai	18,8	18,16	18,16		n/a
4	Nilai SAKIP pada Aspek Pengukuran Kinerja	Nilai	20,31	20,94	23,49	21,34	21,43
5	Nilai Aspek Pemenuhan Pengukuran Kinerja	Nilai	5	4,81	4,81	3,97	n/a
6	Nilai Aspek Kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai	10,63	9,84	11,74	5,64	n/a
7	Nilai Aspek Implementasi Pengukuran Kinerja	Nilai	4,69	4,17	7,05	10,79	n/a
2	Keuangan						
1	Pertumbuhan PAD	%	-14,5	0,49	-0,19	-0,19	11,86
2	WTP dengan nilai tinggi	%	WTP	93,30	93,25	93,25	n/a
3	Rasio belanja pegawai terhadap belanja modal	rasio	3,77	1,05	0,84	0,84	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase belanja modal terhadap belanja APBD	%	32,8	35	37	37	29,62
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
1	Rata-rata Nilai Kerja ASN	angka	82,49	91,45	88	88	88
2	Rata-rata nilai Capaian Target Kinerja	angka	82,49	91,45	79	79	79
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	41,77	62,99	50,12	50,12	50,12
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	7,1	6,76	6,76	6,76	6,76
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	100	98,03	100	100	100
4	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang menjadi masukan perumusan kebijakan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan inovasi oleh stakeholder	%	23,08	50,57	49,67	76,92	76,92
5	Inspektorat						
1	Maturity Level SPIP	level	3	3	3	3	3,298
6	Sekretariat DPRD						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Legislasi Daerah	%	35,29	74	33,33	82	73
7	Sekretariat Daerah						
1	Nilai Rata-rata Profesionalisme Aparatur Pelayan	Nilai	86,6	87	90	90	90
2	Persentase Kecukupan SDM Aparatur Pelayan UPP	%	80	80	80	80	80
3	Persentase UPP yang menerapkan budaya pelayan	%	80	80	80	80	80
4	Rata-rata Pemenuhan dan Kualitas Sarana Prasarana Yanlik	Nilai	1,5	2,50	3	3	3
5	Persentase UPP Yang Menerapkan Prinsip Pemenuhan Sarana Prasarana Yanlik	%	80	80	80	80	80
6	Persentase UPP yang memiliki Sarana Prasarana Yanlik dalam kondisi baik	%	80	80	80	80	80
7	Persentase Pelayan per Jenis Layanan Selesai Tepat Waktu	%	80	80	80	80	80
8	Nilai Rata-Rata Penerapan Kebijakan Pelayan UPP	nilai	71,5	72,50	75	75	75
9	Persentase UPP yang telah Menerapkan Standar Pelayan per Jenis Layanan	%	80	80	80	80	80
10	Nilai aspek inovasi	nilai	0	0	B	B	B
11	Nilai aspek sistem informasi	nilai	0	0	B	B	B

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase ketersediaan regulasi/kebijakan pendukung penerapan inovasi	%	80	80	80	80	80
13	Persentase ketersediaan regulasi/kebijakan pendukung penerapan inovasi	%	80	80	80	80	80
14	Persentase UPP yang memiliki inovasi layanan	%	80	80	80	80	80
15	Persentase UPP yang memiliki sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	%	85	85	85	85	85
16	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Komponen SAKIP	Nilai	11,81	11,86	14	14	14
17	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
18	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Data Kinerja Secara Berkala	%	85	85	90	90	90
19	Persentase Kecukupan SDM Pelaporan Kinerja Daerah sesuai Kebutuhan	%	85	85	85	85	85
20	Persentase organisasi tepat fungsi tepat ukur	%	20	30	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
21	Persentase Kesesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
22	Persentase Penerapan Tugas Fungsi sesuai tugas jabatan	%	100	100	100	100	100
23	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pejabat sesuai dengan Peta Jabatan	%	100	100	100	100	100
24	Persentase tingkat harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100
25	Persentase perangkat daerah yang memiliki aparatur penyusunan produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100
26	Nilai Capaian Aksi HAM Daerah	nilai	0	A	A	A	A
27	Persentase Capaian Pengendalian Kegiatan Pembangunan	%	85	85	90	90	90
28	Persentase Perangkat Daerah yang mengupload struktur anggaran melalui Sismonteptra	%	100	100	100	100	100
29	% pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP	%	100	100	100	100	100
30	Persentase pengadaan barang/jasa perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
31	Laju Inflasi Daerah	%	0,39	0,35	0,1	0,1	0,1
32	Rekomendasi stake holder yang ditindaklanjuti sebagai Kebijakan Daerah	rekomen dasi	100	100	100	100	100
33	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	%	85	85	85	90	90
34	Persentase Lembaga Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri	%	100	100	100	100	100
35	Persentase Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang kesra	%	100	100	100	100	100
8	Kecamatan						
1	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	%	100	100	95	100	100
2	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	%	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	%	100	100	85	100	100
4	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	%	81	81	100	90	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	%	81	81	100	100	100
6	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	%	97	97,14	85	100	100
7	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	%	95	95,99	85	100	100
8	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	%	90	90	100	100	100
9	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	%	90	90	100	100	100
10	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	%	100	100	100	100	100
11	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	%	100	100	100	100	100
12	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	%	85	85	85	90	90

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Dalam rangka penyajian RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi prioritas utama dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi kinerja keuangan masa lalu akan dilakukan untuk menilai pencapaiannya dalam pelaksanaan APBD dan kondisi neraca, guna memahami perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perencanaan ke depan akan mengutamakan optimasi pendapatan melalui peningkatan pajak, perluasan sektor ekonomi dan pariwisata, serta pengelolaan pengeluaran yang tepat sasaran untuk infrastruktur dan layanan publik. Manajemen utang yang bijaksana serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan akan diperkuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara efektif. Kebijakan fiskal yang responsif juga akan diterapkan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi.

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua Penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Selain itu, untuk peningkatan pendapatan daerah juga memerlukan Kebijakan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja.

Realisasi pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi dalam pencapaiannya. Meskipun terjadi fluktuasi dalam realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut umumnya berada di bawah target yang ditetapkan.

Tabel 2.38.
Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah / Berkurang
2020	1.105.166.576.137,54	1.026.932.400.770,59	92,92	(78.234.175.366,95)
2021	1.019.618.461.467,32	955.956.405.192,69	93,76	(63.662.056.274,63)
2022	1.090.512.850.566,00	1.060.499.402.627,54	93,90	(66.492.084.094,46)
2023	1.089.994.942.790,00	954.945.198.504,25	87,61	(135.049.744.285,75)
2024	1.413.034.479.157,00	1.181.188.084.371,00	83,59	(231.846.394.786,00)

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2025

Realisasi pendapatan daerah dapat kita lihat dari Tabel diatas pada tahun 2020 capaian realisasi anggaran Kota Lubuk Linggau 93,76 persen yang kemudian di Tahun 2021 meningkat menjadi 92,92 persen dan kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 93,90 persen. Selanjutnya di tahun 2023 dan tahun 2024 menurun menjadi 83,59 persen. Ditargetkan realisasi pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau dapat terus meningkat, dengan capaian realisasi mencapai 100 persen atau pun lebih. Peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun pendapatan daerah yang sah lainnya.

Untuk melihat laju pertumbuhan pendapatan belanja daerah dilihat dari perkembangannya dengan menggunakan data realisasi pendapatan lima tahun ke belakang. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2.39. berikut ini.

Tabel 2.39. Realisasi APBD Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	PENDAPATAN	1.026.932.400.770,59	955.956.405.192,69	1.060.499.402.627,54	954.945.198.504,25	1.181.188.084.370,00
	A. Pendapatan Asli Daerah	86.319.561.348,87	128.297.636.758,39	104.399.965.189,33	120.635.271.549,61	141.888.666.155,00
	B. Pendapatan Transfer	908.254.490.662,72	798.265.268.434,30	956.099.437.438,21	834.309.926.954,64	1.039.299.418.215,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.358.348.759,00	29.393.500.000,00	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.026.932.400.770,59	955.956.405.192,69	1.060.499.402.627,54	954.945.198.504,25	1.181.188.084.370,00
2	BELANJA	1.020.618.632.365,77	948.463.242.185,50	1.162.820.849.448,20	950.238.615.139,35	1.154.488.342.583,00
	A. Belanja Operasi	649.922.142.865,50	616.328.781.044,50	733.970.779.361,20	684.616.292.876,00	757.082.765.098,00
	B. Belanja Modal	334.867.453.980,27	331.394.237.141,00	428.202.927.087,00	264.268.828.263,35	395.565.510.824,00
	C. Belanja Tak Terduga	35.331.443.920,00	740.224.000,00	647.143.000,00	1.353.494.000,00	1.840.066.661,00
	D. Belanja Transfer	497.591.600,00	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	1.020.618.632.365,77	948.463.242.185,50	1.162.820.849.448,20	950.238.615.139,35	1.154.488.342.583,00
	SURPLUS/DEFISIT	6.313.768.404,82	7.493.163.007,19	-102.321.446.820,66	4.706.583.364,90	26.699.741.787,00
3	PEMBIAYAAN	5.832.396.092,82	20.947.515.697,64	133.446.731.404,83	59.550.781.706,17	38.489.885.777,00
	A. Penerimaan Pembiayaan	832.396.092,82	20.716.265.697,64	133.446.731.404,83	31.125.284.584,17	7.480.252.553,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	231.250.000,00	0	28.425.497.122,00	31.009.633.224,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	5.832.396.092,82	20.947.515.697,64	133.446.731.404,83	59.550.781.706,17	38.489.885.777,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-4.167.603.907,18	20.485.015.697,64	133.446.731.404,83	2.699.787.462,17	-23.529.380.671,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.146.164.497,64	27.978.178.704,83	31.125.284.584,17	7.406.370.827,07	3.170.361.116,00

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuk Linggau menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah fluktuasi ekonomi nasional maupun global. Total pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,03 triliun, menurun pada tahun 2021 menjadi Rp955,96 miliar, kemudian kembali meningkat signifikan pada 2022 mencapai Rp1,06 triliun, sedikit turun pada 2023 sebesar Rp954,95 miliar, dan melonjak pada tahun 2024 menjadi Rp1,18 triliun.

Kenaikan pendapatan pada 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp141,89 miliar, naik sekitar 17,6 persen dibanding tahun 2023. Selain itu, pendapatan transfer juga mengalami peningkatan dari Rp834,31 miliar pada 2023 menjadi Rp1,04 triliun pada 2024. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak terealisasi sejak tahun 2022, seiring dengan penyederhanaan sumber pendapatan dan perubahan regulasi transfer pusat ke daerah.

Realisasi belanja daerah menunjukkan pola yang relatif fluktuatif, sejalan dengan perubahan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Total belanja tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,02 triliun, menurun pada 2021 menjadi Rp948,46 miliar, lalu meningkat tajam pada 2022 menjadi Rp1,16 triliun. Pada 2023 belanja kembali turun menjadi Rp950,24 miliar, kemudian naik lagi pada 2024 menjadi Rp1,15 triliun.

Komposisi belanja didominasi oleh belanja operasi, yang setiap tahunnya menyerap lebih dari 60 persen total belanja, mencerminkan dominasi belanja rutin untuk pelayanan publik, gaji pegawai, dan operasional pemerintahan. Belanja modal sempat mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp428,20 miliar, menunjukkan fokus pemerintah pada

pembangunan infrastruktur, sebelum menurun di 2023 dan kembali meningkat pada 2024.

Keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan posisi surplus atau defisit anggaran yang berfluktuasi. Tahun 2020 dan 2021 mencatat surplus kecil, masing-masing sebesar Rp6,31 miliar dan Rp7,49 miliar. Namun pada 2022 terjadi defisit besar hingga Rp102,32 miliar, seiring dengan lonjakan belanja modal dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Tahun 2023 kembali mencatat surplus Rp4,71 miliar, dan meningkat pada 2024 menjadi Rp26,70 miliar. Untuk menutup defisit dan menjaga keseimbangan anggaran, pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan netto, yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp133,45 miliar, sejalan dengan tingginya kebutuhan investasi daerah. Pada 2024 pembiayaan netto justru mencatat nilai negatif (-Rp23,53 miliar) karena sebagian besar pembiayaan diarahkan untuk pelunasan kewajiban tahun sebelumnya.

Nilai SiLPA cenderung berfluktuasi, mencerminkan efisiensi pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun. SiLPA tertinggi terjadi pada 2021 sebesar Rp27,98 miliar, menunjukkan adanya efisiensi dan sisa dana yang belum terserap. Namun pada 2024 nilainya menurun menjadi Rp3,17 miliar, menandakan pelaksanaan anggaran yang semakin optimal.

Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam periode 2020–2024 menunjukkan arah yang positif dan adaptif terhadap dinamika fiskal nasional. Pendapatan daerah meningkat signifikan di akhir periode, disertai dengan pengelolaan belanja yang lebih efisien dan fokus pada pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Meskipun sempat mengalami defisit besar pada 2022, kemampuan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan anggaran dan meningkatkan PAD menunjukkan penguatan kapasitas fiskal daerah menuju kemandirian yang berkelanjutan.

2.3. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Tabel 2.40. Neraca Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	ASET	2.555.275.274.677,78	2.927.740.480.910,70	3.189.390.752.636,17	3.399.436.284.028,89	3.416.831.115.004,65
	A. Aset Lancar	56.621.230.510,73	53.802.360.600,18	91.547.166.069,81	93.523.870.287,08	87.628.682.549,73
	B. Investasi Jangka Panjang	58.177.890.768,47	68.924.923.992,23	94.303.403.512,64	95.469.113.169,40	96.287.280.254,94
	C. Aset Tetap	2.419.087.052.860,33	2.781.486.206.488,32	2.982.024.202.202,10	3.161.618.859.195,68	3.130.874.184.856,42
	D. Aset Lainnya	21.389.100.538,25	23.526.989.829,97	21.515.980.851,62	48.824.441.376,73	102.040.967.343,56
	JUMLAH ASET	2.555.275.274.677,78	2.927.740.480.910,70	3.189.390.752.636,17	3.399.436.284.028,89	3.416.831.115.004,65
2	KEWAJIBAN	100.752.211.595,05	63.384.448.566,66	40.085.980.851,62	139.983.584.823,00	234.271.712.767,40
	A. Kewajiban Jangka Pendek	100.752.211.595,05	63.384.448.566,66	21.515.980.851,62	46.954.665.347,00	172.252.426.515,40
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	18.570.000.000,00	93.028.919.476,00	62.019.286.252,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	100.752.211.595,05	63.384.448.566,66	40.085.980.851,62	139.983.584.823,00	234.271.712.767,40
3	EKUITAS	2.454.523.063.082,73	2.864.356.032.344,04	3.048.330.225.623,83	3.259.452.699.205,89	3.182.559.402.237,25
	A. Ekuitas	2.454.523.063.082,73	2.864.356.032.344,04	3.048.330.225.623,83	3.259.452.699.205,89	3.182.559.402.237,25
	JUMLAH EKUITAS	2.454.523.063.082,73	2.864.356.032.344,04	3.048.330.225.623,83	3.259.452.699.205,89	3.182.559.402.237,25
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.555.275.274.677,78	2.927.740.480.910,70	3.088.416.206.475,45	3.399.436.284.028,89	3.416.831.115.004,65

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2025

Kondisi neraca keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau selama periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan aset yang konsisten dan pengelolaan keuangan daerah yang relatif stabil, meskipun terdapat dinamika pada sisi kewajiban dan ekuitas. Secara umum, neraca daerah menggambarkan peningkatan kapasitas fiskal dan nilai kekayaan bersih daerah seiring dengan upaya pemerintah dalam memperkuat investasi dan optimalisasi aset daerah.

Total aset daerah mengalami peningkatan signifikan dari Rp2,56 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,42 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 33,7 persen selama lima tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan nilai ekonomi aset tetap dan investasi daerah. Aset tetap merupakan komponen terbesar, dengan nilai mencapai Rp3,13 triliun pada 2024, meningkat dari Rp2,42 triliun pada 2020. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Aset lancar berfluktuasi, meningkat pada 2022 hingga Rp91,55 miliar, kemudian sedikit menurun menjadi Rp87,63 miliar pada 2024, mencerminkan dinamika kas dan piutang jangka pendek. Investasi jangka panjang juga tumbuh dari Rp58,18 miliar pada 2020 menjadi Rp96,29 miliar pada 2024, menunjukkan penguatan peran pemerintah daerah dalam penyertaan modal pada BUMD dan program strategis daerah. Sementara itu, aset lainnya meningkat cukup tajam dari Rp21,39 miliar pada 2020 menjadi Rp102,04 miliar pada 2024, yang menunjukkan adanya kapitalisasi nilai aset non-tetap seperti aset dalam proses pembangunan dan aset nonkeuangan lainnya.

Total kewajiban daerah menunjukkan tren meningkat setelah sempat menurun pada awal periode. Pada tahun 2020 kewajiban tercatat sebesar Rp100,75 miliar, turun menjadi Rp40,09 miliar pada 2022, namun meningkat kembali menjadi Rp234,27 miliar pada 2024.

Kenaikan pada 2024 terutama dipicu oleh peningkatan kewajiban jangka pendek, yang naik signifikan dari Rp46,95 miliar pada 2023 menjadi Rp172,25 miliar pada 2024, kemungkinan terkait dengan kewajiban kepada pihak ketiga, beban belanja yang belum terselesaikan, dan akrual pembayaran proyek. Kewajiban jangka panjang mulai muncul pada 2022 sebesar Rp18,57 miliar dan meningkat hingga Rp93,03 miliar pada 2023, sebelum menurun menjadi Rp62,02

miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemanfaatan pembiayaan jangka panjang secara hati-hati untuk mendukung investasi strategis daerah.

Nilai ekuitas daerah, yang mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, terus meningkat hingga tahun 2023 dan sedikit menurun pada 2024. Pada 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp2,45 triliun, meningkat menjadi Rp3,26 triliun pada 2023, sebelum turun menjadi Rp3,18 triliun di 2024. Kenaikan hingga 2023 menunjukkan akumulasi aset bersih dan peningkatan nilai kekayaan daerah. Penurunan pada 2024 dapat diartikan sebagai konsekuensi dari peningkatan kewajiban jangka pendek dan beban penyusutan aset tetap yang semakin besar seiring bertambahnya jumlah aset yang dimiliki.

Secara keseluruhan, posisi neraca daerah tetap seimbang setiap tahunnya, di mana jumlah aset selalu sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip akuntansi pemerintah yang konsisten dan mencerminkan kesehatan keuangan daerah yang terjaga. Pertumbuhan aset yang disertai dengan pengelolaan kewajiban yang terkendali menandakan kemampuan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menjaga likuiditas serta meningkatkan nilai kekayaan bersih daerah secara berkelanjutan.

Secara umum, selama periode 2020–2024, Pemerintah Kota Lubuk Linggau berhasil meningkatkan nilai aset dan ekuitas daerah secara signifikan, menandakan penguatan struktur keuangan daerah. Meskipun terjadi peningkatan kewajiban di akhir periode, hal tersebut masih dalam batas yang wajar dan menunjukkan adanya aktivitas investasi dan pengembangan aset produktif. Kinerja neraca ini mencerminkan arah kebijakan keuangan daerah yang fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas aset, efisiensi pembiayaan, dan pengelolaan sumber daya keuangan yang akuntabel.

Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Permendagri No 86 Tahun 2017 Analisis neraca daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Adapun analisis rasio keuangan Kota Lubuk Linggau tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.41. Analisis Rasio Keuangan Kota Lubuk Linggau
Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	0,562	0,849	0,747	1,992	0,509
Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	0,347	0,541	0,560	1,375	0,451
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,039	0,022	0,044	0,041	0,069
Rasio Total Hutang terhadap Modal	0,041	0,022	0,046	0,043	0,074

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau (diolah), 2025

Tabel diatas menggambarkan kinerja keuangan Kota Lubuk Linggau pada periode 2020–2024 yang dapat dilihat melalui beberapa indikator rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas (*current ratio* dan *quick ratio*) serta rasio solvabilitas (rasio hutang terhadap aset dan modal). Dari sisi rasio likuiditas, perkembangan *current ratio* menunjukkan fluktuasi cukup tajam. Pada tahun 2020 *current ratio* berada pada angka 0,562 kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 0,849, meskipun sedikit menurun pada 2022 menjadi 0,747. Lonjakan signifikan terjadi pada 2023 hingga mencapai 1,992, menandakan adanya kemampuan likuiditas yang sangat kuat, sebelum kembali turun drastis pada 2024 menjadi 0,509. Tren serupa juga terlihat pada *quick ratio* yang meningkat dari 0,347 di tahun 2020 hingga 0,560 pada 2022, melonjak tajam menjadi 1,375 di tahun 2023, lalu kembali turun menjadi 0,451 pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah sempat memiliki kapasitas likuiditas tinggi pada 2023, namun secara umum kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek masih relatif terbatas karena nilainya cenderung di bawah angka ideal (≥ 2).

Sementara itu, dari sisi rasio solvabilitas, posisi keuangan Kota Lubuk Linggau tergolong sehat karena proporsi hutang terhadap total aset maupun terhadap modal masih berada pada level yang sangat rendah. Rasio hutang terhadap total aset pada 2020 tercatat 0,039, menurun menjadi 0,022 pada 2021, lalu naik bertahap menjadi 0,044 pada 2022, 0,041 pada 2023, dan 0,069 pada 2024. Demikian juga rasio hutang terhadap modal yang relatif stabil pada kisaran 0,041–0,074 sepanjang periode tersebut. Nilai ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pada pembiayaan hutang sangat kecil, sehingga struktur permodalan daerah masih sangat kuat dan minim risiko keuangan.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa kondisi keuangan Kota Lubuk Linggau dalam periode 2020–2024 berada pada posisi aman dari sisi solvabilitas dengan hutang yang relatif rendah, namun tantangan utama terletak pada aspek likuiditas. Fluktuasi tajam pada current ratio dan quick ratio, terutama penurunan signifikan pada 2024, mengindikasikan perlunya penguatan manajemen kas dan optimalisasi pendapatan daerah agar kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek tetap terjaga. Dengan demikian, pengendalian belanja, peningkatan efisiensi pengelolaan aset, serta penguatan PAD menjadi langkah penting untuk memperbaiki kinerja likuiditas tanpa mengorbankan stabilitas struktur keuangan jangka panjang.

2.4. Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Pengelolaan anggaran yang efektif adalah kunci utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Teori ekonomi publik menekankan pentingnya alokasi sumber daya publik yang efisien dan adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan meminimalkan biaya sosial. Dalam konteks ini, proyeksi anggaran dari tahun 2026 hingga 2030 bukan hanya sebagai alat untuk meramalkan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menerapkan strategi yang terukur dan efektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Teori manajemen keuangan publik menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan

daerah. Keputusan keuangan yang baik harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap risiko dan keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dengan belanja yang direncanakan. Proyeksi anggaran yang teliti membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi sumber pendapatan yang optimal serta mengalokasikan belanja dengan efisien, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks regulasi, proyeksi anggaran harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan regulasi ini mengatur tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dengan mempertimbangkan teori ekonomi, manajemen keuangan, dan aspek regulasi ini, proyeksi anggaran dari tahun 2026 hingga 2030 diharapkan mampu menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penetapan proyeksi keuangan daerah Kota Lubuk Linggau didasarkan pada kinerja pelaksanaan keuangan daerah masa lalu atau sejarah data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, asumsi makro ekonomi, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Lubuk Linggau dalam lima tahun ke depan. Asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penetapan target pendapatan dan belanja daerah adalah pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan, arah kebijakan fiskal Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada periode 2026–2030 diperkirakan akan fokus pada stabilisasi

sumber pendapatan dan peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, total pendapatan daerah diproyeksikan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat secara bertahap dari Rp1,02 triliun pada 2026 menjadi Rp1,10 triliun pada 2030. Meskipun angka tahun 2026 menunjukkan penurunan dibanding baseline 2024 sebesar Rp1,18 triliun, tren selanjutnya menunjukkan pemulihan yang konsisten hingga akhir periode proyeksi. Kenaikan rata-rata pendapatan selama 2026–2030 sekitar 2,0 persen per tahun, mencerminkan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang moderat dan konservatif dalam konteks kebijakan fiskal nasional yang menekankan efisiensi belanja dan penyesuaian transfer pusat.

Komponen PAD diproyeksikan terus meningkat dari Rp158,36 miliar pada 2026 menjadi Rp170,78 miliar pada 2030, atau tumbuh rata-rata 1,9–2,0 persen per tahun. Kenaikan ini diharapkan bersumber dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan retribusi jasa umum, serta optimalisasi pengelolaan aset dan BUMD. Pemerintah daerah diharapkan mendorong inovasi digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, serta memperluas basis wajib pajak lokal untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Sementara itu, pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah, meskipun proporsinya diproyeksikan sedikit menurun. Nilainya diperkirakan sebesar Rp859,17 miliar pada 2026, meningkat bertahap hingga Rp929,99 miliar pada 2030. Peningkatan ini mencerminkan proyeksi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kinerja fiskal dan capaian pembangunan daerah. Stabilitas pendapatan transfer menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan program pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah. Kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak memberikan kontribusi pada periode 2026–2030, sejalan dengan penyesuaian struktur pendapatan daerah dan penghapusan beberapa pos pendapatan nonrutin yang sebelumnya bersifat insidental.

Secara umum, proyeksi pendapatan Kota Lubuk Linggau tahun 2026–2030 menggambarkan arah kebijakan fiskal yang hati-hati dan berorientasi pada stabilitas, dengan fokus pada peningkatan PAD sebagai pilar utama kemandirian daerah. Meskipun pada awal periode terjadi penurunan dibandingkan baseline 2024, tren jangka menengah menunjukkan pemulihan positif dan pertumbuhan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan lokal secara inovatif, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, serta memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029, maka arah kebijakan difokuskan pada Upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi melalui digitalisasi sistem, integrasi data, serta peningkatan kapasitas aparatur pajak daerah.
- b. Memperluas basis pajak dengan pendataan ulang objek dan subjek pajak serta pembaruan regulasi pajak daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.
- c. Mengidentifikasi dan menggarap potensi baru, seperti sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan pemanfaatan sumber daya lokal.
- d. Mengembangkan model kerja sama daerah dengan pihak ketiga (BUMD, swasta, dan masyarakat) untuk meningkatkan nilai ekonomi aset daerah.
- e. Memperkuat tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi laba.
- f. Mendorong diversifikasi usaha BUMD agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
- g. Menerapkan sistem pembayaran non-tunai dan aplikasi pelayanan pajak online untuk mempermudah masyarakat serta meningkatkan transparansi.
- h. Mengembangkan inovasi layanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.

- i. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi melalui audit rutin dan sistem pelaporan berbasis data.
- j. Menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, sekaligus memberi insentif bagi wajib pajak yang patuh.
- k. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola pendapatan melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- l. Memperkuat koordinasi antara perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendapatan.

Adapun arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
- b. Memastikan capaian kinerja program prioritas agar memenuhi syarat penyaluran Dana Insentif Fiskal (DIF) dan Dana Alokasi Kinerja (DAK berbasis kinerja).
- c. Memperkuat kemampuan aparatur dalam penyusunan proposal, pelaporan, dan evaluasi penggunaan dana transfer.
- d. Mengembangkan sistem pengendalian internal untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan waktu pelaksanaan program yang didanai transfer.
- e. Meningkatkan komunikasi aktif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi untuk memperluas peluang mendapatkan dana bantuan keuangan maupun hibah.
- f. Mengoptimalkan keikutsertaan daerah dalam program-program lintas sektor yang didanai oleh pemerintah pusat.
- g. Menjalin kerja sama keuangan antar daerah untuk mendukung proyek strategis bersama, seperti pengelolaan kawasan perbatasan, infrastruktur, dan layanan publik bersama.
- h. Mendorong kolaborasi pembiayaan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sekitar untuk memperkuat sinergi pembangunan regional.

- i. Menjamin pelaporan penggunaan dana transfer tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan aturan.
- j. Meningkatkan hasil dan dampak dari kegiatan yang didanai transfer agar menjadi dasar peningkatan alokasi pada tahun berikutnya.

Adapun arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 difokuskan pada kebijakan berikut:

- a. Menggali dan memperluas basis penerimaan daerah melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak serta retribusi.
- b. Meningkatkan efektivitas penagihan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- c. Menerapkan digitalisasi sistem penerimaan daerah untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan kemudahan pembayaran.
- d. Memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan, termasuk sinkronisasi data keuangan dan pelayanan publik.
- e. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan di bidang perpajakan, retribusi, dan akuntansi pemerintahan.
- f. Mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan integritas dalam pengelolaan penerimaan daerah.
- g. Menjamin seluruh pendapatan daerah tercatat dan dilaporkan secara akurat sesuai standar akuntansi pemerintah.
- h. Meningkatkan transparansi publik melalui publikasi realisasi dan capaian pendapatan secara berkala.
- i. Menyelaraskan strategi peningkatan PAD dengan optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
- j. Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan sumber-sumber pendanaan alternatif yang legal dan berkelanjutan.

2. Belanja Daerah

Untuk mencapai visi dan misi Kota Lubuk Linggau pada periode 2025-2030, proyeksi belanja daerah memegang peran yang sangat penting.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau menargetkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas dengan fokus utama pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, anggaran belanja daerah perlu difokuskan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan fisik, maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Proyeksi belanja daerah Kota Lubuk Linggau untuk periode 2026–2030 menggambarkan arah kebijakan fiskal yang berfokus pada efisiensi, keberlanjutan fiskal, dan peningkatan kualitas belanja publik. Pemerintah daerah memproyeksikan struktur belanja yang menyesuaikan dengan kapasitas pendapatan daerah dan prioritas pembangunan jangka menengah, dengan upaya menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal.

Total belanja daerah diproyeksikan bergerak relatif stabil dalam rentang Rp982,53 miliar pada tahun 2026 hingga Rp1,10 triliun pada tahun 2030. Meskipun nilai tahun 2026 lebih rendah dibanding baseline 2024 sebesar Rp1,15 triliun, tren selanjutnya menunjukkan kenaikan bertahap hingga akhir periode proyeksi. Peningkatan rata-rata sekitar 2,9 persen per tahun menunjukkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan realistis, dengan penekanan pada efisiensi pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Komponen belanja operasi tetap menjadi porsi terbesar dalam struktur APBD, mencapai sekitar 75–80 persen dari total belanja. Nilainya meningkat dari Rp810,05 miliar pada 2026 menjadi Rp810,93 miliar pada 2030. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlanjutan layanan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pemenuhan kewajiban belanja pegawai dan operasional perangkat daerah. Meski terjadi fluktuasi kecil pada 2027, secara keseluruhan belanja operasi diarahkan untuk mendukung efisiensi birokrasi dan penguatan pelayanan berbasis digital.

Belanja modal diproyeksikan mengalami penyesuaian cukup signifikan pada awal periode proyeksi, yaitu menurun dari Rp395,57 miliar (2024) menjadi Rp167,48 miliar pada 2026, namun kemudian meningkat secara bertahap hingga Rp285,84 miliar pada 2030. Perubahan ini menggambarkan pola kebijakan pembangunan yang selektif dan bertahap, dengan fokus pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur prioritas serta peningkatan kualitas sarana publik yang telah ada. Tren kenaikan belanja modal pasca-2027 menunjukkan arah kebijakan daerah yang berorientasi pada pemulihan kapasitas investasi publik setelah masa konsolidasi fiskal.

Pos belanja tak terduga diproyeksikan tetap konstan sebesar Rp5 miliar per tahun sepanjang 2026–2030. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian fiskal dalam menyiapkan cadangan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat, bencana, atau kebutuhan mendesak lainnya. Sementara itu, belanja transfer tidak diproyeksikan dalam periode ini, menandakan bahwa seluruh belanja diarahkan langsung pada program dan kegiatan perangkat daerah serta penyelenggaraan layanan publik.

Secara umum, proyeksi belanja Kota Lubuk Linggau tahun 2026–2030 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang berimbang antara efisiensi dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berupaya mengendalikan belanja operasional agar tetap proporsional, sekaligus mendorong peningkatan belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas infrastruktur. Struktur belanja yang stabil dan realistis diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal daerah, memperkuat daya saing wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2025–2029 diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian belanja rutin dan optimalisasi belanja berbasis kinerja.

- c. Memperkuat alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
- d. Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.
- e. Mengarahkan belanja modal pada kegiatan produktif yang berdampak jangka panjang, seperti sarana prasarana publik dan investasi daerah.
- f. Memastikan keberlanjutan pemeliharaan aset daerah agar tetap berfungsi optimal.
- g. Menekan pertumbuhan belanja pegawai dan operasional agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.
- h. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi proses administrasi dan pengadaan barang/jasa.
- i. Mendorong pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.
- j. Menyajikan laporan kinerja keuangan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
- k. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran dengan sumber pendanaan lain seperti dana transfer, kerja sama antar daerah, dan kemitraan publik-swasta.
- l. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

3. Pembiayaan

Komponen pembiayaan daerah memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah serta memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam proyeksi APBD untuk periode 2026-2030, pembiayaan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang dapat memengaruhi ruang fiskal untuk membiayai program-program pembangunan prioritas.

Proyeksi pembiayaan daerah Kota Lubuk Linggau pada periode 2026–2030 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang semakin stabil dan berorientasi pada keseimbangan anggaran. Berdasarkan data, total pembiayaan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp38,49 miliar, dengan komponen penerimaan pembiayaan sebesar Rp7,48 miliar dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp31,01 miliar. Nilai ini menandakan bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian struktur pembiayaan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Memasuki tahun 2026, total pembiayaan diproyeksikan menurun menjadi Rp37 miliar, yang berasal dari penerimaan sebesar Rp1 miliar dan pengeluaran sebesar Rp36 miliar. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menekan ketergantungan terhadap sumber pembiayaan, seiring dengan meningkatnya kemampuan pendapatan daerah dan efisiensi belanja. Mulai tahun 2027 hingga 2030, pembiayaan daerah diproyeksikan stabil pada kisaran Rp1 miliar per tahun, dengan nilai penerimaan dan tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Pola ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada periode tersebut bersifat netral, difungsikan sebagai instrumen keseimbangan anggaran (*budget balancing*) melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Kebijakan ini menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil mencapai posisi fiskal yang sehat, dengan ketergantungan yang rendah terhadap sumber pembiayaan eksternal. Selain itu, tidak adanya rencana pengeluaran pembiayaan setelah tahun 2026 menggambarkan bahwa daerah lebih memprioritaskan pembiayaan langsung melalui pendapatan murni dan efisiensi belanja, dibandingkan dengan pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal baru.

Secara keseluruhan, tren pembiayaan tahun 2026–2030 menunjukkan arah kebijakan keuangan yang *prudent* (berhati-hati), menekankan pada stabilitas fiskal, efisiensi, dan kesinambungan pengelolaan APBD. Strategi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian fiskal Kota Lubuk Linggau serta

memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam membiayai prioritas pembangunan jangka menengah secara berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemanfaatan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.
- b. Menjaga keseimbangan kas daerah agar SiLPA digunakan secara efisien, diarahkan untuk mendukung belanja prioritas yang bersifat produktif dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan daerah untuk menekan potensi sisa anggaran yang tidak termanfaatkan secara optimal.
- d. Menurunkan ketergantungan terhadap pembiayaan utang, dengan menyelesaikan kewajiban pembayaran cicilan pokok secara tepat waktu sebagaimana dilakukan hingga 2026.
- e. Setelah utang lunas, mengalihkan kapasitas fiskal ke pembiayaan investasi produktif yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- f. Mengendalikan pengeluaran pembiayaan secara proporsional, agar tidak membebani kemampuan fiskal jangka menengah dan menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
- g. Meningkatkan peran BUMD sebagai sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal secara bertahap mulai tahun 2026.
- h. Mendorong profesionalisme dan tata kelola BUMD yang sehat agar penyertaan modal memberikan imbal hasil optimal bagi keuangan daerah.
- i. Mengarahkan investasi daerah pada sektor strategis seperti air bersih, energi, dan perdagangan lokal yang mendukung perekonomian masyarakat.
- j. Menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan untuk memastikan stabilitas fiskal daerah jangka panjang.
- k. Meningkatkan kapasitas analisis fiskal daerah agar keputusan pembiayaan berbasis pada data dan proyeksi kemampuan keuangan yang realistis.

- l. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap kebijakan pembiayaan, termasuk dalam penyertaan modal dan penggunaan surplus anggaran.
- m. Menyesuaikan arah pembiayaan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
- n. Mengintegrasikan strategi pembiayaan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, untuk menciptakan siklus APBD yang berimbang, sehat, dan berdaya dorong ekonomi.

Lebih jelas, proyeksi APBD Kota Lubuk Linggau Tahun 2026-2030 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.42.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	1.181.160.284.370,00	1.017.531.499.841,00	1.037.284.913.615,00	1.058.030.611.887,00	1.079.191.224.125,00	1.100.775.048.608,00
	A. Pendapatan Asli Daerah	141.860.866.155,00	158.358.389.957,00	160.928.341.533,00	164.146.908.364,00	167.429.846.531,00	170.778.443.461,00
	B. Pendapatan Transfer	1.039.299.418.215,00	859.173.109.884,00	876.356.572.082,00	893.883.703.523,00	911.761.377.594,00	929.996.605.147,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.181.160.284.370,00	1.017.531.499.841,00	1.037.284.913.615,00	1.058.030.611.887,00	1.079.191.224.125,00	1.100.775.048.608,00
2	BELANJA	1.154.488.342.583,00	982.531.499.841,00	1.038.284.913.615,00	1.059.030.611.887,00	1.080.191.224.125,00	1.101.775.048.608,00
	A. Belanja Operasi	757.082.765.098,00	810.049.137.211,00	767.186.128.815,00	781.479.851.391,00	796.059.448.420,00	810.930.637.388,00
	B. Belanja Modal	395.565.510.824,00	167.482.362.630,00	266.098.784.800,00	272.550.760.496,00	279.131.775.705,00	285.844.411.220,00
	C. Belanja Tak Terduga	1.840.066.661,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	D. Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	1.154.488.342.583,00	982.531.499.840,00	1.038.284.913.615,00	1.059.030.611.887,00	1.080.191.224.125,00	1.101.775.048.608,00
	SURPLUS/DEFISIT	26.671.941.787,00	35.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN	38.489.885.777,00	37.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	A. Penerimaan	7.480.252.553,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	B. Pengeluaran	31.009.633.224,00	36.000.000.000,00	0	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	38.489.885.777,00	37.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-23.529.380.671,00	-35.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2025

2.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.5.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

2.5.1.1. Permasalahan dari Aspek Geografi dan Demografi

1. Daya Tampung Demografis Masih Rendah

Dari 8 (delapan) kecamatan di Kota Lubuk Linggau, hanya 1 (satu) kecamatan yang kondisi daya tampung demografisnya sangat tinggi yaitu 133.944, sementara itu 5 (lima) kecamatan tergolong sangat rendah, 1 (satu) kecamatan tergolong rendah dan 1 (satu) kecamatan masuk dalam kategori cukup.

2. Daya Dukung Permukiman Masih Rendah

Dari 8 (delapan) kecamatan di Kota Lubuk Linggau, hanya 2 (dua) kecamatan yang kondisi daya dukung permukimannya sangat tinggi, sementara itu 6 (enam) kecamatan lainnya tergolong sangat rendah.

3. Masih Rendahnya Indeks Tutupan Lahan

Jika dilihat per komponen pembentuk IKLH, indeks tutupan lahan mengalami penurunan yang signifikan, dari 80,4 pada tahun 2019 menjadi 26,57 pada tahun 2023. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan sarana, tutupan air, dan pertumbuhan area permukiman.

4. Masih Rendahnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Produksi listrik menurun, konsumsi air meningkat, dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Lubuk Linggau lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Di samping itu IKP mengalami penurunan di tahun terakhir.

2.5.1.2. Permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berkontraksi di tahun 2020 kemudian mulai membaik di tahun 2021 hingga tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, turun dari 4,51 persen menjadi 4,44 persen.

2. Penurunan Tingkat Keparahan Kemiskinan Belum Optimal

Secara global Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami penurunan. Namun, terjadi peningkatan kembali di tahun 2024.

3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Belum Optimal

Tren perkembangan TPT di Kota Lubuk Linggau dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Namun, persentase TPT Kota Lubuk Linggau masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

4. Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masih Belum Optimal

Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau masih tinggi dibandingkan Sumatera Selatan dan Musi Rawas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan di Kota Lubuk Linggau.

5. Masih Tingginya Angka Stunting

Prevalensi Balita Stunting meningkat signifikan menjadi 20,9 persen dari 17,5 persen.

6. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu tahun 2021 dan 2023 mencapai 140 hingga 159 per 100.000 kelahiran hidup (KH), meskipun turun di tahun 2024.

7. Masih Tingginya Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi per 1000 KH meningkat dari tahun 2023 hingga di atas 6 per 1000 KH.

8. Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Jika dilihat per komponen pembentuk IPLM, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan mengalami penurunan dari 0,6691 pada tahun 2023 menjadi 0,4164 pada tahun 2024.

9. Ketimpangan Gender Masih Tinggi

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih tinggi meskipun turun dari 0,451 di tahun 2019 menjadi 0,352 di tahun 2023. IKG naik dari 0,292 tahun 2022 menjadi 0,352 di tahun 2023. Capaian angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih di bawah angka standar yaitu 100, menunjukkan belum optimalnya kesetaraan gender.

2.5.1.3. Aspek Daya saing Daerah

1. Masih Rendahnya Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur selama lima tahun terakhir bergerak fluktuatif cenderung menurun. Penurunan signifikan terjadi pada komponen Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan yaitu dari 81,29 persen pada tahun 2023 menjadi 45,87 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan di banyak sektor, yang mengisyaratkan perlunya upaya penguatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dasar di Kota Lubuk Linggau secara berkelanjutan.

2. Masih Rendahnya Rasio Pajak Terhadap PDRB

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (0,71 persen) dan terutama dengan rata-rata nasional yang mencapai 9,61 persen, kinerja rasio pajak daerah Kota Lubuk Linggau (0,62 persen) masih tergolong sangat rendah.

2.5.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Masih Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat cenderung stagnan bahkan emurun dari 81,59 di tahun 2023 menjadi 78,88 di tahun 2024.

2. Masih Rendahnya Tingkat Kepedulian HAM

Secara umum Nilai Peduli HAM menurun dari 95,0 pada tahun 2022 menjadi 91,25 pada tahun 2023, Beberapa komponen penilaian HAM mengalami penurunan signifikan antara lain: Hak atas Bantuan Hukum dan Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang Layak.

3. Masih Rendahnya Tingkat Keamanan dan Ketertiban

Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan yang signifikan terhadap Jumlah Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) dari 66 pada tahun 2023 menjadi 118 pada tahun 2024.

2.6. Isu Strategis

2.6.1. Isu Strategis Global

1. Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan

Dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, dan ancaman terhadap ketahanan air dan pangan telah menjadi perhatian utama dunia. Kota Lubuk Linggau sebagai daerah yang tengah berkembang perlu mengantisipasi potensi bencana alam, degradasi lingkungan, serta mempromosikan pembangunan rendah karbon dan berwawasan lingkungan.

2. Krisis Pangan dan Energi Global

Ketidakstabilan rantai pasok global, konflik geopolitik, dan perubahan iklim turut memengaruhi ketersediaan pangan dan energi. Ketahanan pangan lokal, diversifikasi sumber energi, dan efisiensi energi menjadi isu penting yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Transformasi Digital dan Ekonomi Berbasis Teknologi

Revolusi industri 4.0 dan percepatan transformasi digital global mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas digitalisasi pelayanan publik, pengembangan ekosistem ekonomi digital, dan peningkatan literasi teknologi masyarakat. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Lubuk Linggau untuk memperkuat daya saing dan inovasi daerah.

4. Penguatan Kerjasama Internasional

Isu lingkungan global dapat diatasi melalui perjanjian, organisasi internasional, dan mekanisme lainnya. Selain itu dapat pula menggunakan aspek penguatan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan melalui kebijakan, peraturan, dan sanksi. Didukung pula penguatan partisipasi masyarakat untuk

mencapai pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui berbagai kegiatan, seperti pemantauan lingkungan, pengaduan, dan advokasi.

5. Penguatan Penegakan Hukum yang Efektif

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, isu ini menjadi sangat relevan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Efektivitas penegakan hukum di tingkat kota bukan hanya berperan dalam menciptakan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi stabilitas sosial, iklim investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Lemahnya penegakan hukum di daerah dapat membuka ruang bagi praktik-praktik pelanggaran hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun kriminalitas yang merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah.

6. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota yang Berkelanjutan

Tren urbanisasi global mengarahkan pentingnya pengelolaan kota yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Lubuk Linggau dihadapkan pada tantangan pengembangan infrastruktur dasar, pengelolaan permukiman, dan penataan ruang yang harus selaras dengan prinsip smart city dan keberlanjutan.

7. Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, isu ini sangat relevan mengingat pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pemantauan pelayanan publik, hingga pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan daerah sejalan dengan kebutuhan warga dan nilai-nilai lokal. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi partisipatif, keterbatasan akses informasi publik, serta belum meratanya

wadah-wadah partisipasi yang inklusif di berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

8. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota yang Berkelanjutan

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera Selatan, dinamika urbanisasi terus berkembang. Pertambahan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perluasan kawasan permukiman menjadi indikator bahwa Lubuklinggau tengah mengalami transformasi sebagai kota yang semakin maju dan terbuka. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti kebutuhan terhadap pengelolaan tata ruang yang bijak, penyediaan infrastruktur dasar yang merata, pengelolaan sampah dan limbah, serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.

9. Ketimpangan Sosial dan Ketahanan Sosial-Ekonomi

Ketimpangan akses terhadap layanan dasar, lapangan kerja, dan kesejahteraan masih menjadi tantangan global. Dalam konteks lokal, penting bagi Lubuk Linggau untuk memperkuat inklusi sosial, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul.

10. Kesiapsiagaan terhadap Krisis Global dan Kesehatan

Pandemi COVID-19 telah menjadi pelajaran global akan pentingnya sistem kesehatan dan respons krisis yang tangguh. Kota Lubuk Linggau harus memperkuat sistem kesehatan, mitigasi risiko bencana non-alam, dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai krisis masa depan.

11. Penguatan Kesetaraan Gender

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, isu kesetaraan gender juga memiliki urgensi tersendiri. Meskipun tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, masih terdapat kesenjangan dalam peran strategis perempuan, terutama dalam ranah ekonomi, kepemimpinan

publik, serta pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Beberapa indikator seperti angka partisipasi kerja perempuan, keterwakilan dalam lembaga politik, serta perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius.

12. Penguatan Nilai-Nilai Budaya

Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, penguatan nilai-nilai budaya menjadi isu strategis global yang krusial untuk menjaga identitas, karakter, dan kohesi sosial masyarakat. Dalam konteks Kota Lubuklinggau, pelestarian budaya lokal seperti tradisi adat, bahasa daerah, kesenian, serta nilai gotong royong menjadi tantangan tersendiri di tengah masuknya budaya luar yang dapat menggeser nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, penguatan budaya di Lubuklinggau perlu dilakukan melalui pendidikan berbasis budaya, pelibatan generasi muda dalam kegiatan seni dan tradisi, serta dukungan terhadap komunitas budaya sebagai upaya menjaga warisan lokal sekaligus membangun ketahanan sosial. Dengan demikian, pembangunan kota dapat berjalan seiring dengan pelestarian jati diri masyarakat, menjadikan Lubuklinggau sebagai kota yang maju namun tetap berakar pada nilai budaya yang kuat.

2.6.2. Isu Strategis Nasional

Dalam konteks nasional, arah pembangunan Kota Lubuk Linggau perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Isu strategis nasional yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Penguatan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Hal ini dapat mengurangi risiko bencana alam, menurunnya produktivitas pertanian, dan meningkatnya biaya kesehatan. Selain itu isu lingkungan berupa Penguatan mitigasi dalam menjaga keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan Penguatan mitigasi dan menjaga kualitas lingkungan.

2. Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Dalam mendukung agenda ketahanan nasional, daerah perlu memiliki kemampuan produksi dan distribusi pangan yang kuat, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Kota Lubuk Linggau harus memperkuat infrastruktur penunjang dan mendorong sinergi antarsektor.

3. Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

Arah kebijakan nasional menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Kota Lubuk Linggau perlu mempercepat digitalisasi pelayanan publik, penguatan sistem data, dan keterbukaan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan.

4. Penguatan Demokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, penguatan demokrasi menjadi kunci untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berintegritas. Pemerintah daerah perlu terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan transparansi anggaran dan layanan publik, serta memperkuat literasi politik warga agar mereka dapat berperan aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperkuat praktik demokratis di tingkat lokal, Lubuklinggau tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mendukung agenda global menuju pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan seiring dengan upaya daerah dalam memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan lokal, transparansi tata kelola, dan pelibatan warga dalam forum-forum pembangunan seperti musrenbang, forum konsultasi publik, dan pengawasan layanan publik. Tantangannya, masih terdapat kesenjangan dalam

kapasitas dan akses partisipasi, terutama dari kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat marginal. Oleh karena itu, Lubuklinggau perlu mendorong model partisipasi yang lebih inklusif, memperluas ruang dialog antara pemerintah dan warga, serta memperkuat budaya keterbukaan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

6. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Ketimpangan Wilayah

Isu ketimpangan antarwilayah menjadi perhatian nasional. Sebagai salah satu kota strategis di Sumatera Selatan, Lubuk Linggau diharapkan mampu menjadi simpul pertumbuhan kawasan barat Provinsi dan mendorong konektivitas wilayah perbatasan serta integrasi pembangunan dengan kabupaten/kota sekitar.

7. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Fokus nasional terhadap peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan kerja menjadi kunci dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kota Lubuk Linggau perlu memastikan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang merata, serta memperluas peluang pelatihan kerja bagi generasi muda.

8. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Pemerintah pusat menekankan pentingnya transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke sektor-sektor bernilai tambah seperti industri kreatif, digital, dan ekonomi hijau. Kota Lubuk Linggau harus mendorong inovasi, UMKM modern, serta integrasi ke dalam rantai pasok nasional dan global.

9. Pengendalian terhadap Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, isu kesenjangan ekonomi dan sosial juga menjadi tantangan nyata yang perlu direspons secara serius. Meskipun kota ini menunjukkan kemajuan dalam pembangunan, masih terdapat perbedaan kesejahteraan antarwilayah, keterbatasan akses layanan dasar bagi kelompok tertentu, serta kesenjangan antara sektor formal dan informal. Oleh karena itu,

strategi pembangunan di Lubuklinggau perlu diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan mengurangi kesenjangan secara sistematis dan berkelanjutan, Kota Lubuklinggau dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan adil, sekaligus mendukung agenda global dalam mewujudkan dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketidaksetaraan.

10. Penguatan dan Pengendalian terhadap Kesenjangan Gender

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, kesenjangan gender masih menjadi tantangan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peran serta perempuan dalam berbagai sektor. Masih terdapat disparitas dalam partisipasi kerja, akses terhadap pelatihan keterampilan, serta keterwakilan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun komunitas. Oleh karena itu, Lubuklinggau perlu memperkuat strategi yang inklusif dan berperspektif gender melalui penyediaan layanan publik yang adil, pendidikan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan kepemimpinan.

11. Penguatan Nilai-Nilai Budaya

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, yang kaya akan tradisi, seni, dan kearifan lokal, penguatan nilai budaya menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian warisan leluhur. Kota ini perlu terus menggalakkan pendidikan budaya, revitalisasi kesenian tradisional, serta melibatkan generasi muda dalam pelestarian adat dan tradisi. Dengan memperkuat nilai-nilai budaya, Lubuklinggau tidak hanya mempertahankan identitasnya, tetapi juga membangun masyarakat yang berakar kuat pada nilai lokal, sekaligus mampu menghadapi tantangan global dengan karakter yang kokoh dan berkelanjutan.

2.6.3. Isu Strategis Regional

Dalam lingkup regional, isu-isu strategis Provinsi Sumatera Selatan dan kawasan sekitarnya turut memengaruhi arah pembangunan Kota Lubuk Linggau. Sebagai kota yang terletak di koridor strategis antarprovinsi, Lubuk Linggau memiliki peran penting dalam mendukung integrasi pembangunan regional. Beberapa isu regional yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan

Isu degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan lahan menjadi perhatian di tingkat provinsi. Kota Lubuk Linggau sebagai kota yang dikelilingi kawasan pertanian dan hutan perlu mengedepankan tata kelola ruang yang berkelanjutan dan kolaboratif, serta menjaga fungsi ekologis kawasan.

2. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan tetapi juga keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan cukup melimpah namun keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih rendah. Beberapa isu ketersediaan pangan, keterjangkauan/aksesstabilitas, dan pemanfaatan pangan secara global dan daerah yaitu: (1) Harga pangan dunia (Inflasi pangan) yang tinggi akibat faktor iklim, gangguan pasokan, serta kompetisi penggunaan produk pertanian untuk pangan, pakan, dan bahan bakar akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga cenderung mendorong meningkatnya gizi buruk, dan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga menimbulkan kerentanan pangan; (2) Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian; (3) Sumberdaya manusia di sektor pertanian mulai menua, rata-rata petani berusia antara 35-64 tahun, dan tingkat pendidikan rendah; (4) Peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan sempit (kurang dari 0,50 ha); (5) Masih tingginya food loss dan food waste (kehilangan pangan dan sisa pangan) akibat belum maksimalnya teknologi pasca panen, dan persoalan terkait agrologistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis) dan perilaku konsumen yang tidak tepat dengan menyisahkan makanan.

3. Reformasi Birokrasi

Transformasi tata kelola yang terlihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan indeks pelayanan publik. Tata kelola birokrasi yang telah dilakukan Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan karena Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas di bawah nasional. Indeks SPBE menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota masih masih terkategori C atau CC, dan hanya Kabupaten Muara Enim yang terkategori B. Ke depan diperlukan regulasi sebagai aturan main, kelembagaan efektif, dan meritokrasi dan integritas, dimana kelembagaan yang efektif akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan begitu pun sebaliknya. Era digitalisasi mendorong kemudahan akses pelayanan dan keterbukaan informasi sehingga reformasi birokrasi menuntut pelayanan yang terintegrasi antar sektor dengan manajemen ASN yang strategis dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan tata kelola yang baik.

4. Peningkatan Kolaborasi Antarwilayah

Isu regionalisasi menuntut penguatan kerja sama lintas kabupaten/kota, terutama dalam pengelolaan kawasan strategis, pembangunan infrastruktur bersama, dan penyediaan layanan publik. Lubuk Linggau harus berperan aktif dalam forum-forum koordinasi pembangunan regional.

5. Penguatan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur

Konektivitas antarwilayah menjadi isu utama di Sumatera Selatan, terutama dalam mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Kota Lubuk Linggau berpotensi menjadi simpul transportasi darat dan logistik yang strategis antara provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi.

6. Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Kawasan Hinterland

Kota Lubuk Linggau memiliki posisi geografis yang dekat dengan wilayah hinterland dan perbatasan kabupaten/kota lainnya. Perlu ada upaya sinergis dalam mengembangkan kawasan perbatasan agar dapat tumbuh secara

merata melalui penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik lintas wilayah.

7. Pengendalian Urbanisasi dan Penataan Kota

Urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu persoalan lingkungan, kemacetan, dan permukiman kumuh. Kota Lubuk Linggau perlu memperkuat tata ruang kota, pengendalian pemanfaatan lahan, serta pengembangan kawasan permukiman yang layak dan inklusif.

8. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Perkembangan aspek demografi menunjukkan adanya fenomena degrowth atau pertumbuhan penduduk yang menurun. Kondisi ini berimplikasi kepada penyediaan kebutuhan sarana dan sarana di masa yang akan datang.

9. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Dalam konteks Kota Lubuklinggau, meskipun terdapat berbagai upaya pembangunan, kemiskinan masih menjadi tantangan signifikan yang mempengaruhi sebagian masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, Kota Lubuklinggau perlu mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti peningkatan keterampilan kerja, pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat, serta perluasan akses layanan sosial dan perlindungan sosial.

2.6.4. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah Kota Lubuk Linggau diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun regional/daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Kota Lubuk Linggau yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah pada 2025-2029. Lebih lanjut, teknik

perumusan isu strategis daerah Kota Lubuk Linggau disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.43. Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Daerah

Potensi Daerah	Klasifikasi Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Sektor Pertanian dan Perkebunan	Daya Dukung dan Daya Tampung Masih Rendah	Ancaman Bencana dan Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan	Penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan	Rendahnya Ketahanan Lingkungan akibat Pengelolaan Sampah dan Sumber Daya Alam yang Belum Berkelanjutan
Pariwisata Alam dan Budaya						
Pusat Perdagangan dan Jasa Sektor Industri Kreatif	Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	Adanya Permasalahan Tata Kelola Persampahan yang Belum Optimal	Krisis Pangan dan Energi Global	Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	Ketahanan Pangan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif, Responsif, dan Berbasis Teknologi
Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penurunan Kualitas Air akibat Pencemaran Air Permukaan				
Pengembangan Infrastruktur	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan		Transformasi Digital dan Ekonomi Berbasis Teknologi	Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	Ketahanan Pangan	Peningkatan Kolaborasi Antarwilayah
Pemberdayaan UMKM						
	Masih Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan		Penguatan kerjasama internasional			Terbatasnya Kolaborasi Antarwilayah dan Akses terhadap Kerjasama Internasional
			Penguatan penegakan hukum yang efektif	Peningkatan kualitas demokrasi untuk mewujudkan		

Potensi Daerah	Klasifikasi Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel		
			Penguatan partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan		
	Masih Rendahnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Belum Optimal	Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota yang Berkelanjutan	Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Ketimpangan Wilayah	Penguatan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur	1. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik 2. Penguatan Fungsi Kota sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Regional
Permasalahan Infrastruktur Sanitasi yang Belum Optimal		Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Kawasan Hinterland				
Tidak meratanya pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang berakibat pada meningkatnya kemiskinan		Pengendalian Urbanisasi dan Penataan Kota				
Masih Rendahnya Kualitas SDM			1. Ketimpangan Sosial dan Ketahanan Sosial-Ekonomi 2. Kesiapsiagaan terhadap Krisis Global dan Kesehatan	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Mendorong Daya Saing Daerah
	Permasalahan Kesehatan Masyarakat					
	Penguatan kesetaraan gender			Penguatan dan pengendalian terhadap kesenjangan		

Potensi Daerah	Klasifikasi Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				gender		
		Penguatan nilai-nilai budaya		Penguatan nilai-nilai budaya		
	Masih Tingginya Angka Pengangguran			Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	Tingginya Tingkat Kemiskinan	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Keunggulan Lokal
	Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan			Pengendalian terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial		Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan
	Masih Tingginya Angka Kemiskinan					Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Sektor Industri Kreatif

Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

Dari Tabel diatas dapat dijabarkan isu strategis Kota Lubuk Linggau terdiri atas:

1. Rendahnya Ketahanan Lingkungan akibat Pengelolaan Sampah dan Sumber Daya Alam yang Belum Berkelanjutan

Kota Lubuk Linggau menghadapi tantangan serius terkait rendahnya ketahanan lingkungan, yang ditandai oleh meningkatnya risiko bencana, dampak perubahan iklim, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, seperti terbatasnya fasilitas pengelolaan akhir, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah, serta lemahnya sistem pengawasan.

Di sisi lain, pencemaran air permukaan akibat limbah domestik dan aktivitas perkotaan turut memperburuk kondisi lingkungan. Ketidakterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama air dan lahan, menyebabkan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan semakin tinggi.

Rendahnya kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, minimnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta belum optimalnya sinergi antar sektor dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadikan isu ini perlu mendapat perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif, Responsif, dan Berbasis Teknologi

Indikator rendahnya kepuasan masyarakat, kepedulian terhadap HAM, dan keamanan mengarah pada pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan. Isu strategis ini mencakup digitalisasi layanan publik, transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur guna menghadapi tantangan tata kelola modern yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.

3. Terbatasnya Kolaborasi Antarwilayah dan Akses terhadap Kerjasama Internasional

Kota Lubuk Linggau menghadapi tantangan dalam menjalin dan mengoptimalkan kerja sama baik di tingkat regional maupun internasional. Di tingkat regional, koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan lintas batas administratif.

Sementara itu, di tingkat global, keterlibatan dalam kerja sama internasional, baik melalui sister city, akses pendanaan hijau, maupun transfer pengetahuan dan teknologi, masih sangat terbatas. Padahal, peluang ini sangat penting untuk mendorong peningkatan daya saing daerah, inovasi, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas diplomasi daerah, peningkatan jejaring kerja sama antarwilayah dan internasional, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global dan regional.

4. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik

Masih rendahnya indeks layanan infrastruktur, pencemaran air permukaan, serta ketimpangan akses terhadap sarana dan prasarana dasar merupakan isu penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara merata—termasuk air bersih, sanitasi, perumahan, dan transportasi—yang disertai pengelolaan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan kota.

5. Penguatan Fungsi Kota sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Regional

Kota Lubuk Linggau berperan sebagai simpul penting dalam konektivitas wilayah barat Sumatera Selatan. Namun, rendahnya indeks tutupan lahan dan pemanfaatan ruang menjadi tantangan dalam pengelolaan wilayah perkotaan yang efisien. Isu ini mendorong perlunya penataan ruang yang adaptif terhadap tekanan urbanisasi, penguatan pusat ekonomi lokal, dan pengelolaan

lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Di samping itu, isu ini mencakup perlunya penataan ruang yang responsif terhadap tekanan urbanisasi, pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, serta peningkatan sarana dan prasarana logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan jasa di kawasan regional.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Mendorong Daya Saing Daerah

Tantangan berupa rendahnya indeks pembangunan literasi, tingginya angka stunting, ketimpangan gender, serta masalah kesehatan masyarakat mengindikasikan perlunya penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Isu ini menekankan pentingnya pembangunan SDM yang inklusif, sehat, cerdas, berdaya saing dan adaptif terhadap transformasi digital dan dinamika pasar kerja modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di masa depan.

7. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Keunggulan Lokal

Kota Lubuk Linggau memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, khususnya yang berbasis budaya lokal dan kekayaan alam. Namun, pengembangannya masih terkendala oleh rendahnya daya dukung permukiman, tata kelola persampahan yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Isu ini menekankan pentingnya penguatan ekosistem kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lokal, transformasi digital, promosi potensi daerah secara terpadu, serta pengembangan destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Integrasi antara sektor pariwisata dan industri kreatif juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memperkuat identitas budaya daerah.

8. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal untuk Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan

Ketimpangan pendapatan, angka pengangguran, serta rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Isu ini mencakup dukungan pembiayaan, peningkatan akses pasar, pelatihan kewirausahaan, dan transformasi digital UMKM guna meningkatkan kontribusi ekonomi lokal terhadap pembangunan daerah.

9. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Sektor Industri Kreatif

Potensi industri kreatif di Kota Lubuk Linggau perlu dioptimalkan untuk menjawab tantangan rendahnya ketahanan energi, air, dan pangan, serta masih terbatasnya infrastruktur pendukung. Pengembangan sektor ini penting dalam menghadapi transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, melalui penguatan talenta lokal, kemitraan industri, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung kreativitas dan produktivitas.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1.1. Visi dan Misi RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Masing-masing tahapan mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau terpilih untuk lima tahun ke depan yang merupakan tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Lubuk Linggau menuju suatu kehidupan maju dan masyarakat yang sejahtera. Maka visi pembangunan Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera”

Visi Pembangunan ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Lubuk Linggau. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Maju diartikan sebagai suatu kondisi Lubuk Linggau sebagai kota yang maju ekonominya, dengan kualitas hidup yang relatif tinggi berbasiskan pengetahuan, inovasi, berbudaya dan beradab sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Kota Lubuk Linggau yang maju juga berarti memiliki infrastruktur memadai yang memperhatikan efek keberlanjutan lingkungan. Aspek-aspek tersebut didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang andal. Sementara itu, **Sejahtera** diartikan suatu kondisi seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas

pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, disusunlah misi sebagai implementasi langkah-langkah yang akan dilakukan. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi Kepala Daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, dapat dilakukan dengan 4 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
3. Membangun Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal dan Sekitarnya
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Misi dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD. Apabila pada RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2025 sebagaimana dikemukakan di atas terdapat 8 (delapan) misi, maka pada RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 dipertajam menjadi 4 (empat) misi. Keselarasan misi pada RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 dengan misi pada RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Keselarasan Misi pada RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 dengan Misi pada RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045

Misi RPJMD 2025-2029	Misi RPJPD 2025-2045
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan
	Mewujudkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan ramah lingkungan
Membangun Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal dan Sekitarnya	Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan Kesejahteraan Masyarakat
	Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas & Berkelanjutan
	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
	Menguatkan Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Tabel 3.2.

Keterkaitan antar Visi dan Misi RPJMD Kota Lubuk Linggau, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJM Nasional

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029	RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029	RPJMN Tahun 2025-2029
Sumatera Selatan Maju, Terus Untuk Semua	Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Mewujudkan masyarakat Sumsel yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan	Membangun Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal dan Sekitarnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air		Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial		

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029	RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029	RPJMN Tahun 2025-2029
Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan pada visi, misi, dan isu strategis pembangunan Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029 maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius
- Tujuan 1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 1.1.2 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat
- 1.1.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
- Tujuan 1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
- Sasaran 1.2.1 Menurunnya Angka Pengangguran
- 1.2.2 Meningkatnya daya beli masyarakat
- 1.2.3 Menurunnya Tingkat Kemiskinan
- Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
- Tujuan 2.1 Tercapainya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
- Sasaran 2.1.1 Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas, Nyaman dan Berkelanjutan
- 2.1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3 : Membangun Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal dan Sekitarnya

Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan

3.1.2 Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan

3.1.3 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

3.1.4 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan 4.1 Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 4.1.2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Sasaran 4.1.3 Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera - Mewujudkan Infrastruktur yang Merata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan - Membangun Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Sekitarnya - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	79,28 ¹⁾	79,45 ¹⁾	79,49	79,52	79,56	79,60		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,99	75,11	75,21	75,30	75,38	75,45		
		Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,01	10,22	10,35	10,43	10,51	10,65		
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,82	14,01	14,17	14,29	14,38	14,53		
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	635	640	645	650	655	660		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	96,29	96,34	96,39	96,43	96,66	96,85		
			Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	74,10	75,30	76,15	77,08	78,12	79,13		
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,288	0,282	0,277	0,271	0,265	0,260		
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Nilai)	0,332-0,350 ¹⁾	0,315-0,345 ¹⁾	0,311-0,315	0,308-0,311	0,306-0,308	0,304-0,306	
				Tingkat Kemiskinan ((%))	10,2-10,7 ¹⁾	9,7-10,2 ¹⁾	9,28 - 9,98	8,95 - 9,65	8,61 - 9,31	8,26 - 8,96	
	Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,62-5,30 ¹⁾	4,25-5,20 ¹⁾	4,39-4,99	3,98-4,58	3,58-4,18	3,17-3,77		
	Meningkatnya daya beli masyarakat		Indeks Pengeluaran (Indeks)	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59		
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37		
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22		
	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Indeks Layanan Infrastruktur (Indeks)	79,08	79,57	80,20	80,84	81,47	82,19		
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas, Nyaman dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan (Indeks)	65,42	66,84	68,71	70,58	72,45	74,55		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	71,83	71,87	71,90	71,94	71,97	72,01		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	58	60	62	64	65	65	
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-50 ¹⁾	5,0-5,5 ¹⁾	5,18-6,00	5,51-6,32	5,83-6,65	6,16-6,98	
			PDRB Per Kapita (ADHB) (Ribu Rupiah)	40.370.000	45.100.000	45.551.000	46.006.510	46.466.575	46.931.241	
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)	1,52	1,67	1,84	2,02	2,22	2,44	
		Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	7,41	7,53	7,61	7,74	7,78	7,95	
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata (%)	13,25	13,36	13,57	13,76	13,85	14,10	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	66,64	67,18	67,72	68,26	68,80	69,34	
	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	69,30	70,43	71,56	72,69	73,82	74,95	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,21	84,83	86,45	88,07	89,69	91,31	
			Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	2,85	2,9	3,0	3,1	3,3	3,5	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
			Nilai SAKIP (Nilai)	75,78	76,62	77,48	78,34	79,22	80,10	
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Nilai)	3,08	3,11	3,15	3,18	3,22	3,25	
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	29,9	30,2	31,3	32,1	33,5	34,5	
			Nilai Penerapan Sistem Merit (Angka)	282,80	285,62	288,47	291,36	294,27	297,21	

Ket: * Hasil Kesepakatan Pramusrenbang Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mencapai target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dengan pendekatan yang teknokratis dan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar berlangsung secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan output hasil pembangunan yang lebih optimal dapat tercapai. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

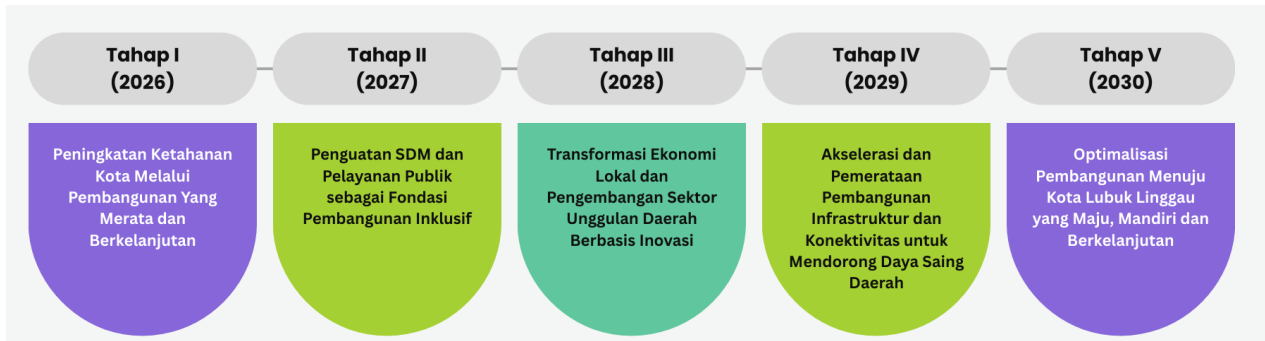
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan adalah kajian grand design perencanaan komprehensif tentang tahapan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 oleh Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau dalam mencapai target dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan kajian, analisis dan evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional serta selaras dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau periode 2025-2029.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Lubuk Linggau 2025-2045, pembangunan pada tahap kesatu (Tahun 2025-2029) difokuskan pada

peguatan fondasi modal dasar pembangunan. Dan hal ini juga yang menjadi acuan dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Lebih jelas penahapan pembangunan lima tahun dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1. Penahapan Pembangunan Kota Lubuk Linggau
Tahun 2026-2030**



Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

Berdasarkan permasalahan, potensi, dan isu strategis RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, dilakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) sebagai alat yang sangat berguna dalam merencanakan strategi untuk Kota Lubuk Linggau 5 (lima) tahun kedepan. Dari hasil analisis SWOT dirumuskan strategi RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan sistem layanan kesehatan primer hingga rujukan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas Puskesmas, RSUD, serta pemenuhan tenaga medis berkualitas;
2. Peningkatan mutu dan akses pendidikan melalui rehabilitasi sarana sekolah, peningkatan kualitas guru, dan digitalisasi pendidikan;
3. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak melalui program pemberdayaan perempuan, layanan perlindungan anak, dan rumah ramah perempuan dan anak;
4. Pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis permintaan pasar kerja dan BLK;
5. Penguatan ekonomi rumah tangga melalui UMKM, koperasi, dan akses pembiayaan produktif;
6. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial yang menysasar kelompok miskin ekstrem, disabilitas, dan lansia;
7. Penataan ruang kota berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang adaptif dan berorientasi pada ruang publik hijau dan aman;
8. Penguatan konektivitas antarwilayah dan permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan, jembatan, dan sarana transportasi;
9. Pengembangan sektor unggulan dan penguatan pelaku ekonomi lokal;

10. Penguatan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal seperti pertanian, kerajinan, dan makanan olahan;
11. Pengembangan pasar dan digitalisasi perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional dan ekosistem e-commerce local;
12. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan melalui paket wisata, festival, dan kolaborasi pelaku usaha;
13. Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, dan penguatan akuntabilitas;
14. Transformasi digital pelayanan publik melalui pengembangan smart city, sistem informasi layanan, dan keterbukaan data;
15. Peningkatan sistem pengawasan, akuntabilitas, dan manajemen keuangan daerah secara transparan dan efisien; dan
16. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur melalui reformasi birokrasi dan manajemen SDM berbasis kompetensi.

Arah kebijakan pembangunan yang tepat akan berkontribusi terhadap percepatan pencapaian hasil dari sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, yang akan dilaksanakan melalui 4 misi dan 5 tujuan, maka perlu dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Lubuk Linggau, arah kebijakan disusun sebagai pedoman strategis yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai utama yang terkandung dalam visi serta mendukung pencapaian tujuan yang termuat dalam misi.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan terciptanya sinergi dan efisiensi dalam mencapai target-target strategis. Dengan arah kebijakan yang terarah dan terpadu, diharapkan visi besar yang telah ditetapkan bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan menjadi realitas yang terwujud melalui langkah langkah strategis dan implementasi yang konsisten.

Berikut ini merupakan arah kebijakan dari masing-masing misi Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029.

Tabel 3.4.

Arah Kebijakan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar • Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan • Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan • Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS • Peningkatan akses pendidikan yang merata dan inklusif dari PAUD hingga pendidikan menengah. • Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik. • Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan • Dukungan bagi siswa dari keluarga tidak mampu melalui beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah. • Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembentukan karakter dan peningkatan ketangguhan masyarakat • Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. • Penguatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. • Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi, dan kepemimpinan. • Fasilitasi ruang aman dan ramah anak, serta pengembangan Kota Layak Anak. • Sinergi program pemberdayaan perempuan dan keluarga bersama lembaga masyarakat dan sektor swasta. • Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasional 	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
		<p>dan sertifikasi kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi pasar kerja berbasis digital. • Mendorong investasi sektor padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal. • Penguatan ekosistem kewirausahaan dan start-up lokal berbasis teknologi dan ekonomi kreatif. • Perlindungan tenaga kerja informal dan non-upah melalui program jaminan sosial. • Penguatan UMKM melalui pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk lokal. • Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penguatan distribusi barang strategis. • Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah (desa/kelurahan). • Insentif dan perlindungan bagi sektor informal serta usaha mikro. • Pengembangan sistem digitalisasi ekonomi masyarakat (e-commerce lokal). • Peningkatan efektivitas program bantuan sosial dan perlindungan sosial terpadu. • Peningkatan akurasi data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi berkala. • Pengembangan program pemberdayaan keluarga miskin dan rentan. • Penguatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak. • Kolaborasi lintas sektor dan stakeholder dalam program pengentasan kemiskinan. 	
2	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar kota (jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi). • Pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan dan terintegrasi antarwilayah. • Penataan kawasan perkotaan dengan pendekatan tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. • Pengembangan kawasan hijau kota dan ruang terbuka publik sebagai elemen penyeimbang lingkungan dan sosial. • Peningkatan ketaatan kesesuaian penataan ruang dengan daya dukung dan daya tampung wilayah • Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan program subsidi perumahan dari pemerintah daerah 	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, termasuk peningkatan kapasitas TPS3R dan partisipasi masyarakat. • Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. • Rehabilitasi dan konservasi kawasan resapan air, sempadan sungai, dan lahan kritis. • Edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan warga dan pelaku usaha. • Pengembangan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui infrastruktur hijau dan energi terbarukan. 	
3	Membangun Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sektor industri kecil dan menengah berbasis bahan baku lokal. • Pengembangan sentra industri pengolahan yang terintegrasi dengan pasar dan logistik. • Fasilitasi teknologi tepat guna untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. • Penguatan kapasitas pelaku industri melalui pelatihan, sertifikasi, dan akses permodalan. • Promosi produk industri pengolahan lokal melalui branding daerah dan e-commerce. • Peningkatan infrastruktur dan fasilitas perdagangan seperti pasar rakyat, kawasan niaga, dan logistik. • Digitalisasi sistem perdagangan melalui pengembangan platform dagang lokal. • Kemitraan antara UMKM dengan ritel modern, BUMD, dan pelaku usaha besar. • Peningkatan kapasitas SDM pelaku perdagangan, termasuk aspek pemasaran, keuangan, dan hukum dagang. • Perlindungan konsumen dan penataan tata niaga yang adil dan transparan. • Pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis alam, budaya, dan buatan. • Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke kawasan wisata prioritas. • Peningkatan promosi pariwisata melalui media digital dan event berskala lokal maupun nasional. • Pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung industri pariwisata (kuliner, 	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
		kriya, seni pertunjukan). <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata. 	
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem pelayanan publik yang berbasis digital dan terintegrasi. • Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) secara konsisten di seluruh unit layanan. • Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima. • Penerapan manajemen kinerja berbasis perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (e-performance). • Penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program. • Digitalisasi sistem administrasi pemerintahan untuk mendukung efisiensi kerja. • Evaluasi dan penataan sistem birokrasi agar lebih responsif dan adaptif. • Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pelaporan yang transparan. • Restrukturisasi kelembagaan daerah agar lebih ramping dan fungsional. • Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN (rekrutmen, promosi, dan mutasi). • Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui pelatihan berbasis kebutuhan. • Penerapan teknologi informasi dalam sistem manajemen kepegawaian (e-SDM). • Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, pelayanan, dan integritas. 	

Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

Tabel 3.5. Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Dengan Kota Lubuk Linggau

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi	Arah Kebijakan Kota Lubuk Linggau
1	Pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan hijau kota dan ruang terbuka publik sebagai elemen penyeimbang lingkungan dan sosial. 2. Peningkatan ketaatan kesesuaian penataan ruang dengan daya dukung dan daya tampung wilayah
2	Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan public	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar kota (jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi).
3	Penguatan promosi pariwisata	Peningkatan promosi pariwisata melalui media digital dan event berskala lokal maupun nasional.
4	Optimalisasi investasi sektor swasta	Penguatan ekosistem kewirausahaan dan start-up lokal berbasis teknologi dan ekonomi kreatif.
5	Scaling-up UMKM dan wirausaha muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung industri pariwisata (kuliner, kriya, seni pertunjukan). 2. Penguatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata.
6	Peningkatan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, termasuk peningkatan kapasitas TPS3R dan partisipasi masyarakat. 2. Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

3.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045. Kebijaksanaan pengembangan tata ruang wilayah Kota Lubuk Linggau dimaksudkan untuk mendukung tujuan pengembangan wilayah Kota Lubuk Linggau dalam meningkatkan fungsi dan peranan Kota Lubuk Linggau dalam konteks internal dan eksternal serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperlebar hubungan serta memperbesar orientasi dan pelayanan.

Kebijakan penataan ruang Kota Lubuk Linggau, meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota secara optimal;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem pergerakan kota yang optimal;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kota;
- d. Pelestarian kawasan lindung kota untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- e. Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- f. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa regional.

Lokus pengembangan Kota Lubuk Linggau berdasarkan RTRW Tahun 2025-2045, terdiri dari:

1. Pengembangan struktur ruang, terdiri dari:
 - a. Perwujudan pengembangan sistem pusat pelayanan kota secara optimal dengan strategi:
 - 1) Memantapkan fungsi Kota Lubuk Linggau sebagai PKW dalam hierarki Sistem Perkotaan Nasional;
 - 2) Memantapkan fungsi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan dalam sistem wilayah kota; dan
 - 3) Meningkatkan pelayanan intra wilayah yang diarahkan pada pemerataan pembangunan.
 - b. Perwujudan peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal, dengan strategi:
 - 1) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang meningkatkan interaksi kegiatan penyebaran aktivitas perekonomian;

- 2) Membangun jalan lingkar utara, lingkar barat, jalan lingkar selatan, dan jalan bebas hambatan (tol);
 - 3) Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung perkembangan pusat-pusat pelayanan kota;
 - 4) Meningkatkan integrasi sistem antarmoda;
 - 5) Mengembangkan rute penerbangan baru;
 - 6) Menyusun regulasi sektor perhubungan yang mengacu pada Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok);
 - 7) Penertiban hambatan samping lalu lintas dengan cara merelokasikan hambatan tersebut pada lokasi yang telah diperuntukan, terhadap pelanggaran hambatan samping tersebut dilakukan oleh tim gabungan;
 - 8) Upgrade dan downgrade fungsi jalan sesuai dengan kewenangan pengelolaan jalan; dan
 - 9) Meningkatkan konektivitas jalan dalam Kota Lubuk Linggau.
- c. Perwujudan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kota dengan strategi:
- 1) Mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - 2) Mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
 - 3) Mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan air baku di wilayah utara dan selatan kota;
 - 4) Meningkatkan pemerataan sistem penyediaan air minum di wilayah kota;
 - 5) Meningkatkan cakupan pelayanan sistem jaringan energi kawasan baru yang dikembangkan di wilayah utara dan selatan kota;
 - 6) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi di wilayah utara dan selatan kota;
 - 7) Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - 8) Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
 - 9) Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu;
 - 10) Mengembangkan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki pada kawasan perdagangan dan jasa;
 - 11) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan; dan
 - 12) Mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana.

- d. Perwujudan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dengan strategi:
- 1) Mengelola kawasan lindung secara terpadu;
 - 2) Menyediakan Ruang Terbuka Hijau kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
 - 3) Mengelola sumber daya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar.
- e. Perwujudan pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dengan strategi:
- 1) Menetapkan kawasan budi daya berdasarkan karakteristik wilayah dan perkembangan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2) Mengendalikan pengembangan kawasan budi daya agar sesuai peruntukannya;
 - 3) Mendistribusikan fasilitas sosial dan umum sesuai kebutuhan dan berdasarkan sebaran guna lahan;
 - 4) Pengembangan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - 5) menyediakan ruang bagi kegiatan sektor informal pada kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara; dan
 - 7) penyusunan kerangka acuan/cetak biru/masterplan diberbagai sektor atau klaster sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana penataan ruang dan wilayah.
- f. Perwujudan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa regional dengan strategi:
- 1) Menata koridor kawasan perdagangan dan jasa;
 - 2) Meremajakan pasar yang tidak tertata menjadi pasar yang berkualitas;
 - 3) Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sesuai hierarki pusat pelayanan kota; dan
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan dan jasa.

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Lubuk Linggau berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuk Linggau pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan food estate.
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Lubuk Linggau (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu terkait pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu yang merupakan bagian dari Trans Sumatera sepanjang 94,9 km. Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025-2029 antara lain diarahkan pada:

- 1) Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
- 2) Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- 3) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
- 4) Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 5) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lubuklinggau dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
- 6) Pengembangan SPAM Perkotaan Lubuklinggau.
- 7) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau (PHTC).
- 8) Preservasi jalan ruas Lubuklinggau-Tebing Tinggi-Lahat, Lubuklinggau-Rupit, Lubuklinggau-Curup.
- 9) Pengembangan kota agropolitan Lubuklinggau.
- 10) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- 11) Pengembangan destinasi wisata.

- 14) Pengembangan Kawasan Industri Lubuklinggau.
- 15) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.
- 16) Pengembangan konektivitas wilayah.
- 17) Pemenuhan amenitas perkotaan (antara lain ruang terbuka hijau,
- 18) ruang terbuka publik, jalur pedestrian, landmark kota).
- 19) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan perkotaan.
- 20) Optimalisasi kerjasama antar kabupaten/kota.
- 21) Penguatan promosi pariwisata.
- 22) Scaling-up UMKM dan wirausaha muda.
- 23) Optimalisasi investasi sektor swasta.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau diarahkan untuk menjadi **Pusat Perdagangan, Jasa, dan Konektivitas Regional Berbasis Perkotaan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Sumatera Selatan.**

3.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan global.
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan keterpaduan infrastruktur dan tata ruang kota untuk mendukung kota hijau dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan potensi daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Terkait penjabaran di atas, maka dapat dijelaskan sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel. 3.6. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV. SUMSEL
PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan global	PP 1. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas
PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.		PP 7. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal
PN 8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		
PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PD 4. Mengoptimalkan potensi daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan	PP 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		PP 3. Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PD 3. Meningkatkan keterpaduan infrastruktur dan tata ruang kota untuk mendukung kota hijau dan berkelanjutan	PP 4. Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV. SUMSEL
PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD 2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan kesejahteraan sosial masyarakat	PP 5. Meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PD 5. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	PP 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas

Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

3.2.4. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Perumusan program prioritas juga perlu memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Kegiatan Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2025-2029**

Misi	Kegiatan Unggulan (KU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau 2025-2029		Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius	1	Berobat Gratis (UHC dan Bantuan Berobat Gratis Untuk Masyarakat Miskin yang belum ditanggung Oleh BPJS)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial
	2	Berobat Gratis: Pemasangan Gigi Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Siti Aisyah
	3	Penyediaan Rumah Singgah Kesehatan di Palembang (Layanan Penginapan Keluarga Pasien rujukan di Palembang)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	4	Peningkatan Kualitas Puskesmas Perkotaan (Kelengkapan Sarpras dan Tenaga Medis)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	5	Penyediaan Layanan dan Insentif Tenaga Kesehatan Layad Rawat (Pelayanan Kesehatan Melalui Kunjungan Langsung Ke rumah Pasien Secara Terjadwal) dan Kader Posyandu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	6	Peningkatan Mutu dan Layanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah (RSUD Siti Aisyah dan Rumah Sakit Tematik)	1. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	7	Biaya Pendidikan dan Seragam Sekolah Gratis	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	8	Tali Asih Beasiswa Pendidikan Berkelanjutan dan Tuntas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Misi	Kegiatan Unggulan (KU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau 2025-2029		Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Karakter Kebangsaan	
	9	Insentif Guru Non ASN Berprestasi	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	10	SD dan SMP Berdaya Saing (Peningkatan Kualitas Guru dan Sarana dan Prasarana)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	11	Menjadi Kota Tujuan Pendidikan Melalui Kemudahan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Lubuk Linggau	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	12	Insentif Tokoh Seni dan Budaya di Setiap Kecamatan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	13	Pembentukan Sanggar Seni dan Budaya di Setiap Kecamatan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	14	Pembangunan Linggau Heritage untuk Pelestarian Adat dan Budaya Wang Linggau (Kawasan Adat, Seni dan Budaya)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	15	Pemuda Mitra Juara Melalui Penguatan Kelembagaan dan Bantuan Anggaran untuk Organisasi Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	16	Pemuda Mandiri Melalui Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	17	Membuka Kesempatan dan Lapangan Kerja bagi Pemuda Melalui Aneka Usaha BUMD (Boga, Konveksi, Elektronik dan Otomotif)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	18	Memakmurkan Rumah Ibadah Seluruh Agama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
	19	Santunan Amal Kematian sebesar Rp. 2 juta	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
	20	Pemberian Insentif Guru Ngaji, Pengurus Masjid, Pengurus Jenazah, Penggali Kubur	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
	21	Pendirian rumah Tahfidz di Setiap Kelurahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
	22	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah dan Pondok Pesantren	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

Misi	Kegiatan Unggulan (KU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau 2025-2029		Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	23	Kenaikan Insentif Ketua RT, LPM, PKH, TSKS dan Insentif PSM	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
			1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	24	Membangun Sistem Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Terpadu (Tenaga Kerja Bersertifikasi)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
MISI 2 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	25	Penyediaan Air Bersih dengan Optimalisasi Pelayanan PDAM/ Revitalisasi Jaringan Perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	26	Penanganan Persampahan sampai tingkat RT di dukung sarana dan prasarana yang baik	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	27	Tuntas Akses Permukiman yang Mulus, Hijau dan Terang Benderang	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 3. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	28	Modernisasi Gedung Pemerintahan	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	29	Revitalisasi dan Pemanfaatan Aset-aset Pemerintah untuk Kegiatan Sosial Masyarakat	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	30	Pembangunan Pedestrian Sepanjang Jalan Protokol	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	31	Pembangunan Kawasan Bisnis Kaki Lima	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	32	Dukungan Pengembangan Bandara Silampari Menjadi Terminal Cargo	Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan

Misi	Kegiatan Unggulan (KU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau 2025-2029		Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	33	Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Publik yang Berwawasan Lingkungan (Taman Tematik) di setiap Kecamatan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	34	Peningkatan Konektivitas Wilayah yang Cepat dalam Kondisi mantap Melalui Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	35	Optimalisasi Terminal dengan Terminal Petanang sebagai pusat AKAP dan pasar Penyangga, dan Terminal Kayu Ara sebagai Terminal Agrobisnis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
MISI 3 Membangun Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal	36	Fasilitasi Akses Perizinan dan Bantuan Permodalan UMKM 2-5 Juta	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
	37	Revitalisasi Pasar Inpres (Linggau Grosir Modern) dan Pembangunan Pasar Tradisional pada Kawasan Permukiman Baru	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	38	Perluasan peluang usaha UMKM melalui Hilirisasi Produk unggulan lokal dan daerah penyangga (Pengolahan, pengemasan, dan pemasaran secara offline dan online)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
	39	Penyediaan Ruang Usaha Pedagang dan UMKM di Setiap Kecamatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
	40	Linggau Ecopark (Revitalisasi Objek Wisata Temam - Bumi Perkemahan)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	41	Pengembangan Sport Tourism	Program Pemasaran Pariwisata Program	Dinas Pariwisata
	42	Peningkatan Kalender Event di tempat Wisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
	43	Pelatihan JULEHA (Juru Sembelih Halal)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian

Misi	Kegiatan Unggulan (KU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau 2025-2029		Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	44	Pemuda Layak Kerja melalui Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	
MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	45	Pelayanan Publik yang Profesional dan Inovatif (<i>Linggau Smart Service</i>)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-tiksan)	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		46	Bantuan Program RT Maksimal Sebesar Rp. 20 Juta Per Tahun	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8 Kecamatan
		47	Zero Blank Spot: Pemerataan Akses Jaringan komunikasi untuk daerah yang mengalami blank spot	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo-tiksan
	48	Penguatan Kelembagaan BUMD (Permodalan dan Aneka Bidang Usaha)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
	49	Peningkatan Penambahan Penghasilan bagi ASN (TPP 14 Bulan)	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	50	Pendirian Rumah Pengaduan Sosial Masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	

Sumber: Analisis Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2025

Agar program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat terlaksana, perlu disesuaikan dengan program nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Jika Program prioritas yang bersumber dari Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati tersebut belum cukup memadai atau dirasa masih kurang untuk menjawab tujuan, dimana tujuan ini menjawab visi dan misi, maka ditambah Program Perangkat Daerah lainnya. Program Perangkat Daerah lainnya tersebut dipilih atau diseleksi yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Sinkronisasi program prioritas dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Program Prioritas RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
20252029 - Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius - Mewujudkan Infrastruktur yang Merata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan - Membangun Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Sekitarnya - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan masyarakat yang tidak aktif atau tidak punya jaminan kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase puskesmas dengan pemeriksaan kesehatan gratis > 80% (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre eclampsia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (SPA dan SDM) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Posyandu Bidang Kesehatan Yang Aktif (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklm Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklm Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Iklm Keamanan SMP (Nilai)		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)		
				Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial				Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Nilai)		
					Tingkat Kemiskinan ((%))		
	Menurunnya Angka Pengangguran				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirusaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya daya beli masyarakat		Indeks Pengeluaran (Indeks)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)		
				Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)		
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
		Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
				(Persentase)			
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
			Meningkatnya rehabilitas sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Indeks Layanan Infrastruktur (Indeks)		
			Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas, Nyaman dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan (Indeks)		
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya keterhubungan wilayah dan kapasitas pendukung transportasi udara	Tingkat pemanfaatan fasilitas udara untuk aktivitas transportasi dan logistik daerah (%)	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luasan kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya (Ha)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas perumahan	Tersedianya Dokumen dan Database Perumahan dan Permukiman (Dokumen)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Utilitas Umum) (Persentase)	UMUM (PSU)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				daerah Kab/Kota (%)	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Persentase Pengurangan Sampah (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase rencana pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terlaksana (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				PDRB Per Kapita (ADHB)(Ribu Rupiah)		
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			terintegrasi			
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya program dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata		Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya (Produk)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kelestarian laut dan Keanekaragaman	Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkat produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
				Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan pajak daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan retribusi daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	nilai aspek teknologi digital pada evaluasi pemerintahan digital (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian tibumtranmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.				
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>				
			Meningkatnya penerapan sistem informasi perpajakan berbasis digital	Persentase Peningkatan Target Retribusi Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Tercapainya kalaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha. (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan				Nilai SAKIP (Nilai)				
						Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)				
						Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Nilai)				
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
								Persentase perangkat daerah dengan maturity minimal level 3 (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tingkat Penyelesaian PKPT tepat Waktu (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)			
				Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)			
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sub bab ini menguraikan program-program Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan, strategi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Setiap program disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan daerah, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuk Linggau secara berkelanjutan.

Perencanaan program perangkat daerah disusun secara terarah dan berkesinambungan, dengan periode implementasi yang direncanakan mulai tahun 2025 hingga 2030. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan konsistensi pembangunan yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program perangkat daerah yang dirancang hingga tahun 2030 juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2030 akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2030, yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030–2034. Dengan demikian, arah kebijakan dan program yang disusun pada periode ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan jangka menengah saat ini, tetapi juga mempersiapkan fondasi yang kuat bagi kesinambungan pembangunan kota pada periode kepemimpinan selanjutnya.

Selain itu, penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas program yang dilaksanakan. Evaluasi capaian kinerja yang telah diperoleh menjadi dasar penyusunan strategi baru, penajaman prioritas pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan perencanaan program perangkat daerah yang jelas, terarah, dan berorientasi masa depan, diharapkan pembangunan Kota Lubuk Linggau dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih rinci, Program Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					235.801.929.247,00		247.000.653.438,00		252.102.589.014,00		257.483.644.571,00		263.038.536.138,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					170.722.246.679,00		178.780.653.438,00		183.154.354.519,00		187.743.265.920,00		192.447.201.681,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	170.722.246.679,00	100	178.780.653.438,00	100	183.154.354.519,00	100	187.743.265.920,00	100	192.447.201.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					64.879.605.688,00		68.000.000.000,00		68.725.886.041,00		69.515.475.643,00		70.363.687.235,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	72,41	75,45	78,49	64.879.605.688,00	81,53	68.000.000.000,00	84,5	68.725.886.041,00	87,46	69.515.475.643,00	90,43	70.363.687.235,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98,51	98,75	98,99		99,23		99,46		99,7		99,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	12,8	13,56	14,33		15,09		15,85		16,62		17,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	70,75	75,94	88,49		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	55,17	63,46	64,21		64,96		65,71		66,46		67,21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	59,6	62,1	64,6		67,1		69,6		72,1		74,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	56,2	58,6	61		63,4		65,8		68,2		70,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Keamanan SD (Nilai)	74,65	75,55	76,45		77,35		78,25		79,15		80,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Keamanan SMP (Nilai)	68,22	69,72	71,22		72,72		74,22		75,72		77,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	70,7	71,7	72,7		73,7		74,7		75,7		76,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	68,07	69,07	70,07		71,07		72,07		73,07		74,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000,00		70.000.000,00		70.747.235,00		71.560.048,00		72.433.207,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	55	60	65	100.000.000,00	70	70.000.000,00	75	70.747.235,00	80	71.560.048,00	85	72.433.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100.076.880,00		150.000.000,00		151.601.219,00		153.342.960,00		155.214.015,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	100	100	100	100.076.880,00	100	150.000.000,00	100	151.601.219,00	100	153.342.960,00	100	155.214.015,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					161.207.523.433,92		166.227.944.322,00		168.467.555.967,00		171.117.074.508,00		172.901.183.919,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					118.530.846.113,92		121.253.535.112,00		123.229.939.371,00		125.789.290.595,00		127.521.454.478,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	118.530.846.113,92	100	121.253.535.112,00	100	123.229.939.371,00	100	125.789.290.595,00	100	127.521.454.478,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					40.396.624.000,00		42.623.226.000,00		42.839.502.000,00		42.882.149.000,00		42.898.490.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,22	1,45	1,4	40.396.624.000,00	1,3	42.623.226.000,00	1,2	42.839.502.000,00	1,1	42.882.149.000,00	1	42.898.490.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	39	37	35		31		27		23		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	63	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-	95	96		96		98		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	5	11	10		9		8		7		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	105	90	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)	20	25	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-	83	86		89		92		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (SPA dan SDM) (%)	16,67	20	25		33,33		41,67		50		58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	83,06	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	13,9	15,2	19,4		25		36,1		50		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase puskesmas dengan pemeriksaan kesehatan gratis > 80% (%)	-	25	30		50		80		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	54	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)	1,43	1,42	1,41		1,40		1,39		1,38		1,37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Cakupan masyarakat yang tidak aktif atau tidak punya jaminan kesehatan masyarakat (%)	18	16	14		12		10		8		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre eclampsia (%)	18	25	40		55		65		75		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	6,29	6,19	6,1		5,9		5,7		5,5		5,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						659.544.000,00		680.114.000,00		693.724.000,00		707.598.000,00		717.976.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Presentase)	90	90	100	659.544.000,00	100	680.114.000,00	100	693.724.000,00	100	707.598.000,00	100	717.976.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai	50	50	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	standar (Persentase)													
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					54.684.000,00		56.390.140,00		57.517.944,00		58.668.302,00		59.841.668,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	31	45	60	54.684.000,00	65	56.390.140,00	70	57.517.944,00	75	58.668.302,00	77	59.841.668,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.565.825.320,00		1.614.679.070,00		1.646.872.652,00		1.679.368.611,00		1.703.421.773,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Posyandu Bidang Kesehatan Yang Aktif (%)	100	100	100	1.565.825.320,00	100	1.614.679.070,00	100	1.646.872.652,00	100	1.679.368.611,00	100	1.703.421.773,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					104.429.487.924,00		120.580.549.841,00		127.829.648.500,00		132.397.127.126,00		137.627.185.291,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.926.096.320,00		8.928.522.919,00		9.217.098.492,00		9.499.513.455,00		9.790.863.791,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	8.926.096.320,00	100	8.928.522.919,00	100	9.217.098.492,00	100	9.499.513.455,00	100	9.790.863.791,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					10.363.297.000,00		11.296.500.000,00		12.316.150.000,00		13.177.765.000,00		16.914.041.500,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	42,01	42,82	43,81	10.363.297.000,00	44,80	11.296.500.000,00	45,88	12.316.150.000,00	46,99	13.177.765.000,00	48,19	16.914.041.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik (%)	20,05	25,23	31,29		40,09		49,77		60,42		72,13		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.800.000.000,00		1.450.000.000,00		1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.850.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	32,01	32,25	32,50	1.800.000.000,00	33,00	1.450.000.000,00	33,50	1.500.000.000,00	34,00	1.550.000.000,00	34,50	1.850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					7.400.000.000,00		5.400.000.000,00		18.350.000.000,00		1.300.000.000,00		8.000.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	56,64	59,39	59,97	7.400.000.000,00	62,81	5.400.000.000,00	65,56	18.350.000.000,00	68,24	1.300.000.000,00	72,96	8.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.050.000.000,00		11.100.000.000,00		2.600.000.000,00		11.100.000.000,00		3.100.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	90	90,81	91,02	3.050.000.000,00	91,23	11.100.000.000,00	91,44	2.600.000.000,00	91,65	11.100.000.000,00	91,86	3.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					8.500.000.000,00		14.300.000.000,00		14.300.000.000,00		14.300.000.000,00		16.300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	89,65	91,65	93,45	8.500.000.000,00	95,09	14.300.000.000,00	96,73	14.300.000.000,00	98,36	14.300.000.000,00	100	16.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					8.964.800.000,00		13.600.000.000,00		13.600.000.000,00		13.900.000.000,00		15.600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	8.964.800.000,00	100	13.600.000.000,00	100	13.600.000.000,00	100	13.900.000.000,00	100	15.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					3.939.000.000,00		2.200.000.000,00		2.700.000.000,00		4.500.000.000,00		3.700.000.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	3.939.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.700.000.000,00	100	4.500.000.000,00	100	3.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					48.300.000.000,00		49.389.126.922,00		50.300.000.008,00		60.093.448.671,00		59.165.880.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	63,42	63,42	63,42	48.300.000.000,00	64,92	49.389.126.922,00	66,42	50.300.000.008,00	67,92	60.093.448.671,00	69,42	59.165.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.249.895.260,00		1.280.000.000,00		1.310.000.000,00		1.340.000.000,00		1.370.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	100	100	100	1.249.895.260,00	100	1.280.000.000,00	100	1.310.000.000,00	100	1.340.000.000,00	100	1.370.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.936.399.344,00		1.636.400.000,00		1.636.400.000,00		1.636.400.000,00		1.836.400.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR (%)	95	95	95	1.936.399.344,00	95	1.636.400.000,00	95	1.636.400.000,00	95	1.636.400.000,00	95	1.836.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					74.445.786.052,00		72.580.080.525,00		74.196.656.327,00		76.046.417.911,00		77.298.556.389,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.918.788.042,00		7.880.510.525,00		7.758.227.066,00		7.946.186.848,00		8.143.420.007,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	7.918.788.042,00	100	7.880.510.525,00	100	7.758.227.066,00	100	7.946.186.848,00	100	8.143.420.007,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					298.563.500,00		630.000.000,00		650.000.000,00		675.000.000,00		700.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	5,80	11,70	298.563.500,00	17,60	630.000.000,00	17,60	650.000.000,00	23,50	675.000.000,00	23,50	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.300.788.000,00		3.500.000.000,00		4.500.000.000,00		5.500.000.000,00		6.500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luasan kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya (Ha)	314,42	34,42	30	2.300.788.000,00	30	3.500.000.000,00	30	4.500.000.000,00	30	5.500.000.000,00	30	6.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.000.000.000,00		1.289.570.000,00		1.996.404.876,00		1.603.371.844,00		1.610.856.063,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perumahan	Tersedianya Dokumen dan Database Perumahan dan Permukiman (Dokumen)	2	1	1	1.000.000.000,00	1	1.289.570.000,00	1	1.996.404.876,00	1	1.603.371.844,00	1	1.610.856.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					62.906.226.410,00		59.230.000.000,00		59.217.024.385,00		60.221.859.219,00		60.219.280.319,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	38,22	40	50	62.906.226.410,00	60	59.230.000.000,00	70	59.217.024.385,00	80	60.221.859.219,00	100	60.219.280.319,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.420.100,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	7,3	14	16,30	21.420.100,00	18,50	50.000.000,00	20,70	75.000.000,00	23	100.000.000,00	23	125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.942.090.053,00		18.250.910.240,00		18.696.395.758,00		19.086.797.110,00		19.442.143.148,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.087.266.073,00		12.247.999.260,00		12.535.494.091,00		12.829.299.498,00		13.062.821.237,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.385.946.124,00	100	6.496.439.824,00	100	6.625.140.324,00	100	6.815.416.763,00	100	6.987.654.046,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	85	85	90	5.701.319.949,00	90	5.751.559.436,00	90	5.910.353.767,00	95	6.013.882.735,00	95	6.075.167.191,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.750.005.880,00		2.867.910.980,00		2.973.319.250,00		3.023.004.300,00		3.096.727.544,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	88,24	100	100	66.767.520,00	100	99.660.240,00	100	124.245.100,00	100	129.989.400,00	100	152.158.144,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian tibumtranmas (%)	100	100	100	2.650.270.240,00	100	2.711.360.740,00	100	2.766.509.650,00	100	2.801.757.900,00	100	2.845.338.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	2,88	2,9	2,9	30.505.240,00	2,9	32.045.500,00	2,9	52.350.000,00	2,9	58.322.000,00	2,9	65.521.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	20	2.462.880,00	25	24.844.500,00	50	30.214.500,00	65	32.935.000,00	75	33.710.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						455.317.836,00		435.000.000,00		404.269.917,00		408.914.562,00		413.904.042,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	66.239.520,00	100	105.000.000,00	100	159.000.000,00	100	158.000.000,00	100	158.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	95	100	100	42.267.000,00	100	125.000.000,00	100	125.269.917,00	100	125.914.562,00	100	125.904.042,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	346.811.316,00	100	205.000.000,00	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.649.500.264,00		2.700.000.000,00		2.783.312.500,00		2.825.578.750,00		2.868.690.325,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	2.588.608.264,00	100	2.566.875.000,00	100	2.648.312.500,00	100	2.690.578.750,00	100	2.733.690.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	98	100	100	60.892.000,00	100	133.125.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.366.201.029,00		5.583.094.118,00		5.713.973.962,00		5.852.098.588,00		5.997.067.090,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.128.060.311,00		3.928.894.118,00		4.058.773.962,00		4.387.898.588,00		4.331.867.090,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	75	75	80	4.128.060.311,00	85	3.928.894.118,00	90	4.058.773.962,00	95	4.387.898.588,00	100	4.331.867.090,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					380.844.000,00		443.800.000,00		539.800.000,00		443.800.000,00		539.800.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	75	75	80	380.844.000,00	85	443.800.000,00	90	539.800.000,00	95	443.800.000,00	100	539.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					18.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	18.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					284.609.790,00		275.000.000,00		275.000.000,00		225.000.000,00		275.000.000,00	
Meningkatnya rehabilitas sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	75	75	80	284.609.790,00	85	275.000.000,00	90	275.000.000,00	95	225.000.000,00	100	275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					271.890.768,00		423.400.000,00		423.400.000,00		423.400.000,00		423.400.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	75	75	80	271.890.768,00	85	423.400.000,00	90	423.400.000,00	95	423.400.000,00	100	423.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					282.796.160,00		302.000.000,00		357.000.000,00		312.000.000,00		367.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	282.796.160,00	100	302.000.000,00	100	357.000.000,00	100	312.000.000,00	100	367.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					0,00		185.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	0,00	100	185.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.045.000.000,00		6.255.000.000,00		6.355.000.000,00		6.455.000.000,00		6.755.000.000,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.300.000.000,00		5.300.000.000,00		5.700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	5.000.000.000,00	100	5.100.000.000,00	100	5.300.000.000,00	100	5.300.000.000,00	100	5.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	0,00	100	0,00	100	100.000.000,00	100	0,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	45,70	45,90	46,30	550.000.000,00	46,90	550.000.000,00	47,50	550.000.000,00	48,00	550.000.000,00	48,50	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					80.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	30,30	34,60	35,50	80.000.000,00	36,00	300.000.000,00	37,40	100.000.000,00	37,90	300.000.000,00	38,40	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					415.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	30,30	30,70	31,00	415.000.000,00	31,60	305.000.000,00	32,10	305.000.000,00	32,80	305.000.000,00	33,20	305.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.101.425.412,00		4.146.490.117,03		4.248.756.367,96		4.339.231.039,56		4.425.054.997,41	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.340.714.188,00		3.377.420.524,05		3.460.718.958,41		3.534.412.854,73		3.604.318.627,68	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	3.340.714.188,00	100	3.377.420.524,05	100	3.460.718.958,41	100	3.534.412.854,73	100	3.604.318.627,68	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					127.318.100,00		128.717.016,73		131.891.606,89		134.700.158,10		137.364.339,97	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	54	55	56	127.318.100,00	57	128.717.016,73	58	131.891.606,89	59	134.700.158,10	60	137.364.339,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	74,71	75,08	75,46		75,84		76,21		76,60		76,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					170.138.096,00		172.007.500,50		176.249.778,11		180.002.909,48		183.563.116,80	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	170.138.096,00	100	172.007.500,50	100	176.249.778,11	100	180.002.909,48	100	183.563.116,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					23.421.000,00		23.678.339,91		24.262.326,61		24.778.978,03		25.269.071,77	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	60	65	70	23.421.000,00	75	23.678.339,91	80	24.262.326,61	85	24.778.978,03	90	25.269.071,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					26.974.540,00		27.270.924,69		27.943.516,48		28.538.556,60		29.103.009,57	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	89	90	91	26.974.540,00	92	27.270.924,69	93	27.943.516,48	94	28.538.556,60	95	29.103.009,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					155.000.184,00		156.703.259,61		160.568.083,69		163.987.282,95		167.230.723,45	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	64	65	66	155.000.184,00	67	156.703.259,61	68	160.568.083,69	69	163.987.282,95	70	167.230.723,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					257.859.304,00		260.692.551,54		267.122.097,77		272.810.299,67		278.206.108,17	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	257.859.304,00	100	260.692.551,54	100	267.122.097,77	100	272.810.299,67	100	278.206.108,17	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	64	65	66		67		68		69		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.578.932.600,38		3.670.390.727,00		3.748.875.270,00		3.829.314.024,00		3.911.713.050,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.174.068.452,00		3.234.390.727,00		3.308.221.059,50		3.383.597.150,76		3.460.557.643,62	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	3.174.068.452,00	100	3.234.390.727,00	100	3.308.221.059,50	100	3.383.597.150,76	100	3.460.557.643,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					32.000.000,00		32.000.000,00		32.341.593,43		32.713.165,01		33.112.323,40	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	11	13	15	32.000.000,00	17	32.000.000,00	19	32.341.593,43	21	32.713.165,01	23	33.112.323,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					298.864.148,38		330.000.000,00		333.522.682,26		337.354.514,15		341.470.835,11	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,3	94	95	298.864.148,38	96	330.000.000,00	97	333.522.682,26	98	337.354.514,15	100	341.470.835,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					38.000.000,00		38.000.000,00		38.405.642,20		38.846.883,45		39.320.884,04	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan	7,07	7,00	6,50	38.000.000,00	6,00	38.000.000,00	5,50	38.405.642,20	5,00	38.846.883,45	4,5	39.320.884,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Rawan Pangan (%)														
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					36.000.000,00		36.000.000,00		36.384.292,61		36.802.310,63		37.251.363,83		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	36.000.000,00	100	36.000.000,00	100	36.384.292,61	100	36.802.310,63	100	37.251.363,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.282.605.168,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.600.000.000,00		1.649.882.734,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.282.605.168,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.600.000.000,00		1.649.882.734,00		
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.282.605.168,00	100	1.650.000.000,00	100	1.650.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.649.882.734,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.138.605.458,17		18.245.913.614,00		18.424.779.553,00		18.966.736.588,00		19.283.644.175,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.648.541.387,17		6.100.000.000,00		6.161.913.814,00		6.229.261.160,00		6.301.608.621,00		
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah h	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	5.648.541.387,17	100	6.100.000.000,00	100	6.161.913.814,00	100	6.229.261.160,00	100	6.301.608.621,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					101.394.504,00		113.000.000,00		114.312.999,00		115.741.228,00		117.275.493,00		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	50	50	101.394.504,00	50	113.000.000,00	50	114.312.999,00	50	115.741.228,00	50	117.275.493,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					547.535.864,00		590.000.000,00		594.803.657,00		600.028.882,00		605.642.047,00		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase rencana pelaksanaan pengendalian pencemaran dan	0	0	30	547.535.864,00	40	590.000.000,00	50	594.803.657,00	60	600.028.882,00	70	605.642.047,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kerusakan lingkungan hidup yang terlaksana (%)													
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					70.610.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		77.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	21,05	21,05	21	70.610.000,00	22	71.000.000,00	23	71.000.000,00	24	71.000.000,00	25	77.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					49.932.936,00		50.000.000,00		50.533.739,00		51.114.320,00		51.738.005,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	15	49.932.936,00	20	50.000.000,00	25	50.533.739,00	30	51.114.320,00	35	51.738.005,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					31.980.120,00		32.000.000,00		32.341.593,00		32.713.165,00		33.112.323,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	33	33	50	31.980.120,00	50	32.000.000,00	50	32.341.593,00	50	32.713.165,00	50	33.112.323,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					9.999.968,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	100	9.999.968,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					45.000.000,00		45.000.000,00		45.480.365,00		46.002.888,00		46.564.204,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	80	45.000.000,00	80	45.000.000,00	80	45.480.365,00	80	46.002.888,00	80	46.564.204,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					54.077.429,00		54.000.000,00		54.576.438,00		55.203.465,00		55.877.045,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	54.077.429,00	100	54.000.000,00	100	54.576.438,00	100	55.203.465,00	100	55.877.045,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					10.579.533.250,00		11.180.913.614,00		11.289.816.948,00		11.755.671.480,00		11.984.826.437,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	0,28	0,25	1	10.579.533.250,00	1,5	11.180.913.614,00	2	11.289.816.948,00	2,5	11.755.671.480,00	3	11.984.826.437,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Sampah (%)	87,67	87,87	88		88,5		89		89,5		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.559.615.680,00		5.602.769.540,00		5.688.064.034,00		5.816.069.540,00		5.952.018.428,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.827.865.580,00		4.841.019.440,00		4.891.019.440,00		4.991.019.440,00		5.026.968.328,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	4.827.865.580,00	100	4.841.019.440,00	100	4.891.019.440,00	100	4.991.019.440,00	100	5.026.968.328,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					375.747.700,00		405.747.700,00		441.042.194,00		469.047.700,00		569.047.700,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	100	100	100	375.747.700,00	100	405.747.700,00	100	441.042.194,00	100	469.047.700,00	100	569.047.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	19	20	22		24		25		27		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	65	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL						27.564.000,00		27.564.000,00		27.564.000,00		27.564.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	65	66	70	27.564.000,00	73	27.564.000,00	74	27.564.000,00	75	27.564.000,00	77	27.564.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	63	64	65		66		67		68		69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	62	63	64		65		66		67		69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						326.400.000,00		326.400.000,00		326.400.000,00		326.400.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	326.400.000,00	100	326.400.000,00	100	326.400.000,00	100	326.400.000,00	100	326.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						2.038.400,00		2.038.400,00		2.038.400,00		2.038.400,00		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	2.038.400,00	100	2.038.400,00	100	2.038.400,00	100	2.038.400,00	100	2.038.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.550.714.000,00		1.567.752.580,97		1.606.418.579,04		1.640.626.281,44		1.673.075.588,59	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.550.714.000,00		1.567.752.580,97		1.606.418.579,04		1.640.626.281,44		1.673.075.588,59	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	1.550.714.000,00	100	1.567.752.580,97	100	1.606.418.579,04	100	1.640.626.281,44	100	1.673.075.588,59	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.590.292.157,00		8.087.139.730,00		8.223.893.366,00		8.355.036.884,00		8.491.948.730,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.392.164.054,00		3.369.139.730,00		3.443.401.586,95		3.519.622.181,17		3.597.533.426,70	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	3.392.164.054,00	100	3.369.139.730,00	100	3.443.401.586,95	100	3.519.622.181,17	100	3.597.533.426,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					244.542.752,00		230.000.000,00		232.455.202,79		235.125.873,50		237.994.824,47	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,17	2,16	2,16	244.542.752,00	2,15	230.000.000,00	2,14	232.455.202,79	2,14	235.125.873,50	2,14	237.994.824,47	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	17,1	17	17		16,9		19,9		16,8		16,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	67,9	71,5	75,2		79,2		83,3		87,7		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.455.195.911,00		2.888.000.000,00		2.930.956.904,70		2.964.630.578,90		3.000.804.308,58	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	63,90	64	64,49	2.455.195.911,00	70	2.888.000.000,00	70,40	2.930.956.904,70	70,99	2.964.630.578,90	72	3.000.804.308,58	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	16,23	10,50	9,80		9,30		9,00		8,40		7,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	89,3	89,4	89,5		89,6		89,8		89,9		90,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	79,16	81,9	82,5		83,8		84,5		85,1		85,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	13	13,2	12,7		12,2		11,7		11,3		10,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.498.389.440,00		1.600.000.000,00		1.617.079.671,56		1.635.658.250,43		1.655.616.170,25	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	24,50	25	25,50	1.498.389.440,00	26	1.600.000.000,00	27	1.617.079.671,56	27,50	1.635.658.250,43	28	1.655.616.170,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	66,9	67,1	67,6		68,1		68,6		69,2		70,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	84	84,6	85,6		86,6		87,6		88,7		89,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.716.598.278,00		17.460.430.000,00		15.782.591.612,00		15.861.086.108,00		15.945.408.319,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.516.440.732,00		6.300.000.000,00		6.367.251.206,50		6.440.404.361,00		6.518.988.670,05	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.516.440.732,00	100	6.300.000.000,00	100	6.367.251.206,50	100	6.440.404.361,00	100	6.518.988.670,05	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					200.157.546,00		9.360.430.000,00		9.365.340.405,50		9.370.681.747,00		9.376.419.648,95	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,50	0,55	0,60	200.157.546,00	0,65	9.360.430.000,00	0,70	9.365.340.405,50	0,75	9.370.681.747,00	0,80	9.376.419.648,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					0,00		1.800.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya keterhubungan wilayah dan kapasitas pendukung transportasi udara	Tingkat pemanfaatan fasilitas udara untuk aktivitas transportasi dan logistik daerah (%)	0	0	0	0,00	100	1.800.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.622.802.552,65		9.738.657.604,00		9.982.124.043,00		10.231.727.145,00		10.487.469.074,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.027.674.840,65		5.028.651.699,00		5.154.367.991,00		5.283.277.191,00		5.415.307.871,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	5.027.674.840,65	100	5.028.651.699,00	100	5.154.367.991,00	100	5.283.277.191,00	100	5.415.307.871,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.679.529.880,00		1.721.518.127,00		1.764.556.080,00		1.808.669.982,00		1.853.886.732,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	67	67	72	1.679.529.880,00	77	1.721.518.127,00	82	1.764.556.080,00	83	1.808.669.982,00	83	1.853.886.732,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.915.597.832,00		2.988.487.778,00		3.063.199.972,00		3.139.779.972,00		3.218.274.471,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	nilai aspek teknologi digital pada evaluasi pemerintahan digital (Nilai)	3	3	3,1	2.915.597.832,00	3,2	2.988.487.778,00	3,3	3.063.199.972,00	3,4	3.139.779.972,00	3,5	3.218.274.471,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.709.173.194,00		5.989.335.642,00		6.053.704.726,00		6.123.722.745,00		6.198.939.154,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.299.011.740,00		3.359.335.642,00		3.395.630.019,00		3.435.109.500,00		3.477.520.078,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	3.299.011.740,00	100	3.359.335.642,00	100	3.395.630.019,00	100	3.435.109.500,00	100	3.477.520.078,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					100.000.000,00		100.000.000,00		101.067.479,00		102.228.640,00		103.476.010,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	40	50	52	100.000.000,00	54	100.000.000,00	56	101.067.479,00	58	102.228.640,00	60	103.476.010,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					100.000.000,00		100.000.000,00		101.067.479,00		102.228.640,00		103.476.010,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	14,1	15	16,5	100.000.000,00	17,4	100.000.000,00	18,8	101.067.479,00	21,2	102.228.640,00	23,5	103.476.010,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					100.000.000,00		100.000.000,00		101.067.479,00		102.228.640,00		103.476.010,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	15,2	15,8	16	100.000.000,00	16,5	100.000.000,00	17,3	101.067.479,00	18	102.228.640,00	18,5	103.476.010,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					99.621.382,00		110.000.000,00		111.174.227,00		112.451.504,00		113.823.611,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20	23	25	99.621.382,00	30	110.000.000,00	32	111.174.227,00	35	112.451.504,00	40	113.823.611,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.901.862.200,00		2.100.000.000,00		2.122.417.068,00		2.146.801.453,00		2.172.996.223,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	1,01	1,2	1,3	1.901.862.200,00	1,9	2.100.000.000,00	2	2.122.417.068,00	2,1	2.146.801.453,00	4,2	2.172.996.223,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					108.677.872,00		120.000.000,00		121.280.975,00		122.674.368,00		124.171.212,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalai Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	30	35	40	108.677.872,00	45	120.000.000,00	50	121.280.975,00	55	122.674.368,00	60	124.171.212,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.366.369.713,00		5.450.847.116,00		5.567.561.454,00		5.690.787.871,00		5.787.145.247,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.808.661.065,00		4.983.138.616,00		5.099.852.954,00		5.198.860.151,00		5.295.217.527,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	4.808.661.065,00	100	4.983.138.616,00	100	5.099.852.954,00	100	5.198.860.151,00	100	5.295.217.527,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					54.843.440,00		118.305.319,70		118.305.319,70		118.305.319,70		118.305.319,70	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	1,642	1,840	1,987	54.843.440,00	2,185	118.305.319,70	2,404	118.305.319,70	2,645	118.305.319,70	2,909	118.305.319,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					273.923.000,00		189.403.180,30		189.403.180,30		189.403.180,30		189.403.180,30	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	10	15	273.923.000,00	20	189.403.180,30	25	189.403.180,30	30	189.403.180,30	35	189.403.180,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					77.842.800,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	100	100	100	77.842.800,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sesuai Ketentuan (Persentase)													
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					128.073.200,00		45.000.000,00		45.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha. (%)	100	100	100	128.073.200,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	57.000.000,00	100	57.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					23.026.208,00		35.000.000,00		35.000.000,00		47.219.220,00		47.219.220,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	23.026.208,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	47.219.220,00	100	47.219.220,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9.868.605.095,38		10.474.999.999,00		10.601.965.048,00		10.713.561.540,00		10.816.194.552,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.359.131.271,38		4.000.000.000,00		4.642.699.178,09		4.089.145.625,76		4.139.040.424,30	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	4.359.131.271,38	100	4.000.000.000,00	100	4.642.699.178,09	100	4.089.145.625,76	100	4.139.040.424,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.292.118.816,00		1.021.243.722,75		1.142.160.638,92		1.182.303.145,51		1.241.418.302,78	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	4,64	4,64	4,74	1.292.118.816,00	4,80	1.021.243.722,75	4,90	1.142.160.638,92	5,0	1.182.303.145,51	5,0	1.241.418.302,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3.918.590.608,00		4.602.251.544,25		4.151.629.785,37		5.089.703.986,63		4.631.434.709,52	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	3,21	3,21	3,21	3.918.590.608,00	4,17	4.602.251.544,25	4,81	4.151.629.785,37	5,77	5.089.703.986,63	6,41	4.631.434.709,52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					298.764.400,00		851.504.732,00		665.475.445,62		352.408.782,10		804.301.115,40	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	19,03	19,03	21,06	298.764.400,00	23,63	851.504.732,00	25,59	665.475.445,62	27,56	352.408.782,10	29,55	804.301.115,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					64.148.000,00		65.751.700,00		67.395.493,00		69.080.380,00		70.807.389,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					64.148.000,00		65.751.700,00		67.395.493,00		69.080.380,00		70.807.389,00	
Tercapainya kalaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,66	2,66	2,70	64.148.000,00	3,0	65.751.700,00	3,3	67.395.493,00	3,4	69.080.380,00	3,5	70.807.389,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					249.999.712,00		256.249.705,00		262.655.947,00		269.222.346,00		275.952.905,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					249.999.712,00		256.249.705,00		262.655.947,00		269.222.346,00		275.952.905,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	255	255	265	249.999.712,00	275	256.249.705,00	285	262.655.947,00	295	269.222.346,00	295	275.952.905,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.136.191.460,00		580.000.000,00		586.191.379,00		592.926.114,00		600.160.860,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					946.111.660,00		300.000.000,00		303.202.438,00		306.685.921,00		310.428.031,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	946.111.660,00	100	300.000.000,00	100	303.202.438,00	100	306.685.921,00	100	310.428.031,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					179.995.800,00		200.000.000,00		202.134.958,00		204.457.281,00		206.952.021,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	72,97	75,68	78,38	179.995.800,00	81,08	200.000.000,00	83,78	202.134.958,00	86,49	204.457.281,00	89,19	206.952.021,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					10.084.000,00		80.000.000,00		80.853.983,00		81.782.912,00		82.780.808,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan	7,14	21,43	35,71	10.084.000,00	50,00	80.000.000,00	64,29	80.853.983,00	78,57	81.782.912,00	85,71	82.780.808,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)													
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.455.109.675,00		5.648.796.742,00		5.752.777.051,00		5.868.391.399,00		5.991.085.762,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.634.309.675,00		4.819.788.742,00		4.920.486.551,00		5.022.770.414,00		5.145.497.602,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	4.634.309.675,00	100	4.819.788.742,00	100	4.920.486.551,00	100	5.022.770.414,00	100	5.145.497.602,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					680.800.000,00		687.608.000,00		689.476.500,00		701.378.845,00		701.360.160,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat masyarakat (Nilai)	79,01	79,01	80,01	680.800.000,00	81,01	687.608.000,00	82,01	689.476.500,00	83,01	701.378.845,00	84,01	701.360.160,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					140.000.000,00		141.400.000,00		142.814.000,00		144.242.140,00		144.228.000,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	100	140.000.000,00	100	141.400.000,00	100	142.814.000,00	100	144.242.140,00	100	144.228.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					895.000.000,00		903.950.000,00		917.383.000,00		926.556.830,00		922.029.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					535.000.000,00		540.350.000,00		546.511.000,00		551.976.110,00		551.157.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	40	60	65	535.000.000,00	70	540.350.000,00	75	546.511.000,00	80	551.976.110,00	85	551.157.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					160.000.000,00		161.600.000,00		164.832.000,00		166.480.320,00		164.832.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	40	60	65	160.000.000,00	70	161.600.000,00	75	164.832.000,00	80	166.480.320,00	85	164.832.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					200.000.000,00		202.000.000,00		206.040.000,00		208.100.400,00		206.040.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	40	60	65	200.000.000,00	70	202.000.000,00	75	206.040.000,00	80	208.100.400,00	85	206.040.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.598.440.531,17		3.640.000.000,00		3.678.856.252,00		3.721.122.519,00		3.766.526.787,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.127.673.216,17		3.169.232.685,00		3.208.088.937,00		3.250.355.204,00		3.295.759.472,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	3.127.673.216,17	100	3.169.232.685,00	100	3.208.088.937,00	100	3.250.355.204,00	100	3.295.759.472,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					308.047.315,00		308.047.315,00		308.047.315,00		308.047.315,00		308.047.315,00	
Meningkat produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.339,6	4.556,6	4.907,4	308.047.315,00	5.275,5	308.047.315,00	5.671,1	308.047.315,00	6.096,5	308.047.315,00	6.553,7	308.047.315,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					162.720.000,00		162.720.000,00		162.720.000,00		162.720.000,00		162.720.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	48,8	50,2	51,7	162.720.000,00	53,2	162.720.000,00	54,8	162.720.000,00	56,4	162.720.000,00	58,1	162.720.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.535.343.833,00		4.736.597.692,00		4.819.294.076,00		4.903.036.540,00		4.989.897.763,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.176.870.432,00		3.236.597.692,00		3.303.281.885,00		3.369.606.932,00		3.437.757.605,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	3.176.870.432,00	100	3.236.597.692,00	100	3.303.281.885,00	100	3.369.606.932,00	100	3.437.757.605,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					271.694.680,00		300.000.000,00		303.202.438,00		306.685.921,00		310.428.031,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (%)	20	20	30	271.694.680,00	30	300.000.000,00	40	303.202.438,00	40	306.685.921,00	50	310.428.031,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan	7,21	7,30	7,46		7,63		7,81		8,00		8,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Wisatawan (Persentase)													
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					633.954.254,00		700.000.000,00		707.472.356,00		715.600.484,00		724.332.074,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	80	80	82	633.954.254,00	85	700.000.000,00	87	707.472.356,00	90	715.600.484,00	93	724.332.074,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaannya Intelektualnya (Produk)	1	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					352.824.467,00		400.000.000,00		405.337.397,00		411.143.203,00		417.380.053,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	75	75	77	352.824.467,00	80	400.000.000,00	82	405.337.397,00	85	411.143.203,00	86	417.380.053,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					11.895.572.449,00		12.562.874.414,00		13.232.676.120,00		13.937.270.123,00		14.576.665.970,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.385.205.962,00		10.962.315.586,00		11.568.353.173,00		12.204.739.453,00		12.872.965.014,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	10.385.205.962,00	100	10.962.315.586,00	100	11.568.353.173,00	100	12.204.739.453,00	100	12.872.965.014,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					803.389.360,00		885.558.828,00		929.836.769,00		976.328.607,67		1.025.145.037,84	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	5,7	5,8	5,9	803.389.360,00	6,0	885.558.828,00	6,1	929.836.769,00	6,2	976.328.607,67	6,3	1.025.145.037,84	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	45	50	55		60		65		70		75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	1.900	2.000	2.100		2.200		2.300		2.400		2.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					160.000.000,00		126.000.000,00		132.300.000,00		138.915.000,00		145.860.750,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	891	891	891	160.000.000,00	891	126.000.000,00	891	132.300.000,00	891	138.915.000,00	891	145.860.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.938,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	2.500	2.625	2.756	150.000.000,00	2.894	157.500.000,00	3.039	165.375.000,00	3.191	173.643.750,00	3.191	182.325.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	40	50	60		70		75		80		85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		51.114.320,33		51.738.005,16	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	70	75	80	50.000.000,00	85	50.000.000,00	90	50.000.000,00	100	51.114.320,33	100	51.738.005,16	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim	70	75	80		85		90		95		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terhadap Pertanian (Persentase)													
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	60	65	70	30.000.000,00	75	31.500.000,00	80	33.075.000,00	85	34.728.750,00	90	36.465.188,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					316.977.127,00		350.000.000,00		353.736.178,00		357.800.242,00		262.166.037,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	70	75	80	316.977.127,00	85	350.000.000,00	90	353.736.178,00	95	357.800.242,00	100	262.166.037,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	50	55	65		70		75		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					6.517.045.791,48		6.621.935.391,00		6.729.447.230,00		6.839.646.866,00		6.952.601.492,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.981.422.611,48		6.086.312.211,00		6.193.824.050,00		6.304.023.686,00		6.416.978.312,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	5.981.422.611,48	100	6.086.312.211,00	100	6.193.824.050,00	100	6.304.023.686,00	100	6.416.978.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					10.469.600,00		10.469.600,00		10.469.600,00		10.469.600,00		10.469.600,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.469.600,00	100	10.469.600,00	100	10.469.600,00	100	10.469.600,00	100	10.469.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					133.235.840,00		133.235.840,00		133.235.840,00		133.235.840,00		133.235.840,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	22,22	22,22	44,44	133.235.840,00	66,67	133.235.840,00	77,78	133.235.840,00	88,89	133.235.840,00	100	133.235.840,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					49.950.640,00		49.950.640,00		49.950.640,00		49.950.640,00		49.950.640,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	70	70	72	49.950.640,00	74	49.950.640,00	76	49.950.640,00	78	49.950.640,00	80	49.950.640,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					39.993.000,00		39.993.000,00		39.993.000,00		39.993.000,00		39.993.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	1	1	1	39.993.000,00	1	39.993.000,00	2	39.993.000,00	3	39.993.000,00	3	39.993.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					29.724.900,00		29.724.900,00		29.724.900,00		29.724.900,00		29.724.900,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	29.724.900,00	100	29.724.900,00	100	29.724.900,00	100	29.724.900,00	100	29.724.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					272.249.200,00		272.249.200,00		272.249.200,00		272.249.200,00		272.249.200,00	
Meningkatnya program dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	272.249.200,00	100	272.249.200,00	100	272.249.200,00	100	272.249.200,00	100	272.249.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					199.381.960,00		199.381.960,00		199.381.960,00		199.381.960,00		199.381.960,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					143.182.440,00		143.182.440,00		143.182.440,00		143.182.440,00		143.182.440,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	100	100	100	143.182.440,00	100	143.182.440,00	100	143.182.440,00	100	143.182.440,00	100	143.182.440,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					51.199.520,00		51.199.520,00		51.199.520,00		51.199.520,00		51.199.520,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	10	10	12,50	51.199.520,00	25	51.199.520,00	37,50	51.199.520,00	50	51.199.520,00	62,50	51.199.520,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					43.921.365.924,76	44.255.739.691,00	44.597.563.456,00	44.883.018.826,00	45.509.001.734,00					
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.155.305.668,76	36.739.359.691,00	36.930.855.856,00	37.062.977.074,00	37.532.559.146,96					
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	35.577.554.940,76	100	36.183.459.691,00	100	36.363.837.856,00	100	36.484.618.714,00	100	36.942.633.619,76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	20	20	25	577.750.728,00	30	555.900.000,00	35	567.018.000,00	40	578.358.360,00	45	589.925.527,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.975.508.936,00	5.231.121.612,00	5.335.744.044,24	5.442.458.925,12	5.551.308.103,63					
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	659.331.200,00	100	1.142.400.000,00	100	1.165.248.000,00	100	1.188.552.960,00	100	1.212.324.019,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	750.007.016,00	100	663.000.000,00	100	676.260.000,00	100	689.785.200,00	100	703.580.904,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	4.566.170.720,00	100	3.425.721.612,00	100	3.494.236.044,24	100	3.564.120.765,12	100	3.635.403.180,43	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.790.551.320,00	2.285.258.388,00	2.330.963.555,76	2.377.582.826,88	2.425.134.483,41					
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	325.343.360,00	100	612.000.000,00	100	624.240.000,00	100	636.724.800,00	100	649.459.296,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan	100	100	100	795.067.360,00	100	1.050.600.000,00	100	1.071.612.000,00	100	1.093.044.240,00	100	1.114.905.124,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan (Persentase)													
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	9	9	9	670.140.600,00	9	622.658.388,00	9	635.111.555,76	9	647.813.786,88	9	660.770.062,61	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					60.980.765.903,09		64.000.000.000,00		64.683.186.862,00		65.426.330.016,00		66.224.646.809,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.000.000.000,00		32.000.000.000,00		32.341.593.431,00		32.713.165.008,00		33.112.323.405,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	32.000.000.000,00	100	32.000.000.000,00	100	32.341.593.431,00	100	32.713.165.008,00	100	33.112.323.405,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					28.980.765.903,09		32.000.000.000,00		32.341.593.431,00		32.713.165.008,00		33.112.323.404,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD (%)	100	100	100	28.824.578.403,09	100	31.843.812.500,00	100	32.185.405.931,00	100	32.556.977.508,00	100	32.956.135.904,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	100	100	100	156.187.500,00	100	156.187.500,00	100	156.187.500,00	100	156.187.500,00	100	156.187.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.825.929.308,00		8.924.291.499,00		9.094.243.449,00		9.268.299.449,00		9.448.847.449,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.691.622.800,00		6.743.912.649,00		6.865.528.049,00		6.989.921.549,00		7.117.411.849,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.691.622.800,00	100	6.743.912.649,00	100	6.865.528.049,00	100	6.989.921.549,00	100	7.117.411.849,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					958.733.028,00		975.416.300,00		993.629.200,00		1.012.414.750,00		1.033.823.850,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	958.733.028,00	100	975.416.300,00	100	993.629.200,00	100	1.012.414.750,00	100	1.033.823.850,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.175.573.480,00		1.204.962.550,00		1.235.086.200,00		1.265.963.150,00		1.297.611.750,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	587.412.840,00	100	602.098.050,00	100	617.150.350,00	100	632.579.050,00	100	648.393.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	227.969.040,00	100	233.668.200,00	100	239.509.800,00	100	245.497.450,00	100	251.634.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	360.191.600,00	100	369.196.300,00	100	378.426.050,00	100	387.886.650,00	100	397.583.650,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					40.362.447.198,82		44.508.458.329,00		44.951.974.425,00		45.387.770.822,00		45.840.980.624,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.680.041.982,82		25.205.099.913,00		25.648.616.009,00		26.084.412.406,00		26.537.622.208,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	11.540.691.180,82	100	15.540.869.113,00	100	15.862.692.550,00	100	16.166.116.572,00	100	16.477.126.195,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	95,34	100	100	10.139.350.802,00	100	9.664.230.800,00	100	9.785.923.459,00	100	9.918.295.834,00	100	10.060.496.013,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					16.280.590.936,00		16.254.070.936,00		16.254.070.936,00		16.254.070.936,00		16.254.070.936,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30	13.058.168.832,00	30	13.031.648.832,00	30	13.031.648.832,00	30	13.031.648.832,00	30	13.031.648.832,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	10	10	10	1.169.840.064,00	10	1.169.840.064,00	10	1.169.840.064,00	10	1.169.840.064,00	10	1.169.840.064,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	2.052.582.040,00	100	2.052.582.040,00	100	2.052.582.040,00	100	2.052.582.040,00	100	2.052.582.040,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.329.868.280,00		1.329.868.280,00		1.329.868.280,00		1.329.868.280,00		1.329.868.280,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10,5	10,6	10,7	1.329.868.280,00	10,8	1.329.868.280,00	10,9	1.329.868.280,00	11	1.329.868.280,00	11,5	1.329.868.280,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.071.946.000,00		1.719.419.200,00		1.719.419.200,00		1.719.419.200,00		1.719.419.200,00	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan pajak daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	313.600.000,00	100	351.080.000,00	100	351.080.000,00	100	351.080.000,00	100	351.080.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah (%)	62	75	80	444.540.000,00	85	766.539.200,00	90	766.539.200,00	95	766.539.200,00	100	766.539.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem informasi perpajakan berbasis digital	Persentase Peningkatan Target Retribusi Daerah (%)	0	75	80	259.806.000,00	85	551.800.000,00	90	551.800.000,00	95	551.800.000,00	100	551.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan retribusi daerah	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah (%)	100	100	100	54.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.529.685.377,68		8.895.100.949,00		9.114.298.787,00		9.313.399.519,00		9.502.723.868,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.853.114.581,68		8.286.645.957,00		8.492.318.256,00		8.675.873.001,00		8.858.822.085,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	7.853.114.581,68	100	8.286.645.957,00	100	8.492.318.256,00	100	8.675.873.001,00	100	8.858.822.085,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					676.570.796,00		608.454.992,00		621.980.531,00		637.526.518,00		643.901.783,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	304.121.956,00	100	267.009.164,00	100	275.019.439,00	100	280.950.695,00	100	283.760.202,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	50,59	52	55	93.341.200,00	58	78.623.953,00	63	79.410.193,00	66	81.792.499,00	70	82.610.423,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	85	85	86	192.180.200,00	87	184.197.922,00	88	187.354.467,00	89	192.975.101,00	90	194.904.852,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	85	85,14	88	86.927.440,00	90	78.623.953,00	95	80.196.432,00	96	81.808.223,00	97	82.626.306,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.577.894.960,00		3.616.997.573,00		3.628.223.168,00		3.629.505.401,00		3.630.800.454,00	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan BLUD	Persentase pemenuhan layanan BLUD (%)	100	100	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					77.894.960,00		116.997.573,00		128.223.168,00		129.505.401,00		130.800.454,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	89	89,49	95	0,00	96	34.553.618,00	98	34.899.154,00	98,5	35.248.145,00	99	35.600.627,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	72	72,74	75	42.838.800,00	80	63.504.138,00	80	64.139.179,00	80	64.780.571,00	80	65.428.377,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi														
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	3,6	3,70	3,78	35.056.160,00	3,81	18.939.817,00	3,85	29.184.835,00	3,89	29.476.685,00	3,93	29.771.450,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.054.813.538,00		3.080.868.900,00		3.120.508.449,00		3.229.876.421,00		3.355.213.129,00	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.394.813.538,00		2.505.868.900,00		2.470.508.449,00		2.609.876.421,00		2.740.213.129,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	0	0	100	2.394.813.538,00	100	2.505.868.900,00	100	2.470.508.449,00	100	2.609.876.421,00	100	2.740.213.129,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					440.000.000,00		365.000.000,00		470.000.000,00		410.000.000,00		435.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbitan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	60,00	66,67	73,33	95.000.000,00	80,00	70.000.000,00	86,67	105.000.000,00	93,33	70.000.000,00	100,00	105.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	50,00	50,00	60,00	105.000.000,00	70,00	105.000.000,00	80,00	105.000.000,00	90,00	105.000.000,00	100,00	105.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	50,00	50,00	60,00	70.000.000,00	70,00	70.000.000,00	80,00	140.000.000,00	90,00	140.000.000,00	100,00	105.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	100,00	100,00	100,00	170.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	95.000.000,00	100,00	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					220.000.000,00	210.000.000,00	180.000.000,00	210.000.000,00	180.000.000,00					
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	52,00	60,00	68,00	75.000.000,00	76,00	75.000.000,00	84,00	75.000.000,00	92,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	50,00	55,55	60,00	50.000.000,00	73,33	35.000.000,00	80,00	35.000.000,00	82,50	35.000.000,00	95,00	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan	60,00	75,00	80,00	35.000.000,00	83,33	35.000.000,00	85,71	35.000.000,00	87,50	35.000.000,00	95,00	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Persentase)													
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100,00	100,00	100,00	60.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.693.687.201,95		10.031.711.104,00		10.183.634.458,00		10.424.175.550,00		10.688.533.994,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.311.776.853,00		7.517.098.624,00		7.673.337.439,00		7.878.878.531,00		8.128.736.975,00	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	7.311.776.853,00	100	7.517.098.624,00	100	7.673.337.439,00	100	7.878.878.531,00	100	8.128.736.975,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.402.520.000,00		1.590.127.000,00		1.603.127.000,00		1.603.127.000,00		1.603.127.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	80,15	81,31	81,50	1.402.520.000,00	81,75	1.590.127.000,00	82,00	1.603.127.000,00	82,35	1.603.127.000,00	82,50	1.603.127.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					979.390.348,95		924.485.480,00		907.170.019,00		942.170.019,00		956.670.019,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	979.390.348,95	Terintegrasi (Integrated)	924.485.480,00	Terintegrasi (Integrated)	907.170.019,00	Terintegrasi (Integrated)	942.170.019,00	Terintegrasi (Integrated)	956.670.019,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase perangkat daerah dengan maturity minimal level 3 (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Tingkat Penyelesaian PKPT tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					80.531.045.487,55		82.044.257.812,00		83.205.818.543,00		84.372.269.927,00		86.059.400.892,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					52.301.258.869,55		53.640.901.876,00		54.492.758.571,00		55.445.943.788,00		56.685.196.828,50	
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	7.140.716.579,00	100	7.139.708.676,00	100	7.139.708.676,00	100	7.139.708.676,00	100	7.139.708.676,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	5.927.701.023,00	100	6.001.067.869,00	100	6.108.413.052,00	100	6.217.928.138,00	100	6.340.520.630,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.246.222.455,00	100	6.348.567.759,00	100	6.456.879.299,00	100	6.584.846.164,00	100	6.819.859.259,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.823.708.341,00	100	6.891.611.428,00	100	6.976.993.543,00	100	7.058.927.491,00	100	7.154.608.420,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.488.517.332,00	100	6.591.017.332,00	100	6.791.017.332,00	100	6.991.017.332,00	100	7.291.017.332,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.509.566.101,55	100	6.879.630.780,00	100	7.046.817.303,00	100	7.286.436.451,00	100	7.468.508.436,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	6.070.809.006,00	100	6.532.400.000,00	100	6.644.058.353,00	100	6.765.515.812,00	100	6.895.990.713,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas layanan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	7.094.018.032,00	100	7.256.898.032,00	100	7.328.871.013,00	100	7.401.563.724,00	100	7.574.983.362,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.550.050.274,00		3.654.500.000,00		3.660.949.876,00		3.672.462.293,00		3.684.537.417,50	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	550.050.274,00	100	600.000.000,00	100	606.404.876,00	100	613.371.843,00	100	620.856.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	90	90	90	400.000.000,00	90	400.000.000,00	90	400.000.000,00	90	400.000.000,00	90	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	450.000.000,00	100	454.500.000,00	100	454.545.000,00	100	459.090.450,00	100	463.681.354,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	90	95	95	350.000.000,00	95	350.000.000,00	95	350.000.000,00	95	350.000.000,00	95	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	90	90	90	450.000.000,00	90	450.000.000,00	90	450.000.000,00	90	450.000.000,00	90	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					24.083.336.344,00	24.121.655.936,00	24.417.710.096,00	24.612.263.846,00	25.010.866.646,00					
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	90	90	90	3.500.330.000,00	90	3.500.000.000,00	90	3.637.361.781,00	90	3.778.002.422,00	90	4.121.660.372,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	100	100	100	2.499.200.000,00	100	2.499.200.000,00	100	2.499.200.000,00	100	2.499.200.000,00	100	2.499.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	100	100	100	2.491.050.424,00	100	2.517.020.120,00	100	2.627.800.000,00	100	2.630.800.000,00	100	2.643.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	100	100	100	3.067.402.000,00	100	3.092.110.016,00	100	3.104.837.115,00	100	3.117.565.474,00	100	3.117.565.474,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	100	100	100	2.982.700.000,00	100	2.931.200.000,00	100	2.932.200.000,00	100	2.933.200.000,00	100	2.935.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	100	100	100	3.171.072.000,00	100	3.270.525.800,00	100	3.304.711.200,00	100	3.341.895.950,00	100	3.381.840.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	80	85	85	3.447.389.920,00	85	3.450.000.000,00	85	3.450.000.000,00	85	3.450.000.000,00	85	3.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	85	85	85	2.924.192.000,00	85	2.861.600.000,00	85	2.861.600.000,00	85	2.861.600.000,00	85	2.861.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					596.400.000,00	627.200.000,00	634.400.000,00	641.600.000,00	678.800.000,00					
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	80	85	85	54.000.000,00	85	57.600.000,00	85	57.600.000,00	85	57.600.000,00	85	57.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di	100	100	100	72.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	wilayah kecamatan (%)													
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	78.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	90.000.000,00	100	97.200.000,00	100	104.400.000,00	100	111.600.000,00	100	118.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	85	85	85	62.400.000,00	85	62.400.000,00	85	62.400.000,00	85	62.400.000,00	85	62.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kaamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.117.517.762,00		5.149.000.000,00		5.264.548.201,00		5.323.883.537,00		5.487.623.743,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.513.716.755,00		2.453.581.315,00		2.549.040.401,00		2.586.375.737,00		2.698.473.447,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	2.513.716.755,00	100	2.453.581.315,00	100	2.549.040.401,00	100	2.586.375.737,00	100	2.698.473.447,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.667.707.955,00		1.685.507.800,00		1.700.507.800,00		1.700.507.800,00		1.712.507.800,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	100	100	100	1.667.707.955,00	100	1.685.507.800,00	100	1.700.507.800,00	100	1.700.507.800,00	100	1.712.507.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kebangsaan (Persentase)													
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					695.301.000,00		829.775.133,00		831.000.000,00		841.000.000,00		875.000.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	695.301.000,00	100	829.775.133,00	100	831.000.000,00	100	841.000.000,00	100	875.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					39.476.100,00		39.469.800,00		40.000.000,00		40.000.000,00		41.642.496,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	39.476.100,00	100	39.469.800,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	41.642.496,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					91.649.872,00		29.999.872,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	91.649.872,00	100	29.999.872,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					109.666.080,00		110.666.080,00		114.000.000,00		116.000.000,00		120.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	109.666.080,00	100	110.666.080,00	100	114.000.000,00	100	116.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					982465143121.00		1038284922615.00		1059030611887.00		1080191224125.00		1101775048608.00	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2025

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur utama untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029. Penetapan IKU mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah, serta hasil evaluasi RPJMD sebelumnya. IKU berperan penting dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, RKPD tahunan, dan menjadi dasar monitoring serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan IKU yang jelas dan terukur, Pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat memantau kemajuan pembangunan secara efektif, melakukan perbaikan kebijakan bila diperlukan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian pembangunan jangka menengah daerah.

Lebih lanjut, IKU Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,43	71,56	72,69	73,82	74,95	
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	79,57	80,20	80,84	81,47	82,19	
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,45	79,49	79,52	79,56	79,60	
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-5,5*)	5,18-6,00	5,51-6,32	5,83-6,65	6,16-6,98	
5.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,315-0,345*)	0,311-0,315	0,308-0,311	0,306-0,308	0,304-0,306	
6.	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	45.100.000	45.551.000	46.006.510	46.466.575	46.931.241	
7.	Tingkat Kemiskinan	(%)	9,7-10,2*)	9,28 - 9,98	8,95 - 9,65	8,61 - 9,31	8,26 - 8,96	
8.	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	1,67	1,84	2,02	2,22	2,44	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
9.	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,53	7,61	7,74	7,78	7,95	
10.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	
11.	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	Indeks	66,84	68,71	70,58	72,45	74,55	
12.	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	640	645	650	655	660	
13.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	67,18	67,72	68,26	68,80	69,34	
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,25-5,20*)	4,39-4,99	3,98-4,58	3,58-4,18	3,17-3,77	
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	71,87	71,90	71,94	71,97	72,01	
16.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
17.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,11	75,21	75,30	75,38	75,45	
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,22	10,35	10,43	10,51	10,65	
19.	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	30,2	31,3	32,1	33,5	34,5	
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,83	86,45	88,07	89,69	91,31	
21.	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	
22.	Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	13,36	13,57	13,76	13,85	14,10	
23.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	
24.	Nilai SAKIP	Nilai	76,62	77,48	78,34	79,22	80,10	
25.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	60	62	64	65	65	
26.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,01	14,17	14,29	14,38	14,53	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
27.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,34	96,39	96,43	96,66	96,85	
28.	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	2,9	3,0	3,1	3,3	3,5	
29.	Nilai Penerapan Sistem Merit	Angka	285,62	288,47	291,36	294,27	297,21	
30.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,11	3,15	3,18	3,22	3,25	
31.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	75,30	76,15	77,08	78,12	79,13	
32.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,282	0,277	0,271	0,265	0,260	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2025

**) Hasil Kesepakatan Pramusrenbang Provinsi Sumatera Selatan*

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh dalam periode RPJMD. IKD mencerminkan capaian kinerja dari pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah, serta menjadi dasar dalam menilai kinerja pemerintah daerah secara akuntabel dan terukur. Lebih lanjut, IKD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	71,83	71,83	71,87	71,90	71,94	71,97	72,01	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	66,10	66,64	67,18	67,72	68,26	68,80	69,34	
3	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	965,71	1.200	1.294	1.395	1.505	1.623	1.750	
4	Kapasitas Air Baku	(%)	1,6	2,6	2,94	3,33	3,76	4,25	4,81	
5	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	673,18	677,27	685,23	693,03	700,60	708,00	715,15	
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	32,01	32,25	32,5	33,00	33,50	34,00	34,50	
7	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	6,9	6,73	6,56	6,40	6,24	6,08	5,93	
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,26	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	74	74	74,30	74,60	74,90	75,20	75,50	
10	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	75	75	75,49	75,99	76,49	76,99	77,50	
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	120,36	118,72	117,11	115,51	113,94	112,39	110,86	
12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	10,03	10,13	10,23	10,33	10,44	10,54	10,65	
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	90,00	90,81	91,02	91,23	91,44	91,65	91,86	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	7,14	21,43	35,71	50,00	64,29	78,57	85,71	
15	Persentase Partisipasi Pemilih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan)	%	100	0	0	0	0	100	100	
16	Rasio Penduduk	%	101,75	101,34	101,27	101,18	101,08	101,98	101,87	
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,09	0,62	1,17	1,14	1,09	1,06	1,01	
18	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	21.000	21.780,11	24.718,70	27.979,14	31.719,30	35.865,96	40.416,17	
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	85	87	97,15	97,30	97,45	97,60	97,75	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,98	79,28	79,45	79,49	79,52	79,56	79,60	
2	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,353	0,315-0,345*)	0,311-0,315	0,308-0,311	0,306-0,308	0,304-0,306	0,315-0,345*)	
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,62	5,0-5,5*)	5,18-6,00	5,51-6,32	5,83-6,65	6,16-6,98	5,0-5,5*)	
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	11,14	9,7-10,2*)	9,28 - 9,98	8,95 - 9,65	8,61 - 9,31	8,26 - 8,96	9,7-10,2*)	
5	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	35.431.821	40.370.000	45.100.000	45.551.000	46.006.510	46.466.575	46.931.241	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,29	4,25-5,20*)	4,39-4,99	3,98-4,58	3,58-4,18	3,17-3,77	4,25-5,20*)	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,97	74,99	75,11	75,21	75,30	75,38	75,45	
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,94	10,01	10,22	10,35	10,43	10,51	10,65	
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,21	96,29	96,34	96,39	96,43	96,66	96,85	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,69	13,82	14,01	14,17	14,29	14,38	14,53	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,294	0,288	0,282	0,277	0,271	0,265	0,260	
12	Nilai Transaksi saham per kapita per kabupaten/kota (dalam miliar rupiah)	Angka	1.273,09	1.273,09	1.418,61	1.580,77	1.761,46	1.962,80	2.187,16	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	27,92	27,92	30,74	33,85	37,27	41,03	45,18	
14	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	75,80	76,56	77,32	78,10	78,88	79,67	80,46	
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	91,64	92,19	92,52	92,85	93,19	93,52	93,86	
16	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,1	1,2	1,3	1,8	1,9	2,0	3,5	
17	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	51,67	51,67	51,71	51,74	51,78	51,81	51,85	
18	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0	0	0	0	0	0	0	
19	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	29,22	29,22	30,91	32,69	34,58	36,57	38,69	
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	8,88	8,88	8,94	9,00	9,06	9,12	9,18	
21	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98	98	98,08	98,15	98,23	98,30	98,38	
22	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,62	63,72	63,81	63,91	64,01	64,11	64,21	
23	Zero Konflik Antar Umat Beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Total Kredit/PDRB	(%)	35,04	35,04	35,98	36,95	37,94	38,95	40,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
25	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	20,9	19,80	18,76	17,78	16,84	15,96	15,12	
26	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	52,17	53,23	54,45	55,68	56,51	56,12	57,12	
27	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,46	0,49	0,51	0,54	0,57	0,61	0,64	
28	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	90	91	91,45	91,89	92,34	92,80	93,25	
29	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	62,7	66,5	67,6	68,7	69,8	71,00	72,20	
30	Indeks Entropy Theil	Angka	1,32	1,32	1,28	1,24	1,20	1,16	1,12	
31	Jumlah Kematian Ibu	Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0	
32	Penyelesaian Konflik Anar Umat Beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	
33	Angka Melek Huruf	Angka	98,81	99,21	99,35	99,4	99,55	99,62	99,71	
34	Angka Kesakitan	Angka	11,66	12,02	12,39	12,78	13,17	13,58	14,00	
35	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.37:0.37	0.43:0.43	0.50:0.50	0.58:0.58	0.65:0.65	0.67:0.67	0.78:0.78	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	78,51	79,08	79,57	80,20	80,84	81,47	82,19	
2	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	Indeks	63,70	65,42	66,84	68,71	70,58	72,45	74,55	
3	Nilai Net Ekspor	Angka	-1.657,44	-1.468,48	-1.301,05	-1.152,72	-1.021,29	-904,85	-801,69	
4	Produktivitas Padi	Ton/Ha	52,26	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0	
5	Persentase Pekerja Formal	%	52	52,79	53,44	54,10	54,77	55,45	56,13	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	0,930	0,930	0,930	0,931	0,931	0,932	0,932	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,95	58,00	60,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
8	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	41,15	0	0	0	0	0	0	
9	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	74,71	75,08	75,46	75,84	76,21	76,60	76,98	
11	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	0,8	0,8	0,86	0,91	0,98	1,05	1,12	
12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,18	5,29	5,41	5,52	5,64	5,77	5,89	
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,24	73,33	74,26	77,97	77,16	78,69	79,99	
14	Tingkat Inflasi	(%)	1,02	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,741	0,741	0,780	0,820	0,863	0,908	0,955	
16	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	7,14	21,43	35,71	50,00	64,29	78,57	85,71	
17	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7,16	7,28	7,33	7,38	7,43	7,48	7,53	
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	40,57	40,67	40,77	40,86	40,96	41,06	41,16	
19	Angka Ketergantungan	%	46,62	46,29	45,96	45,63	45,30	44,97	44,64	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	2,64	2,85	2,9	3,0	3,1	3,3	3,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase perda yang disahkan oleh DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Peduli HAM	Nilai	91,25	92,16	93,08	94,01	94,96	95,90	96,86	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	70	71,44	72,91	74,41	75,94	77,50	
5	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	Angka	118	116	114	113	111	109	108	
6	Indeks Masyarakat Digital	Angka	42,03	44,52	47,15	49,94	52,89	56,02	59,33	
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,82	3,85	3,88	3,91	3,94	3,97	4,00	
8	Survey penilaian integritas	Angka	73,00	73,09	73,68	74,28	74,89	75,50	76,11	
9	Angka Kriminalitas	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
10	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Capaian Aksi HAM	%	70	70	70,97	71,96	72,96	73,97	75,00	
12	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,44	4,57	4,59	4,61	4,64	4,66	4,68	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	55	60	65	70	75	80	85	
2	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	72,41	75,45	78,49	81,53	84,5	87,46	90,43	
3	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,51	98,75	98,99	99,23	99,46	99,7	99,94	
6	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	12,8	13,56	14,33	15,09	15,85	16,62	17,38	
7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	70,75	75,94	88,49	100	100	100	100	
8	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	55,17	63,46	64,21	64,96	65,71	66,46	67,21	
9	Iklm Inklusivitas SD	Nilai	59,6	62,1	64,6	67,1	69,6	72,1	74,6	
10	Iklm Inklusivitas SMP	Nilai	56,2	58,6	61	63,4	65,8	68,2	70,6	
11	Iklm Keamanan SD	Nilai	74,65	75,55	76,45	77,35	78,25	79,15	80,05	
12	Iklm Keamanan SMP	Nilai	68,22	69,72	71,22	72,72	74,22	75,72	77,22	
13	Iklm Kebhinekaan SD	Nilai	70,7	71,7	72,7	73,7	74,7	75,7	76,7	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	31	45	60	65	70	75	77	
2	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	90	90	100	100	100	100	100	
3	Persentase Posyandu Bidang Kesehatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0,22	1,45	1,4	1,3	1,2	1,1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	50	50	100	100	100	100	100	
6	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	39	37	35	31	27	23	21	
7	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	63	65	70	75	80	85	90	
8	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	-	95	96	96	98	99	100	
9	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	5	11	10	9	8	7	6	
10	Penemuan Kasus TBC	%	105	90	92	93	94	95	96	
11	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	20	25	30	40	50	60	70	
12	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	-	83	86	89	92	95	96	
13	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (SPA dan SDM)	%	16,67	20	25	33,33	41,67	50	58	
14	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	83,06	81	82	83	84	85	86	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	56,64	59,39	59,97	62,81	65,56	68,24	72,96	
2	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	90	90,81	91,02	91,23	91,44	91,65	91,86	
4	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	89,65	91,65	93,45	95,09	96,73	98,36	100	
5	Persentase Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik	%	42,01	42,82	43,81	44,80	45,88	46,99	48,19	
6	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	32,01	32,25	32,50	33,00	33,50	34,00	34,50	
7	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	63,42	63,42	63,42	64,92	66,42	67,92	69,42	
9	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR	%	95	95	95	95	95	95	95	
10	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	%	20,05	25,23	31,29	40,09	49,77	60,42	72,13	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	5,80	11,70	17,60	17,60	23,50	23,50	
2	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	38,22	40	50	60	70	80	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	7,3	14	16,30	18,50	20,70	23	23	
4	Tersedianya Dokumen dan Database Perumahan dan Permukiman	Dokumen	2	1	1	1	1	1	1	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	88,24	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	98	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	2,88	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
4	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	0	20	25	50	65	75	
6	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penyelesaian tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	95	100	100	100	100	100	100	
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	75	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	75	75	80	85	90	95	100	
5	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	75	75	80	85	90	95	100	
6	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	30,30	34,60	35,50	36,00	37,40	37,90	38,40	
3	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	%	30,30	30,70	31,00	31,60	32,10	32,80	33,20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	45,70	45,90	46,30	46,90	47,50	48,00	48,50	
5	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100	100	100	100	100	100	100	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	89	90	91	92	93	94	95	
2	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	60	65	70	75	80	85	90	
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	54	55	56	57	58	59	60	
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	64	65	66	67	68	69	70	
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	64	65	66	67	68	69	70	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92,3	94	95	96	97	98	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	11	13	15	17	19	21	23	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	0	0	80	80	80	80	80	
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	0	50	50	50	50	50	50	
3	Persentase Pengurangan Sampah	%	0,28	0,25	1	1,5	2	2,5	3	
4	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	33	33	50	50	50	50	50	
6	Persentase rencana pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terlaksana	%	0	0	30	40	50	60	70	
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	0	0	15	20	25	30	35	
9	Persentase RTH	Persentase	21,05	21,05	21	22	23	24	25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
10	Persentase Penanganan Sampah	%	87,67	87,87	88	88,5	89	89,5	90	
AL	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AM	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	63,90	64	64,49	70	70,40	70,99	72	
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,17	2,16	2,16	2,15	2,14	2,14	2,14	
3	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	24,50	25	25,50	26	27	27,50	28	
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	17,1	17	17	16,9	19,9	16,8	16,8	
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	66,9	67,1	67,6	68,1	68,6	69,2	70,2	
6	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	16,23	10,50	9,80	9,30	9,00	8,40	7,00	
7	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	89,3	89,4	89,5	89,6	89,8	89,9	90,01	
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	67,9	71,5	75,2	79,2	83,3	87,7	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	84	84,6	85,6	86,6	87,6	88,7	89,9	
10	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	79,16	81,9	82,5	83,8	84,5	85,1	85,3	
11	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	13	13,2	12,7	12,2	11,7	11,3	10,9	
AN	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Konektivitas Darat	Persentase	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat pemanfaatan fasilitas udara untuk aktivitas transportasi dan logistik daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	
AO	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	67	67	72	77	82	83	83	
2	nilai aspek teknologi digital pada evaluasi pemerintahan digital	Nilai	3	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
AP	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	1,642	1,840	1,987	2,185	2,404	2,645	2,909	
3	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	0	10	15	20	25	30	35	
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AQ	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	4,64	4,64	4,74	4,80	4,90	5,0	5,0	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	19,03	19,03	21,06	23,63	25,59	27,56	29,55	
3	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	3,21	3,21	3,21	4,17	4,81	5,77	6,41	
AR	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,66	2,66	2,70	3,0	3,3	3,4	3,5	
AS	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	255	255	265	275	285	295	295	
AT	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	7,14	21,43	35,71	50,00	64,29	78,57	85,71	
2	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	72,97	75,68	78,38	81,08	83,78	86,49	89,19	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AU	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	79,01	79,01	80,01	81,01	82,01	83,01	84,01	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AV	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	40	60	65	70	75	80	85	
2	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	40	60	65	70	75	80	85	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	40	60	65	70	75	80	85	
AW	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.339,6	4.556,6	4.907,4	5.275,5	5.671,1	6.096,5	6.553,7	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	48,8	50,2	51,7	53,2	54,8	56,4	58,1	
AX	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	20	20	30	30	40	40	50	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	7,21	7,30	7,46	7,63	7,81	8,00	8,20	
3	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	80	80	82	85	87	90	93	
4	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	Produk	1	1	1	1	1	1	1	
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	75	75	77	80	82	85	86	
AY	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	
2	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	70	75	80	85	90	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	891	891	891	891	891	891	891	
4	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	60	65	70	75	80	85	90	
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	2.500	2.625	2.756	2.894	3.039	3.191	3.191	
6	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	70	75	80	85	90	95	100	
7	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	45	50	55	60	65	70	75	
8	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	40	50	60	70	75	80	85	
9	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	50	55	65	70	75	80	90	
10	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	70	75	80	85	90	95	100	
11	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
AZ	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai Ekspor Barang	Nilai	1	1	1	1	2	3	3	
3	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	22,22	22,22	44,44	66,67	77,78	88,89	100	
6	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	70	70	72	74	76	78	80	
BA	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	10	10	12,50	25	37,50	50	62,50	
BB	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	20	20	25	30	35	40	45	
2	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	9	9	9	9	9	9	9	
6	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BC	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
BD	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BE	5.02 - KEUANGAN									
1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	10	10	10	10	10	10	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Peningkatan Target Retribusi Daerah	%	0	75	80	85	90	95	100	
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	30	30	30	30	30	30	30	
6	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11,5	
8	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	62	75	80	85	90	95	100	
9	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	40	40	40	40	40	40	40	
10	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	10	10	10	10	10	10	10	
BF	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	50,59	52	55	58	63	66	70	
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	85	85	86	87	88	89	90	
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	85	85,14	88	90	95	96	97	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
BG	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	72	72,74	75	80	80	80	80	
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	89	89,49	95	96	98	98,5	99	
3	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	3,6	3,70	3,78	3,81	3,85	3,89	3,93	
BH	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	52,00	60,00	68,00	76,00	84,00	92,00	100,00	
2	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase	60,00	75,00	80,00	83,33	85,71	87,50	95,00	
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase	50,00	55,55	60,00	73,33	80,00	82,50	95,00	
6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	60,00	66,67	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
8	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
BI	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	80,15	81,31	81,50	81,75	82,00	82,35	82,50	
BJ	7.01 - KECAMATAN									
1	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	80	85	85	85	85	85	85	
4	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	85	85	85	85	85	85	85	
11	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	85	85	85	85	85	85	85	
12	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	80	85	85	85	85	85	85	
14	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	90	90	90	90	90	90	90	
15	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	90	95	95	95	95	95	95	
17	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	90	90	90	90	90	90	90	
19	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
21	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	90	90	90	90	90	90	90	
23	persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BK	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2025

*) Hasil Kesepakatan Pramusrenbang Provinsi Sumatera Selatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan daerah. RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pengembangan wilayah, manajemen keuangan daerah, serta program kolaboratif antar lembaga. Proses penyusunannya selaras dengan dokumen perencanaan hierarkis, seperti RPJPD Kota Lubuk Linggau 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029. Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, RPJMD Kota Lubuk Linggau juga menjadi landasan untuk menyusun dokumen perencanaan lain guna menjamin keselarasan dan keberlanjutan pelaksanaan di masa depan. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030.

Di bawah ini dijabarkan kaidah operasional dan pedoman transisi yang tercantum dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029 merupakan landasan operasional bagi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

RPJMD menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan sesuai dengan urusan masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat keselarasan dan keterpaduan antara RPJMD sebagai dokumen makro dan Renstra sebagai dokumen sektoral dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kota Lubuk Linggau telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD digunakan sebagai sistem terpadu untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja daerah. Melalui SIPD, proses perencanaan dilakukan secara sistematis dan transparan, memastikan konsistensi data antarlevel pemerintahan serta efisiensi dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah.

Pelaksanaan RPJMD akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev), baik di tingkat program maupun kegiatan. Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan Renstra masing-masing. Evaluasi akhir periode RPJMD juga akan dilakukan untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh sebagai dasar perencanaan selanjutnya.

Perubahan terhadap RPJMD dimungkinkan apabila terjadi kondisi tertentu, seperti perubahan kebijakan nasional, bencana alam yang signifikan, atau adanya perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian perencanaan. Perubahan ini harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan RPJMD, pelaksanaan program dan kegiatan juga akan mendapat perhatian melalui pengawasan eksternal, baik oleh lembaga legislatif maupun aparat pengawas internal pemerintah. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah memegang peran strategis sebagai aparat pengawasan internal yang bertugas melakukan reviu, pengawasan, dan evaluasi atas pencapaian kinerja pembangunan. Inspektorat Daerah berperan aktif dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dengan penerapan kaidah pelaksanaan yang terintegrasi, keterpaduan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dukungan teknologi melalui SIPD, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang konsisten, serta pengawasan internal dan eksternal yang kuat, diharapkan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5.2. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2030 di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD.



BAPPEDALITBANG KOTA LUBUK LINGGAU



LINGGAU JUARA
Maju Kotanya Sejahtera Masyarakatnya

PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl.Garuda No. 10 Kelurahan Kayu Ara Lubuk Linggau Barat I Sumatera Selatan Telepon (0733)
325513 Fax. (0733) 325513 Koda Pos 31615